



REVITALISASI KURIKULUM SMK PARIWISATA

Kompetensi Keahlian Tata Boga



REVITALISASI KURIKULUM SMK PARIWISATA KOMPETENSI KEAHLIAN TATA BOGA

**PUSAT PENELITIAN KEBIJAKAN
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAN PERBUKUAN
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

2020

REVITALISASI KURIKULUM SMK PARIWISATA KOMPETENSI KEAHLIAN TATA BOGA

Penulis:

Subijanto (Kontributor Utama)
Darmawan Sumantri (Kontributor Anggota)
Asri Ika Dwi Martini (Kontributor Anggota)
Iwan Mustari (Kontributor Anggota)
Tatik Soroeida (Kontributor Anggota)

ISBN: 978-602-0792-73-6

Penyunting:

Dr. Syaikhul Usman
Nur Listiawati, S.S., M.Ed.

Tata Letak:

Fadhilah Darma

Desain Kover:

Genardi Atmadiredja

Penerbit:

Pusat Penelitian Kebijakan, Badan Penelitian dan Pengembangan dan Perbukuan,
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Redaksi:

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Gedung E Lantai 19
Jalan Jenderal Sudirman-Senayan, Jakarta 10270
Telp. +6221-5736365
Faks. +6221-5741664
Website: <https://puslitjakdikbud.kemdikbud.go.id>
Email: puslitjakbud@kemdikbud.go.id

Cetakan pertama, 2020

PERNYATAAN HAK CIPTA

© Puslitjakdikbud/Copyright@2020

Hak cipta dilindungi undang-undang.

Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan dengan cara apapun tanpa izin tertulis dari penerbit.

KATA SAMBUTAN

Segala puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat, taufik, rahman dan rahimNya sehingga Buku berjudul Revitalisasi Kurikulum SMK Pariwisata Kompetensi Keahlian Tata Boga dapat diselesaikan dengan tepat waktu. Laporan penelitian ini dirasa cukup komprehensif untuk menjawab salah satu Inpres kepada Kemendikbud dalam melakukan penyelarasan kurikulum SMK dengan kompetensi yang dibutuhkan pengguna lulusan (*link and match*).

Sesuai Inpres Nomor 9 Tahun 2016 tentang Revitalisasi Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dalam rangka Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia (SDM) Indonesia, Pusat Penelitian Kebijakan telah berkontribusi terhadap salah satu dari enam tugas yang menjadi tupoksinya. Berbagai pihak telah berpartisipasi dan berkontribusi terhadap hasil penelitian ini, bekerjasama dengan para pemangku kepentingan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendidikan vokasi masih perlu di tata dan di-*update* serta di-*upgrade* dari beberapa aspek khususnya keberadaan kurikulum SMK serta keselarasan dan kesepadanan (*link and match*) dengan kebutuhan dunia kerja yang secara bertahap dan berkesinambungan perlu ditata ulang.

Kami berharap buku hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai sumber

bacaan bagi komunitas pengelola dan praktisi pendidikan kejuruan di Indonesia. Di samping itu, dapat pula dijadikan bahan pertimbangan kebijakan dalam melakukan penyempurnaan dan penyesuaian Kurikulum SMK Bidang Keahlian lainnya dengan mengacu pada Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) Level II.

Atas perhatian, kerja sama dan kontribusi dari berbagai pihak kami mengucapkan terima kasih.

Jakarta, Agustus 2020
Plt. Kepala Pusat,

Irsyad Zamjani, Ph.D.

KATA PENGANTAR

Buku ini merupakan tindak lanjut hasil studi “Kesesuaian Kurikulum SMK dengan Kompetensi yang Dibutuhkan Dunia Kerja” atau berbasis kebutuhan industri merupakan salah satu dari enam tugas prioritas Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana diinstruksikan Presiden Republik Indonesia melalui Inpres Nomor 9 Tahun 2016 tentang Revitalisasi Pendidikan Vokasi.

Buku ini berisi kajian yang komprehensif terhadap Kurikulum SMK Pariwisata khususnya Kompetensi Keahlian Tata Boga yang dikembangkan sesuai dengan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) Level II yang mengadopsi Kurikulum Pariwisata tingkat *Association of South East Asian Nations* (ASEAN) (*Common ASEAN Tourism Curriculum*). Hal ini relevan dengan masuknya Indonesia ke dalam komunitas Masyarakat Ekonomi Asia (MEA) mulai tahun 2020 dan Era Perdagangan Bebas di kalangan Asia (*Asia Free Trade Area*). Pelaksanaan studi ini dilakukan atas kerjasama para pihak yang berkompeten yaitu Badan Nasional Standar Profesi (BNSP), Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan (Dir. SMK), Pusat Kurikulum dan Pembelajaran, Balitbangdikbud, Pusat Pengembangan Pelatihan Pendidik dan Tenaga Kependidikan (P4TK) Bisnis dan Pariwisata, serta dunia usaha/dunia industri (DU/DI) di bidang Perhotelan, SMKN 27

dan SMKN 57, serta Asosiasi Perhotelan sebagai narasumber.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa masih terdapat kelemahan pada buku ini di berbagai aspek. Oleh karena itu, penulis mengharap adanya kritik yang konstruktif dan saran perbaikan lebih lanjut. Kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi terhadap isi buku ini penulis menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya dan terima kasih atas kerjasamanya

Jakarta, Agustus 2020

Penulis

DAFTAR ISI

KATA SAMBUTAN	III
KATA PENGANTAR	V
DAFTAR ISI	VII
DAFTAR TABEL	IX
DAFTAR GAMBAR	X
DAFTAR GRAFIK	XI
 BAB I PENDAHULUAN	 1
A. Latar Belakang	1
B. Tujuan	7
C. Metode	7
 BAB II TINJAUAN UMUM PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN MENENGAH KEJURUAN DI INDONESIA	 9
A. Karakteristik dan Prinsip Pendidikan Kejuruan	9
B. Peran, fungsi, dan manfaat Pendidikan Kejuruan	12
C. Tantangan Penyelenggaraan Pendidikan Kejuruan	14
D. Pendidikan Kejuruan di Indonesia	16
E. Urgensi Pendidikan Kejuruan	19

F. <i>Benchmarking</i> Pendidikan Kejuruan	27
--	----

BAB III KURIKULUM SMK PARIWISATA BERBASIS INDUSTRI	37
A. Kurikulum Sekolah Menengah Kejuruan	37
B. SMK Pariwisata	41
1. Spektrum (Penjurusan) Bidang Keahlian Pariwisata	43
2. Struktur Kurikulum Kompetensi Keahlian Tata Boga	44
3. KKNI (Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia) dan SKKNI (Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia)	46
C. Penyesuaian Kurikulum SMK Pariwisata Berbasis CATC (<i>Common Asean Tourism Curriculum</i>)	51
D. Dunia Kerja	67
E. Praktik Kerja Industri	74
F. Uji Kompetensi/Sertifikasi	78
 BAB IV BEBERAPA KONDISI EKSISTING PENYELENGGARAAN SMK PARIWISATA KOMPETENSI KEAHLIAN TATA BOGA	 81
A. Kesuaian Kurikulum	81
B. Pelaksanaan Kegiatan Pembelajaran	86
C. Kualifikasi Pendidik	89
D. Kondisi Sarana-Prasarana Pendidikan	90
E. Pelaksanaan Praktek Kerja Industri (prakerin)	90
F. Uji Kompetensi/Sertifikasi	91
 BAB V SIMPULAN DAN REKOMENDASI	 93
A. Simpulan	93
B. Rekomendasi	95
 DAFTAR PUSTAKA	 101

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Analisis Perbandingan Pendidikan kejuruan di Jerman dan di Indonesia	34
Tabel 2. Spektrum Bidang Keahlian Pariwisata	44
Tabel 3. Struktur Kurikulum SMK KK Tata Boga	45
Tabel 4. Deskripsi Jenjang KKNI (Skala Level II SMK)	46
Tabel 5. Skema SKKNI Level II pada KK Tata Boga tahun 2017	48
Tabel 6. SKKNI Level II untuk KK Tata Boga tahun 2018 (hasil revisi)	52
Tabel 7. Perbedaan Kelengkapan Legalitas antara SKKNI Level II KK Tata Boga Th 2017 dengan Th 2018	55
Tabel 8. Pencapaian kompetensi untuk mendapatkan Kualifikasi (Sertifikat)	56
Tabel 9. Klasterisasi, Jumlah dan Rincian Unit Kompetensi	56

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Kualifikasi dan Kesesuaian Guru Kelompok Mapel C2 dan C3	61
Gambar 2. Masa kerja dan Status Guru Kelompok Mapel C2 dan C3	62
Gambar 3. Keikutsertaan Guru dalam Pelatihan dan Magang di DU/DI	63
Gambar 4. Keberadaan Sarana dan Perlengkapan Praktik dengan Kondisi Baik	66

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1. Penduduk Usia > 15 Tahun Bekerja Menurut Tingkat Pendidikan	4
Grafik 2. Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka Lulusan SMK dan Lulusan Satuan Pendidikan Lainnya	4

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pariwisata merupakan salah satu kegiatan yang secara langsung berhubungan dengan masyarakat di berbagai aspek kehidupan. Bahkan, pariwisata menjadi “daya ungkit” perubahan di berbagai aspek kehidupan, seperti ekonomi, sosial budaya, lingkungan hidup, nilai pergaulan dan ilmu pengetahuan, perdagangan, pendidikan, dan di berbagai kesempatan kerja.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 penyelenggaraan sekolah menengah kejuruan (SMK) dimaksudkan untuk menyiapkan peserta didik memiliki keterampilan/keahlian di bidang tertentu sehingga siap memasuki dunia kerja, baik sebagai tenaga kerja yang produktif maupun mengembangkan dirinya untuk menciptakan lapangan kerja bagi dirinya sendiri melalui berwirausaha. Kepemilikan sumber daya manusia (SDM) berupa tenaga kerja yang ahli, terampil dan produktif menjadi sebuah tuntutan bagi negara yang kaya akan sumber daya alam seperti Indonesia. agar segala nilai tambah (*added values*) dari sumber daya alam sebagai bahan baku berbagai industri dapat dinikmati semaksimal mungkin oleh rakyat Indonesia sendiri.

Beberapa alasan diperlukannya tenaga kerja yang terampil dan produktif menurut Djojonegoro (1998) yaitu:

“(1) tenaga terampil adalah orang yang terlibat langsung dalam proses produksi barang maupun jasa; (2) tenaga terampil sangat diperlukan untuk mendukung pertumbuhan industri di suatu negara; (3) kemajuan teknologi adalah faktor penting dalam meningkatkan keunggulan, faktor keunggulan ini tergantung pada tenaga terampil yang menguasai dan mengaplikasikannya; (4) orang yang memiliki keterampilan memiliki peluang tinggi untuk bekerja dan produktif, semakin banyak suatu negara mempunyai tenaga terampil dan produktif maka semakin kuat pembangunan ekonomi negara yang bersangkutan, dan (5) persaingan global berkembang semakin ketat dan tajam, tenaga terampil adalah faktor keunggulan menghadapi persaingan global.”

Dalam era global saat ini Indonesia tidak dapat menghindar dari arus globalisasi, terutama dalam bentuk persaingan bebas yang semakin meluas dalam perputaran lalu lintas arus produksi dan perdagangan barang dan jasa, tenaga kerja, serta modal. Persaingan tersebut setidaknya dalam lingkup regional ASEAN, seiring dengan dideklarasikannya *Asean Economic Community* atau MEA (Masyarakat Ekonomi Asean) akhir tahun 2015 yang lalu. Meskipun MEA dibentuk dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan semua negara anggota ASEAN dalam menghadapi persaingan global, namun tak bisa dipungkiri pembentukan komunitas perekonomian tersebut secara internal menimbulkan pula persaingan diantara negara-negara sesama anggota ASEAN sendiri. Bagi sebagian besar negara anggota ASEAN termasuk Indonesia, MEA bisa menjadi peluang tetapi sekaligus juga menjadi tantangan.

Pola penyelenggaraan SMK di Indonesia cenderung masih berorientasi pada “*supply driven*” di mana jenis program studi, materi pendidikan, cara mengajar, media belajar, evaluasi dan sertifikasi lebih ditentukan oleh *provider* utama yaitu Pemerintah. Program studi di SMK kurang fleksibel terhadap perubahan kebutuhan lapangan kerja yang sering berubah-ubah sehingga terjebak ke dalam pameo “membidik sasaran yang bergerak” (Suryadi, 2010).

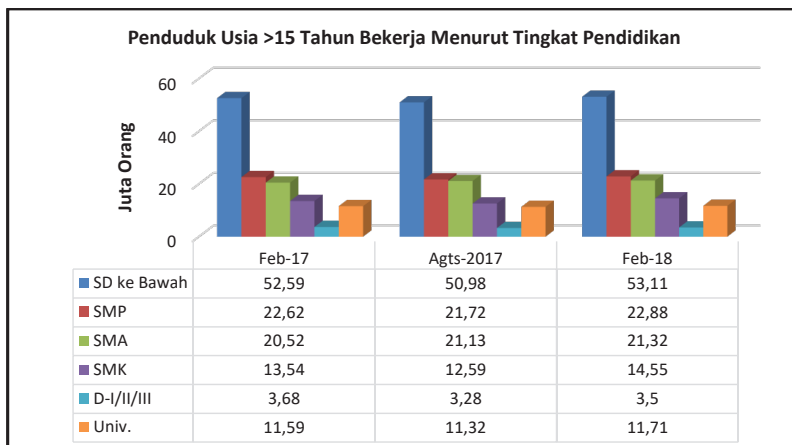
Secara empirik, penyelenggaraan proses pembelajaran SMK masih mengalami permasalahan utama, yaitu 1) belum semua kompetensi keahlian yang dibuka di SMK sesuai dengan kebutuhan industri atau kebutuhan masyarakat di sekitarnya; 2) tingkat kompetensi lulusan belum semuanya sesuai standar yang dibutuhkan industri; 3) lulusan yang sudah kompeten belum mendapat pengakuan resmi dalam bentuk sertifikat kompetensi; 4) kurangnya informasi ke industri tentang kompetensi keahlian yang diselenggarakan di SMK; 5) kurangnya informasi tentang kebutuhan dan peluang kerja bagi lulusan SMK di industri; 6) belum semua regulasi mendukung pengembangan SMK; dan 7) kurangnya dukungan pihak terkait terhadap pengembangan SMK (Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan, 2016a)

Terkait dengan penyelenggaraan SMK, studi yang dilakukan Slamet, P. H (2016) menunjukkan 1) SMK masih menyelenggarakan fungsi tunggal yaitu menyiapkan siswanya untuk bekerja pada bidang tertentu sebagai karyawan; 2) lemah dalam menyiapkan lulusannya untuk menjadi wirausahawan; 3) lambat dalam daya tanggapnya terhadap dinamika tuntutan pembangunan ekonomi; 4) belum optimal keselarasannya dengan dunia kerja; dan 5) belum memberikan kepastian jaminan terhadap lulusannya untuk memperoleh pekerjaan yang layak.

Dalam upaya menangani permasalahan tersebut, Dir. PSMK (2016a) Ditjen Dikdasmen Kemendikbud telah melakukan upaya perbaikan dan pengembangan di berbagai hal akan tetapi belum memecahkan persoalan terkait dengan kualitas lulusan SMK, yakni (a) lulusannya belum semua langsung mendapat pekerjaan yang sesuai, (b) lulusannya belum semua mampu bekerja mandiri, (c) terbatasnya guru produktif yang berkualitas/profesional; (c) terbatasnya partisipasi masyarakat terhadap penyelenggaraan SMK; (d) kualitas pembelajaran yang belum berorientasi pada industri; (e) tantangan perubahan yang begitu cepat, dan (f) kurang adanya kolaborasi antara sekolah dan DU/DI secara efektif. Akibatnya, daya serap lulusan SMK ke dunia kerja masih rendah dan tingginya tingkat pengangguran

terbuka lulusan SMK dibandingkan dengan lulusan satuan pendidikan lainnya sebagaimana ditunjukkan pada Grafik 1 di bawah ini.

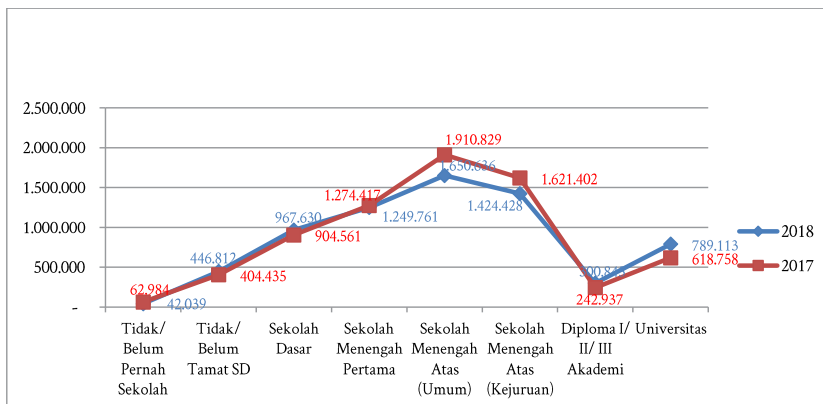
Grafik 1. Penduduk Usia >15 Tahun Bekerja Menurut Tingkat Pendidikan



Sumber: BPS, 2017

Data pada Grafik 1 mengindikasikan bahwa kondisi lulusan SMK saat itu masih 1) belum mampu mengisi posisi ketenagakerjaan yang tersedia; dan 2) belum memiliki daya saing yang kompetitif.

Grafik 2. Perbandingan tingkat pengangguran terbuka lulusan SMK dan lulusan satuan pendidikan lainnya



Sumber: BPS, 2018

Selanjutnya, Grafik 2 menunjukan lulusan SMK juga masih cukup tinggi tingkat pengangguran terbukanya (sekalipun terjadi penurunan), yakni pada urutan kedua tertinggi setelah lulusan SMA dan juga dibandingkan dengan lulusan jenjang pendidikan lainnya.

Dalam upaya merintis lulusan SMK dengan kebutuhan DU/DI, Mendikbud (waktu itu, Wardiman Djojonegoro) menerapkan pendidikan “*dual system*” atau pendidikan sistem ganda di SMK secara bertahap. Namun, hal tersebut mengalami pasang surut sehingga keterkaitan dan kesepadanan (*link and match*) antara kompetensi lulusan SMK tidak sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan DU/DI (dunia usaha /dunia industri). *Link and match* menjadi permasalahan serius dalam kebijakan pendidikan vokasi di Indonesia.

Kebijakan *link and match* di SMK masih belum berhasil diimplementasikan di Indonesia dikarenakan beberapa faktor, antara lain: 1) jumlah industri dan perusahaan sebagai mitra kerja SMK (sebagai institusi pasangan) penyelenggaraan pendidikan di dunia kerja tidak sebanding dengan jumlah SMK maupun jumlah siswa SMK yang ada di Indonesia, 2) Belum tercipta suasana “mutual simbiosis” antara SMK dan dunia usaha/dunia industri yang saling memahami (*mutual understanding*), saling menguntungkan (*mutual benefit*) dan saling membutuhkan (*mutual need*), 3) Konsistensi kebijakan Kementerian Pendidikan yang sering berubah-ubah (kurang *sustainable*) terhadap penyelenggaraan pendidikan (sering berganti skala prioritas); dan 4) Keterbatasan ketersediaan instruktur pembimbing siswa SMK yang melakukan praktik industri di setiap DU/DI sebagai mitra kerja SMK.

Dalam berbagai kesempatan, Presiden Joko Widodo telah berulang kali menyampaikan pesan agar Kemendikbud lebih memfokuskan pada penyiapan SDM Indonesia yang berkualitas. Harapannya, Indonesia dapat menciptakan tenaga kerja yang berdaya saing dan terampil yang salah satu diantaranya dihasilkan dari pendidikan dan pelatihan vokasi yang bermutu dan relevan dengan tuntutan dunia usaha dan industri (DU/DI).

Melalui Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Revitalisasi pendidikan vokasi (SMK) diamanatkan kepada 11 Menteri Kabinet Kerja, 34 Gubernur, dan Kepala Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing untuk merevitalisasi SMK guna meningkatkan kualitas dan daya saing SDM Indonesia.

Khusus kepada Mendikbud, Presiden Jokowi memberikan enam instruksi. Salah satu instruksi yang dimaksud yaitu “menyempurnakan dan menyelaraskan kurikulum SMK dengan kompetensi sesuai kebutuhan pengguna lulusan (*link and match*)”.

Realitanya, SMK Pariwisata memiliki berbagai tantangan secara internal, eksternal, nasional, dan bahkan regional. Khusus berkaitan tantangan regional, Indonesia dihadapkan dengan adanya komitmen kerja sama pembangunan di tingkat ASEAN dan APEC sebagai sebuah tantangan yang mutlak perlu dipertimbangkan dalam pengembangan konsep SMK (Pariwisata) di masa mendatang. Kesepakatan dengan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) memberikan implikasi terhadap Indonesia. Apabila Indonesia mampu untuk menyiapkan diri melalui bidang pembangunan pendidikan termasuk SMK Pariwisata

Tantangan utama bagi bangsa Indonesia di masa mendatang yaitu meningkatnya daya saing dan keunggulan kompetitif di semua sektor industri dan sektor jasa dengan mengandalkan pada kemampuan SDM, teknologi, dan manajemen. Nilai kompetisi diperlukan untuk membangun daya saing bangsa dan ketahanan ekonomi masyarakat. SMK merupakan salah satu aset yang cukup besar. Apabila bangsa Indonesia ingin maju dan berkembang, maka SMK perlu ditangani secara profesional dengan melibatkan berbagai unsur para pemangku kepentingan pendidikan kejuruan.

Menurut Jalal (2015) diperkirakan pada tahun 2040 Indonesia akan memiliki 195 juta penduduk usia produktif dan 60 persen penduduk usia muda sehingga Indonesia memiliki kesempatan memperoleh “bonus

demografi” sekaligus menyongsong 100 tahun Indonesia merdeka. Namun, jika Indonesia tidak mampu mengelola dengan baik, maka Indonesia akan kehilangan kesempatan tersebut selamanya sehingga “Indonesia Emas” tidak dapat diraih.

Dalam rangka menghadapi kompetisi global, sedang dirintis SMK Pariwisata unggulan dengan menerapkan *Curriculum ASEAN Tourism* (CAT), di 20 SMK yaitu:

“SMK Negeri 2 Batam, SMK Negeri 3 Pematang Siantar, SMK Negeri 3 Pangkalpinang, SMK Negeri 6 Palembang, SMK Negeri 1 Pandeglang, SMK Negeri 27 Jakarta, SMK Negeri 57 Jakarta, SMK Swasta Metland Bogor, SMK Negeri 9 Bandung, SMK Negeri 6 Semarang, SMK Negeri 6 Yogyakarta, SMK Negeri 1 Buduran Sidoarjo, SMK Negeri 2 Boyolangu (Klaten), SMK Negeri 3 Malang, SMK Negeri 5 Pontianak, SMK Negeri 4 Banjarmasin, SMK Negeri 3 Kendari, SMK Negeri 3 Denpasar, SMK Negeri 2 Mataram, SMK Sadar Wisata Ruteng, dan SMK Negeri 1 Ternate.”

B. TUJUAN

Mengacu pada latar belakang dan permasalahan, penelitian ini dilakukan untuk mengkaji: (1) Kesesuaian kompetensi lulusan SMK Pariwisata KK Tata Boga yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja; (2) Kegiatan belajar mengajar; (3) Kualifikasi pendidik; (4) Kondisi sarana prasarana pembelajaran; (5) Pelaksanaan praktik kerja industri, (6) Pelaksanaan uji kompetensi (sertifikasi) siswa.

C. METODE

Metode penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif melalui meta analisis untuk memetakan unit-unit kompetensi dalam Skema Standar Kualifikasi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) level II pada Tata Boga yang diadopsi ke dalam Kurikulum, dan selanjutnya dituangkan dalam rencana pelaksanaan pembelajaran, silabus, dan lembar kerja/praktik.

Pendekatan Kualitatif melalui studi kasus di lima sekolah sampel untuk mendeskripsikan penyesuaian kurikulum pada KI/KD masing-masing kelompok mata pelajaran dasar keahlian (C2) dan kompetensi keahlian (C3). Adapun indikator kesesuaian/keselarasan kurikulum meliputi (1) kesesuaian dalam jenis kompetensi dan kedalaman tingkat kompetensi berbasis Skema SKKNI level II, (2) pembelajaran (perencanaan pembelajaran, proses pelaksanaan pembelajaran, dan penilaian hasil belajar), (3) kualifikasi dan kompetensi pendidik, (4) kondisi sarana dan prasarana pembelajaran, (5) pelaksanaan praktik kerja industri, dan 6) pelaksanaan uji kompetensi/sertifikasi.

B A B II

TINJAUAN UMUM PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN MENENGAH KEJURUAN DI INDONESIA

A. KARAKTERISTIK DAN PRINSIP PENDIDIKAN KEJURUAN

Pendidikan memiliki peranan yang esensial untuk menjamin kelangsungan hidup suatu negara dan bangsa. Pendidikan kejuruan pada hakikatnya merupakan subsistem dari sistem pendidikan nasional. Menurut Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 18 Pendidikan kejuruan dijelaskan bahwa pendidikan kejuruan merupakan pendidikan menengah yang mempersiapkan peserta didik untuk bekerja pada bidang tertentu-

Oleh karena itu, tujuan penyelenggaraan sekolah menengah kejuruan (SMK) dimaksudkan untuk menyiapkan siswa (1) memasuki lapangan pekerjaan tertentu serta mengembangkan sikap profesional; (2) memiliki bekal dan kemampuan memilih karir, mampu berkompetisi, dan mampu mengembangkan diri; (3) menjadi tenaga kerja tingkat menengah yang mandiri dan/atau mengisi kebutuhan dunia usaha dan industri pada saat ini maupun masa yang akan datang.

Dengan demikian, keberadaan pendidikan kejuruan dalam hal ini SMK dimaksudkan untuk menciptakan tenaga kerja yang memiliki kompetensi sesuai paket keahlian masing-masing. SMK dikatakan berhasil manakala

para lulusan sekolah tersebut dapat diserap oleh dunia industri dan dunia industri (DU/DI) sesuai paket keahliannya dan kompetensi keahlian sebagaimana dinyatakan dalam ‘sertifikasi’ masing-masing paket keahlian.

SMK dituntut untuk senantiasa berorientasi pada kebutuhan DU/DI sebagai penyedia lapangan kerja dengan memformulasikan silabus atau kurikulum yang berorientasi pada kompetensi dan tuntutan dunia kerja sesuai kebutuhan di daerah masing-masing pada masa kini maupun masa yang akan datang. Oleh karena itu, setiap SMK harus senantiasa merevisi/menyesuaikan kurikulum yang senantiasa *update* dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) dan kebutuhan DU/DI. Namun demikian, tidak berarti bahwa SMK hanya sekadar untuk mempersiapkan tenaga kerja yang siap pakai, namun lebih dari itu, SMK berperan sebagai lembaga pendidikan formal yang bertugas mempersiapkan SDM Indonesia yang berkarakter, mampu mengikuti perkembangan pengetahuan dan teknologi serta menjadi manusia yang produktif.

Penyelenggaraan pendidikan di SMK dilaksanakan selama 3 (tiga) tahun dan/atau 4 (empat) tahun sesuai dengan tuntutan tingkat penguasaan kompetensi pada bidang keahlian tertentu yang dibutuhkan dunia kerja. Penyelenggaraan SMK dilaksanakan secara terintegrasi antara teori dan praktik di sekolah dan/atau di dunia usaha dan dunia kerja (DU/DI).

Terkait dengan karakteristik pendidikan kejuruan, Wardiman Djojonegoro sebagaimana dikutip Sudira (2006) terdapat 9 (sembilan) karakteristik penyelenggaraan SMK, yaitu:

1. mempersiapkan peserta didik memasuki lapangan kerja;
2. berorientasi pada kebutuhan lapangan kerja (*demand driven*);
3. menguasai kompetensi yang dibutuhkan oleh dunia kerja;
4. kesuksesan peserta didik pada “*hands-on*” atau performa dunia kerja;
5. memiliki hubungan erat dengan dunia kerja sebagai kunci sukses pendidikan kejuruan;
6. responsif dan antisipatif terhadap kemajuan teknologi;
7. *learning by doing* dan *hands on experience*;

8. membutuhkan fasilitas mutakhir untuk praktik; dan
9. memerlukan biaya investasi dan operasional yang lebih besar.

Berdasarkan karakteristik tersebut, diharapkan para lulusan SMK memiliki karakter sebagaimana calon tenaga kerja tingkat menengah yang berkepribadian secara utuh sebagai warga negara Republik Indonesia dan sebagai warga pekerja yang berbekal keterampilan/kompetensi yang siap bekerja di bidang tertentu sesuai dengan tuntutan DU/DI. Agar para lulusan SMK memiliki wawasan kerja secara nyata maka penyelenggaraan pendidikan di SMK dilaksanakan dengan sistem ganda (*dual system*) melalui praktik kerja industri (prakerin) sebagai realisasi program pendidikan sistem ganda di sekolah dan di DU/DI.

Pelaksanaan pendidikan SMK akan mencapai sasaran manakala dapat menerapkan prinsip-prinsip pendidikan kejuruan yang efisien jika ditunjang lingkungan yang kondusif, di mana peserta didik dilatih/dipersiapkan dan dikondisikan/disimulasikan sebagaimana suasana bekerja yang senyatanya di DU/DI. Pendidikan SMK akan efektif manakala tugas-tugas pendidikan (sekolah) dan tugas pelatihan kerja (DU/DI) dapat dilaksanakan secara terpadu, terkait, dan sepadan serta ditunjang oleh fasilitas peralatan yang kurang lebih sama (media simulasi) seperti yang diperlakukan di DU/DI.

Pendidikan SMK akan efektif jika melatih kebiasaan peserta didik berpikir dan bekerja seperti di DU/DI, sehingga setiap individu dapat mengembangkan minat, meningkatkan pengetahuan, dan kompetensinya secara optimal untuk bekal kerja. Pendidikan SMK juga akan efektif manakala pendidikan dan pelatihan mampu membentuk kebiasaan bekerja dengan tekun, teliti, cermat, cerdas, dan *smart* serta tanggung jawab melalui pembiasaan berpikir sistemik.

B. PERAN, FUNGSI, DAN MANFAAT PENDIDIKAN KEJURUAN

Pendidikan Kejuruan atau sekolah menengah kejuruan (SMK) sebagai subsistem dalam Sistem Pendidikan Nasional memiliki **peran** yang esensial dalam mencerdaskan bangsa. Hal ini diperkuat sebagaimana tertuang dalam Pembukaan UUD RI Tahun 1945 bahwa pada hakikatnya keberadaan pendidikan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Sebagai salah satu contoh bahwa peran pendidikan memiliki pengaruh terhadap kemajuan suatu bangsa mengutip pernyataan mantan Presiden Amerika Serikat George Bus, bahwa *“As a nation, we now invest more in education than in defense”* (Sutanto, D. Hisyam, 2000). Hal ini mengindikasikan bahwa betapa pentingnya investasi pendidikan dalam mengantarkan peradaban suatu bangsa.

Selanjutnya Unesco (2000) menyatakan bahwa *“Education is critical for achieving environmental and ethical awareness, values and attitudes and behavior consistent with sustainable development and for effective public participation in decision-making. Both formal and non-formal education are indispensable to sustainable development”*.

Pernyataan tersebut dapat dimaknai bahwa pendidikan merupakan wahana untuk membangun lingkungan dan kesadaran etika, nilai, sikap dan perilaku yang konsisten untuk pembangunan berkelanjutan, dan merupakan sarana yang efektif untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembuatan keputusan. Baik pendidikan formal maupun nonformal dapat berperan dalam pembangunan yang berkelanjutan.

Dalam konteks pendidikan kejuruan, Jandhyala (2002) dalam buku yang berjudul *Vocational Education And Training In Asia*, menyatakan bahwa *“Modern technology requires fewer highly qualified middle and lower level skilled personnel. Vocational education can produce exactly this kind of manpower.”* Teknologi yang modern membutuhkan tenaga kerja tingkat bawah dan menengah yang berkualitas dan terampil. Pendidikan kejuruan merupakan institusi pendidikan yang dapat memproduksi tenaga kerja yang

dibutuhkan. Lebih lanjut, *Vocational and technical secondary education can establish a closer relationship between school and work*. Pendidikan kejuruan dan teknik dapat menghubungkan/menjembatani antara sekolah dan dunia kerja (DU/DI). Sebagai konsekuensi logis, maka bagi masyarakat yang akan bekerja harus mengikuti pembelajaran pada pendidikan kejuruan, dan dunia kerja yang membutuhkan tenaga kerja dapat saling sharing dengan pendidikan kejuruan (SMK). Demikian juga pernyataan *Vocational education is considered helpful in developing what can be termed as "skill-culture" and attitude towards manual work*. Bahwa pendidikan kejuruan membantu pembentukan budaya terampil dan membentuk sikap kerja dalam pekerjaan yang sifatnya manual.

Peran dan fungsi SMK secara proporsional sebagai institusi pendidikan formal, SMK berperan sebagai institusi yang berperan dalam menghasilkan calon tenaga kerja tingkat menengah yang berkompeten dan siap latih untuk memasuki lapangan pekerjaan tertentu.

Dalam hal **fungsi SMK** sebagaimana pendapat Wardiman Djojonegoro (dalam Sudira, 2009) bahwa pendidikan kejuruan memiliki multi fungsi yang jika dilaksanakan dengan profesional akan berkontribusi besar terhadap pencapaian tujuan pembangunan nasional.

Fungsi-fungsi tersebut meliputi (1) sosialisasi, yaitu, transmisi dan konkretisasi nilai-nilai ekonomi, solidaritas, religi, seni, dan jasa; (2) kontrol sosial yaitu, kontrol perilaku dengan norma-norma kerjasama, keteraturan, kebersihan, kedisiplinan, kejujuran, keterbukaan; (3) seleksi dan alokasi yaitu, mempersiapkan, memilih, dan menempatkan calon tenaga kerja sesuai dengan permintaan pasar kerja; (4) asimilasi dan konservasi budaya yaitu, absorpsi antar budaya masyarakat serta pemeliharaan budaya lokal; dan (5) mempromosikan perubahan demi perbaikan.

Idealnya, pendidikan kejuruan tidak sekedar mendidik dan melatih keterampilan yang ada, tetapi juga harus berfungsi sebagai pendorong perubahan. Pendidikan kejuruan berfungsi sebagai proses akulturasi atau

penyesuaian diri dengan perubahan dan enkulturasi atau pembawa perubahan bagi masyarakat. Oleh karena itu, pendidikan kejuruan tidak hanya adaptif tetapi juga harus antisipatif.

Selain didasarkan pada fungsinya, urgensi pendidikan kejuruan dapat dikaji dari manfaatnya. Menurut Sudira (2009):

pendidikan kejuruan memiliki tiga **manfaat utama** yaitu: (1) bagi peserta didik sebagai peningkatan kualitas diri, peningkatan peluang mendapatkan pekerjaan, peningkatan peluang berwirausaha, peningkatan penghasilan, penyiapan bekal pendidikan lebih lanjut, penyiapan diri bermasyarakat, berbangsa, bernegara, penyesuaian diri terhadap perubahan dan lingkungan; (2) bagi dunia kerja dapat memperoleh tenaga kerja berkualitas tinggi, meringankan biaya usaha, membantu memajukan dan mengembangkan usaha; (3) bagi masyarakat dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan produktivitas nasional, meningkatkan penghasilan negara, dan mengurangi pengangguran.

Secara makro, pendidikan kejuruan telah terbukti mempunyai peran yang besar dalam pembangunan industri, seperti di Jerman. Priowiryanto, G.H. (Kompas, 20 April 2002) menyatakan “Jerman menjadi negara industri yang tangguh karena didukung tenaga terampil lulusan sekolah kejuruan. Sekitar 80% sekolah menengah di Jerman adalah sekolah kejuruan, 20% sisanya adalah sekolah umum”.

C. TANTANGAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KEJURUAN

Tantangan dalam penyelenggaraan pendidikan kejuruan, khususnya SMK menghadapi era masyarakat ekonomi Asean (MEA) antara lain:

1. Pengangguran lulusan pendidikan menengah kejuruan masing-masing lebih tinggi dibandingkan dengan pendidikan menengah umum dan pendidikan tinggi umum. Hal ini terjadi baik di pedesaan maupun di perkotaan dan baik perempuan maupun laki-laki.

- Pengangguran lulusan SMK jauh lebih tinggi dibanding SMA (SMK 12,65 persen, SMA 10,32 persen), (Statistik Ketenagakerjaan BPS, Agustus 2015).
2. Satu-satunya perlindungan kesempatan kerja bagi lulusan SMK adalah kepemilikan sertifikasi profesi untuk masing-masing butir keterampilan yang berlaku secara internasional. Pemberian sertifikat profesi diberikan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP). Biaya untuk memiliki sertifikasi profesi untuk masing-masing butir keterampilan dari LSP sangat mahal, mencapai Rp 600.000 per jenis keterampilan (bukan perjurusan). Untuk mengatasi tingginya biaya itu beberapa SMK telah ditunjuk sebagai LSI, namun kemampuan LSI-SMK ini masih terbatas.
 3. Masih lemahnya implementasi kurikulum, Penjurusan pada Spektrum SMK menjadi 128 bidang keahlian. Pembagian spektrum keahlian tersebut mempunyai 2 kelemahan yang akan menghasilkan lulusan yang tidak sesuai dengan kebutuhan pasar kerja. Kelemahan pertama, pembagian bidang-bidang keahlian menjadi 128 buah ini dianggap terlalu rinci. Kelemahan kedua, penjurusan menjadi 128 buah tersebut berlaku sama untuk seluruh Indonesia. Kelemahan tersebut terungkap dari dua kegiatan yang ditemukan pada jarak waktu 16 tahun. (i) Studi klasik Puslit (Puslit Dikbud, 1995 s.d. 1998) mengindikasikan penyeragaman jurusan SMK di seluruh Indonesia tidak sesuai dengan kebutuhan dunia kerja lokal. Kebutuhan dunia kerja Indonesia beragam, berbeda antara dunia kerja di kabupaten dan dunia kerja di kota besar. Dunia kerja di kota besar cenderung memerlukan tenaga kerja terlatih yang memiliki jenis keterampilan yang sempit (lebih spesifik) namun mendalam. Dunia kerja di kabupaten cenderung memerlukan tenaga kerja terlatih yang memiliki jenis keterampilan yang lebih luas. (ii) Secara empirik beberapa daerah saat ini mengeluhkan bahwa penjurusan SMK terlalu rinci (kecil-kecil), padahal dunia kerja di kabupaten memerlukan

lulusan SMK dengan sejumlah keterampilan yang diperoleh dari satu bidang keahlian. (Hasil diskusi dengan guru-guru senior SMK di beberapa kabupaten/kota, 2015).

1. Keterbatasan sarana praktik di sekolah (khususnya Bidang Teknologi dan Rekayasa sebagian besar peralatan mesin sudah usang).
2. Keterbatasan biaya operasional, SMK memerlukan biaya besar, terutama untuk praktik. Biaya yang ada cenderung mengandalkan pada dana pemerintah pusat (BOS SMK) dan iuran orang tua. Kontribusi pemda kabupaten/kota rendah, apalagi kontribusi pemda provinsi (Puslitjakdikbud, 2014 dan Puslitjakdikbud, 2015).
3. Kekurangan guru mata pelajaran produktif, guru mapel produktif adalah guru mapel yang sekaligus mampu membimbing siswa melaksanakan praktik di sekolah. Saat ini guru mapel produktif yang ada jumlahnya tidak memadai dan guru-guru tersebut akan segera memasuki masa pensiun. Adapun Pengangkatan guru SMK baru kuotanya sangat kurang dibanding dengan kebutuhan aktual di sekolah. Beberapa guru mapel produktif senior dan manajemen sekolah menilai bahwa pola terbaik adalah merekrut lulusan politeknik yang kemudian dimagangkan untuk mengajar dalam bimbingan guru mapel produktif senior. Pola ini menghasilkan guru mapel produktif yang lebih berkompeten dibanding dengan merekrut lulusan LPTK yang dimagangkan untuk mengajar dalam bimbingan guru mata pelajaran produktif.

D. PENDIDIKAN KEJURUAN DI INDONESIA

Secara historis, pendidikan kejuruan di Indonesia merupakan warisan pendidikan teknik pada zaman penjajahan Belanda. Menurut Oejeng Soewargama dikutip oleh (Supriyadi, D., 2011) pendidikan kejuruan yang berkembang di Indonesia merupakan pendidikan kejuruan yang di Negeri Belanda yang disebut "*Beroesonder-wijs*" yaitu pendidikan yang

diselenggarakan di sekolah oleh pemerintah. Adapun di Indonesia pendidikan kejuruan telah disesuaikan dengan kebutuhan Indonesia yaitu "*Beroeps-und Fachschule*" dan di Inggris disebut "*Vocational Education*". Pendidikan kejuruan atau pendidikan vokasi merupakan kelanjutan tradisi swasta yang tergabung dalam perhimpunan para pengusaha yang disebut dengan "*Bedrijfsgoeven*" (Belanda), "*Traders Union*" (Inggris) dan "*Wirihschajtgruppen*" (Jerman).

Penguatan penyelenggaraan pendidikan SMK masih terus diupayakan dengan memperkuat pendidikan sistem ganda (*link and match*) sebagai pola penyelenggaraan pendidikan di sekolah (SMK) dan penyelenggaraan pendidikan di luar sekolah (di dunia usaha/dunia kerja). Permasalahan adalah bagaimana penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan vokasi ke depan pasca disahkan struktur Ortala Kemendikbud (Permendikbud No. 45 Tahun 2019), khususnya terhadap kedudukan Ditjen Pendidikan Vokasi.

Terdapat perbedaan terminologi pendidikan kejuruan dan pendidikan vokasi di Indonesia. Menurut Pasal 15 Undang - Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003, pendidikan kejuruan merupakan pendidikan menengah yang mempersiapkan peserta didik terutama untuk bekerja dalam bidang tertentu, sedangkan pendidikan vokasi merupakan pendidikan tinggi yang mempersiapkan peserta didik untuk memiliki pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu setara dengan program sarjana (Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2012).

Dengan demikian, pendidikan kejuruan merupakan penyelenggaraan jalur pendidikan formal yang dilaksanakan pada jenjang pendidikan tingkat menengah, yaitu pendidikan menengah kejuruan yang berbentuk sekolah menengah kejuruan (SMK). Pendidikan kejuruan dan pendidikan vokasi merupakan penyelenggaraan program pendidikan yang terkait erat dengan ketenagakerjaan. Jenjang pendidikan formal yang berlaku dikenal pendidikan kejuruan tingkat sekolah menengah (SMK) yang dikelompokkan dalam 6 program keahlian 24 bidang keahlian dan 142 kompetensi keahlian. (Spektrum K13 SMK). Pendidikan vokasi merupakan penyelenggaraan jalur

pendidikan formal yang diselenggarakan pada pendidikan tinggi, seperti: politeknik, program diploma, atau sejenisnya.

Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi secara operasional Pendidikan Akademik merupakan Pendidikan Tinggi program sarjana dan/atau program pascasarjana yang diarahkan pada penguasaan dan pengembangan cabang ilmu pengetahuan dan teknologi” (Pasal 115 ayat 1). Pendidikan Vokasi merupakan bagian dalam Pendidikan Tinggi program diploma yang menyiapkan mahasiswa untuk pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu sampai program sarjana terapan (Pasal 16 ayat 1). Selanjutnya, penjelasan pasal 16 ayat (1) berbunyi: Yang dimaksud dengan “pendidikan vokasi” adalah pendidikan yang menyiapkan mahasiswa menjadi profesional dengan keterampilan/kemampuan kerja tinggi. Pasal 21 ayat 2 berbunyi: Program diploma sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyiapkan mahasiswa menjadi praktisi yang terampil untuk memasuki dunia kerja sesuai dengan bidang keahliannya.

Dengan demikian, pendidikan vokasi merupakan pendidikan dengan penekanan pada keahlian praktikal yang dibutuhkan langsung oleh dunia kerja. Dalam dokumen Universitas Gadjah Mada (UGM), Pendidikan Vokasi adalah salah satu pilar pendidikan yang tertera dalam amanah UU Nomor 12 tahun 2012 di samping pendidikan akademik dan profesi.

Di negara-negara maju seperti Jerman, Jepang, Belanda, Swiss, China, dan lainnya, pendidikan kejuruan (vokasi) bersinergi dengan industri dan menjadi kunci kemajuan bangsa sehingga negara-negara tersebut menjadi maju dan memimpin dunia. Pendidikan Vokasi lebih mengedepankan keterampilan yang terlatih agar anak bangsa menguasai keterampilan dengan dilandasi kemampuan berfikir untuk menyongsong keunggulan Indonesia dalam kompetisi global. Pembelajaran pendidikan vokasi di UGM mengarahkan peserta didik untuk memiliki keterampilan/keahlian pada bidang spesifik, sehingga menitikberatkan pada kegiatan Praktik 60 – 70% dan teori 30 – 40%. Proses pembelajaran praktik dengan berbasis lab. lapangan, *workshop*, studio, dan studi kasus membentuk mahasiswa Sekolah

Vokasi UGM sebagai *problem solver*. Itu penjelasan tentang pendidikan vokasi di UGM. Meskipun demikian adalah memungkinkan menerapkan proporsi dan proses pembelajaran praktik di perguruan tinggi tersebut untuk siswa pendidikan vokasi tingkat pendidikan menengah/SMK.

Pendidikan akademik bertujuan melahirkan akademisi yang bertugas menguasai dan mengembangkan ilmu pengetahuan. Pendidikan akademik bertujuan melahirkan guru, dosen, ilmuwan dan peneliti yang tangguh. Oleh karena itu sistem pembelajaran dalam pendidikan akademik lebih menekankan pada penguasaan teori-teori ilmu pengetahuan. Mahasiswa akan mendapat pembelajaran teori yang lebih dominan. Sementara itu, pendidikan vokasi bertujuan untuk melahirkan tenaga ahli, profesional dan praktisi yang siap masuk ke dunia usaha maupun dunia industri (DU/DI).

Penyelenggaraan pendidikan vokasi di beberapa negara menjadi pendidikan favorit bagi para warga negaranya. Contoh di China, pada tahun 2014 siswa vokasinya meningkat signifikan menjadi 120.000 siswa. Lebih rinci lagi, persentase siswa yang memilih pendidikan vokasi dari berbagai Negara sebagai berikut: (1) 78% Austria, (2) 70% Jerman, (3) 66% Swiss, (4) 65% Singapura, dan (5) 12% Indonesia. Sementara itu, di China terdapat 60% Sekolah Vokasi dan 40% sekolah akademik. Angka tersebut mengindikasikan bahwa pendidikan vokasi menjadi bagian dari strategi pembangunan negara China yang berhasil mencapai kemajuan pesat dalam beberapa dekade ini (Nugroho, 2018).

E. URGENSI PENDIDIKAN KEJURUAN

Data Badan Pusat Statistik (2017) memperlihatkan bahwa Indonesia masih kekurangan tenaga kerja terampil, karena sebanyak 66 % tenaga kerja Indonesia berpendidikan SMP, SD, dan SD ke bawah. Padahal untuk menjadi negara maju, Indonesia kekurangan tenaga terlatih bersertifikat sebanyak 58 juta, artinya pendidikan vokasi sangat dibutuhkan dalam upaya menghasilkan tenaga kerja terampil dan terlatih.

Salah satu upaya yang dilakukan Kemenristekdikti sebagai wakil Pemerintah adalah memperbaiki struktur tenaga kerja melalui penentuan arah pengembangan pendidikan tinggi vokasi, yakni:

1. selaras dengan program pengembangan ekonomi nasional;
2. menghasilkan lulusan yang mampu merespon dinamika kebutuhan pasar kerja; dan
3. mampu menghasilkan karya nyata yang berkontribusi ekonomis.

Upaya Pemerintah lainnya dalam meningkatkan kualitas SDM melalui pendidikan vokasi adalah melakukan revitalisasi pendidikan vokasi agar mereka mampu bersaing di tingkat global. Selain itu, upaya meningkatkan struktur tenaga kerja melalui pendidikan vokasi dilakukan melalui peningkatan sarana dan prasarana, pembentukan *teaching factory*, akreditasi, sertifikasi, dan sistem perbaikan kerja lapangan, pemagangan serta kemitraan dengan industri.

Menurut analisis penulis, begitu banyak permasalahan pendidikan kejuruan di Indonesia, dan sepertinya tidak ada habisnya. Belum tuntas permasalahan sebelumnya, sudah muncul lagi permasalahan yang baru.

1. Indonesia kekurangan tenaga kerja terampil dan terlatih (bersertifikat) sebanyak 58 juta sertifikat. Hambatan sertifikasi adalah i) kurangnya pemahaman pencari kerja, tenaga kerja, pengusaha dan dunia pendidikan tentang pentingnya sertifikasi. Sertifikat kompetensi dapat dijadikan pertimbangan penerimaan tenaga kerja, upah dan kesejahteraan tenaga kerja; ii) masih terbatasnya keberadaan lembaga sertifikasi (di DIY) untuk profesi tertentu; dan iii) memerlukan biaya yang besar. Hal ini diduga kuat yang memberatkan pelaksanaan secara mandiri oleh pencari kerja maupun tenaga kerja dan instruktur.
2. Pendidikan vokasi belum bersinergi secara kuat dengan DU/DI. Beberapa SMK sudah menjalin kerja sama yang erat dengan DU/DI, namun sebagian besar SMK belum ada. Usulannya: sebagai berikut: i) perlu ada perubahan kebijakan pendidikan vokasi; ii) Perlu ada

penghubung antara dunia pendidikan dan DU/DI; iii) Perlu penentu arah kebijakan pendidikan vokasi (misalnya Komite Vokasi, seperti di negara-negara maju).

Indonesia baru akan memulai mengubah kebijakan pendidikan vokasi secara lebih mendasar dengan dibentuknya Ditjen Vokasi yang membina SMK, pendidikan dan pelatihan, kursus, dan vokasi di perguruan tinggi.

Dengan dibentuknya Ditjen Vokasi diharapkan sinergi yang kuat antara lembaga pendidikan vokasi dengan dunia usaha dapat diwujudkan. Untuk SMK sebetulnya Dit. PSMK sudah memfasilitasi terbentuknya kerja sama SMK dengan DU/DI, namun lagi-lagi baru menyentuh sebagian kecil jumlah SMK. Penghubung DU/DI dengan dunia pendidikan sebetulnya sudah ada, di antaranya Dit. PSMK penentu arah kebijakan pendidikan vokasi memang tidak ada saat ini. Beberapa puluh tahun yang lalu pernah dibentuk lembaga semacam itu yang berada di level nasional, provinsi, kabupaten, dan seterusnya, namun kemudian ditiadakan.

3. Pendidikan vokasi belum menitikberatkan pada penguasaan *skill*, *entrepreneurship*, dan *Information and Communication Technologies* (ICT). Padahal penguasaan *skill*, *entrepreneurship* dan ICT begitu penting di era saat ini. Spektrum yang menunjukkan pengelompokan konsentrasi berulang kali direvisi, namun cenderung mengarah pada pengelompokan yang sangat spesifik, sehingga mengurangi keluwesan penguasaan skill lulusannya (Dit. SMK). Kurikulum masih menonjolkan mata pelajaran bidang keahlian dan program keahlian sehingga siswa kurang fokus dalam upaya menguasai *skill*, ditambah lagi dengan berbagai permasalahan dalam proses pembelajaran di antaranya keterbatasan sarana dan prasarana pendidikan yang belum dapat diatasi karena upaya mewujudkan kerja sama dengan DU/DI agar dapat memanfaatkan peralatan di DU/DI belum dapat dilakukan dengan baik.

Terkait dengan *entrepreneurship* (kewirausahaan). Mata pelajaran ini sudah ada sejak lama, dan selalu dibenahi. Dit. PSMK juga sudah mendanai banyak SMK yang merintis pengelolaan kewirausahaan. Lagi-lagi tampaknya belum memperlihatkan hasil yang menggembirakan, karena hanya melibatkan sedikit SMK.

Beberapa contoh sistem pendidikan kejuruan (vokasi) di negara maju sebagai berikut.

1. Pendidikan Kejuruan (Vokasi) di Jerman.

Sistem pendidikan di Jerman menerapkan sistem pendidikan ganda yaitu menggabungkan pelatihan kejuruan di sekolah dengan magang di sebuah perusahaan hingga tiga tahun. Sistem ini akan efektif dalam membantu kaum muda berintegrasi ke dalam industri nyata. perusahaan-perusahaan Jerman sebenarnya membayar para peserta pelatihan untuk dilatih. Untuk satu perusahaan, mereka membayar sebanyak € 70.000 euro untuk pelajar yang magang di perusahaan mereka. Mereka merasa bahwa sangat penting untuk mengembangkan ekosistem efektif untuk mendukung anak magang sehingga dapat berhasil dalam perusahaan, sebaliknya perusahaan juga akan terus tumbuh.

Pemerintah melalui Kementerian Perindustrian saat ini mendorong pendidikan vokasi dengan melatih angkatan kerja, salah satunya dengan melibatkan profesional dari negara maju untuk mendidik tenaga pelatih Indonesia di bidang vokasi. Pelatihan diimplementasikan melalui Kegiatan Pelatihan Senior dan Master Trainer sebagai wujud kolaborasi antara Kemenperin dengan *Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit* (GIZ), Perkumpulan Ekonomi Indonesia-Jerman (Ekonid), Industrie und Handelskammer (IHK) Trier, Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin), Lembaga Diklat Edukadin Jawa Tengah, serta Badan Kerja Sama Pembangunan (BKSP) Jawa Timur. Diharapkan setelah mengikuti pelatihan dapat mengimplementasikan pengetahuan dan keterampilan yang diperolehnya sekaligus melakukan multiplikasi kepada rekan-rekan kerja di perusahaan. Selain itu, dapat menyiapkan pelatihan yang menciptakan

instruktur bagi siswa SMK yang melakukan praktik kerja maupun guru-guru SMK yang melakukan kegiatan magang industri. Guna mewujudkan pembangunan SDM industri yang kompeten, saat ini pihaknya telah menetapkan enam langkah strategis. i) pengembangan pendidikan vokasi industri menuju dual sistem model Jerman. ii), pembangunan politeknik dan akademi komunitas di kawasan industri atau kawasan pusat pertumbuhan industri dan wilayah pusat pertumbuhan industri. iii) penyelenggaraan pendidikan vokasi yang *link and match* antara Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dengan industri. Hingga saat ini, kami telah memfasilitasi kerjasama 2.612 SMK dengan 855 perusahaan industri yang membentuk 4.997 kerja sama,” ujarnya, iv) pihaknya rutin menggelar Diklat 3 in 1 (pelatihan, sertifikasi, dan penempatan kerja), v) pembangunan infrastruktur kompetensi dan sertifikasi kompetensi tenaga kerja industri. vi) pengembangan SDM industri 4.0. Salah satunya melalui pembangunan Pusat Inovasi Digital Indonesia (PIDI) 4.0.

2. Pendidikan Kejuruan (Vokasi) di Swiss

Pendidikan vokasi di negara Swiss telah berkembang maju. Sebanyak 70% lulusan jenjang SMA sederajat negara ini melanjutkan ke pendidikan vokasi. Hal ini bertolak belakang dengan Indonesia yang lebih banyak melanjutkan pendidikan tinggi ke universitas. “Di Swiss, para CEO dan pengusaha besar berasal dari lulusan pendidikan vokasi. Menurut Muliaman, menjadi penting untuk membangun ekosistem yang lebih komplit dan kuat seperti yang terjadi di Swiss. Muliaman berharap, kualitas dan produktivitas SDM tidak menjadi *missing link* dalam proses pembangunan ekonomi Indonesia.

Chairman of Swiss Federal Institute for Vocational Education & Training (SFIVET), Gnaegi Philippe, mengatakan, hadirnya negara bersama sektor privat akan menghasilkan sistem pendidikan vokasi yang efektif, sesuai dengan kebutuhan pasar tenaga kerja, saat ini Swiss menjadi mitra penting merevitalisasi pendidikan vokasi di Indonesia karena penerapan *dual*

vocational education and training yang mereka terapkan mampu menghasilkan pekerja usia muda yang produktif sekaligus kompetitif. Hal itu tercermin dari angka pengangguran pekerja muda yang kecil dan peringkat tertinggi yang mampu dicapai negara ini dalam *Global Competitiveness Index* lansiran *World Economic Forum*.

3. Pendidikan Kejuruan (Vokasi) di Belanda

Bentuk sistem pendidikan Belanda ialah sentralisasi. Tanggung jawab pemerintah pusat terletak pada hal-hal yang berhubungan dengan organisasi, pendanaan (termasuk status hukum kepegawaian), inspeksi, ujian, dan inovasi promosi. Namun demikian sekolah diberikan otonomi untuk mengelola lembaganya. Sekolah bertanggung jawab penuh atas organisasi belajar mengajar, personil dan bahan. Anggaran tahunan diterima sebagai dana *block grand*. Sekolah bebas untuk memutuskan bagaimana anggaran dihabiskan dan bertanggung jawab atas kualitas pendidikan.

Pendidikan menengah kejuruan tingkat pertama (VBO) menyelenggarakan pendidikan selama 4 tahun sebagai pendidikan pra vokasional. Program singkat MBO (2-3 tahun) dirancang bagi tamatan VBO dan MAVO (dengan sertifikat) yang tidak mendapatkan pendidikan yang cocok di MBO atau pada program pemagangan. Pelajaran disini memberikan kesempatan latihan kepada anak-anak usia 16 tahun ke atas untuk jabatan-jabatan atau pekerjaan junior. Pada pendidikan ini, kerja praktek, baik di dalam maupun diluar sekolah, merupakan elemen penting. Pendidikan ini memiliki beberapa jurusan, yakni ekonomi, teknik, kesehatan, perawatan diri, kesejahteraan dan pertanian. Program MBO diberikan dalam 4 tingkatan (1-4 tahun) dan hanya lulusan dari tingkatan 4 MBO saja yang bisa memiliki akses ke HBO (*Hogeschool*).

4. Pendidikan kejuruan (vokasi) di Taiwan

Pendidikan kejuruan (vokasi) di Taiwan memiliki tiga kunci pembangunan pendidikan vokasi, yaitu dukungan pemerintah, sistem

edukasi yang terstandar dan sesuai dengan kebutuhan industri, serta jurusan yang lebih menekankan kepada iptek dan teknologi. Sistem edukasi di sekolah sudah mengajak siswa untuk berpikir tentang rencana hidup mereka di tingkat SMP, sehingga tingkat pendaftaran sekolah vokasi di Taiwan cukup tinggi, karena anak-anak muda paham minat dan tujuan hidup mereka. Pemerintah juga memberikan dukungan dalam bentuk pendanaan, evaluasi kurikulum setiap 4 tahun sekali, pengembangan inkubasi bisnis, pusat-pusat vokasi regional, serta para pengajar yang mumpuni.

Pendidikan kejuruan (vokasi) di Indonesia harus didukung penuh oleh kerja sama industri, pemerintah, dan akademisi. Seperti yang sudah dilakukan di negara tetangga, Taiwan. Seperti yang disampaikan oleh Dekan Humanities & Applied Science, National Yunlin University of Science Technology, Mingchang Wu keunggulan program pendidikan vokasi di Taiwan ada pada program dan sistem yang komprehensif. Selain itu program yang adaptif dan memiliki banyak pilihan, serta kerja sama antara industri dan akademik.

Senada dengan Wu, Direktur Program Vokasi UI menyatakan, akan ada upaya revitalisasi dan penguatan mutu pendidikan vokasi di seluruh Indonesia guna menunjang program pemerintah dan peningkatan efisiensi dunia usaha dan/atau dunia industri. Salah satunya program pendidikan vokasi UI yang merupakan pendidikan tinggi kejuruan diploma (D3 dan D4) di mana lulusannya diarahkan untuk menguasai kemampuan dalam bidang kerja tertentu sebagai tenaga kerja di industri, lembaga pemerintahan atau swasta atau berwiraswasta. Program studi ini hanya dikembangkan untuk mengisi tenaga terampil pada bidang-bidang tertentu maupun lintas bidang studi sehingga lulusannya akan memiliki jalur karir yang spesifik dan hanya dapat diisi oleh para lulusan program vokasi.

China yang tengah mereformasi pendidikan vokasi, di antaranya dengan memfungsikan *National Vocational Education Steering Committee* dinilai dapat menjadi referensi bagi Indonesia. Dalam kesempatan itu, Menteri Riset,

Teknologi, dan Pendidikan Tinggi M Nasir yang hadir membuka seminar mengemukakan, revitalisasi akan terfokus pada lembaga pendidikan vokasi yang telah ada berikut pembenahan kurikulum, fasilitas dan infrastruktur serta kualitas tenaga pendidik. “Sehingga para lulusan pendidikan tinggi vokasi tidak saja memegang ijazah, namun memiliki pula sertifikat kompetensi. Hal senada diutarakan Wakil Ketua Yayasan Prasetya Mulya, G Sulistiyanto. Menurutnya, pihaknya menyambut baik kebijakan pemerintah memberlakukan *super tax deductible* atau insentif fiskal dalam bentuk keringanan pajak bagi industri yang berinvestasi pada pendidikan vokasi, serta aktivitas penelitian dan pengembangan.

5. Pendidikan Kejuruan (Vokasi) di Singapura

Pendidikan kejuruan di Singapura hampir memiliki kesamaan dengan Indonesia. Jika di Indonesia SMK setingkat dengan SMA, sedangkan di Singapura (*Institute Of Technical Education*) ITE sama halnya dengan SMK dengan lama belajar di ITE dua hingga empat tahun, ITE disebut sebagai Model *Vocational and Technical Education System*. Sistem pendidikan di Singapura menerapkan pembelajaran secara holistik, siswa tidak hanya diajarkan memiliki keahlian, namun juga melakukan aktivitas yang mengandalkan otak dan juga hati. Sehingga siswa memiliki pengetahuan yang baik dan lulusan yang siap terjun ke dunia kerja, kehidupan, dan juga dunia global. Komposisi metode pembelajaran sebanyak 60% praktek, 40% teori, serta magang di DU/DI selama 6 bulan.

Terkait dengan kerja sama, Presiden Singapura, Halimah Yacob, mengungkapkan saat kunjungan kerja ke Frankfurt menyatakan akan mengadopsi sistem pendidikan ganda yang sudah dilakukan oleh negara Jerman. Sistem pendidikan Jerman adalah sesuatu yang dapat dipelajari Singapura dalam menciptakan jalur karir bagi generasi muda. Saat ini Singapura sedang menyiapkan 12 persen dari setiap kelompok siswa untuk menjalani “jalur studi kerja” di 2030 mendatang, sebagai bagian dari adopsi sistem pendidikan vokasi Jerman di negara tersebut.

F. BENCHMARKING PENDIDIKAN KEJURUAN

Fakta empiris menunjukkan bahwa negara-negara maju antara lain seperti Jerman, Cina, Jepang, Korea Selatan, dan Austria, dan sebagainya memiliki sistem pendidikan vokasi yang baik, di mana pola penyelenggaraan pendidikan vokasi dirancang tidak sekadar *link and match*, namun lebih dari itu, pihak industri mempermudah peserta didik vokasi untuk praktik industri untuk meningkatkan kompetensi keahlian sesuai dengan bidang yang dipelajari dan sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan dunia kerja (Wicaksono, A.P., 2018).

Sebagai “*benchmarking*” pendidikan vokasi di Indonesia di mana negara tersebut yang notabene 78 persen perguruan tingginya merupakan pendidikan vokasi. Di era global, tiba saatnya Indonesia untuk mengadopsi pola penyelenggaraan pendidikan vokasi yang efektif, efisien, produktif, dan tepat guna.

Secara operasional penyelenggaraan pendidikan vokasi dalam pembelajaran lebih berorientasi pada keahlian kompetensi praktikal sekurang-kurangnya dengan komposisi 60 persen praktik dan 40 persen teori. Secara fleksibel juga harus menyesuaikan dengan tren kebutuhan industri agar setelah lulus peserta didik telah memiliki keahlian yang benar-benar kompeten. Dengan demikian, keterlibatan dunia Usaha/Dunia Industri merupakan suatu keniscayaan dalam penyelenggaraan pendidikan vokasi. Dengan mempertimbangkan kondisi di negara maju tersebut, kemitraan sejalan dengan tugas khusus Kemendikbud dalam Inpres No 9/2016, di mana kerja industri merupakan kunci sukses bagi pendidikan tinggi vokasi. Hal ini sesuai dengan keenam tugas khusus Kemendikbud dalam Inpres No 9/2016.

Mengacu pada pola pendekatan pendidikan kejuruan (vokasi) *dual system education*, bertujuan untuk memberi dorongan bagi berkembangnya dunia industri karena tersedianya tenaga terampil dan terlatih sesuai desain pertumbuhan industri. Hal ini akan berdampak pada dorongan perkembangan ekonomi guna menghadapi persaingan global. Indonesia

pada tahun 2030 diperkirakan akan memerlukan 17 juta tenaga kerja vokasi jika benar-benar menginginkan menjadi kekuatan ekonomi dunia.

Secara historis, sewaktu Mendikbud dijabat oleh Wardiman Djojonegoro filosofi *link and match* dari Jerman telah diadopsi dan diimplementasi di kalangan pendidikan kejuruan di Indonesia yang dikenal dengan pendidikan sistem ganda (*dual system*). Dalam upaya meningkatkan kualitas SDM Indonesia yang berkualitas filosofi *link and match* pendidikan kejuruan (vokasi) diperkuat melalui Inpres No. 9 Tahun 2016. Dengan demikian, Indonesia telah dan sedang berlanjut dalam mengadopsi dan memodifikasi sistem pendidikan kejuruan (vokasi) model di Jerman. Berikut komponen pendidikan kejuruan (vokasi) di negara Jerman (Ramli, 2013).

1. Sistem Ganda (*dual system*)

Sistem Ganda sebagai suatu bentuk yang dominan pada Pendidikan dan Pelatihan Kejuruan di Jerman telah dikenal luas di dunia. Sistem ini sudah secara tradisional sejak 700 tahun yang lalu dan berakar pada permulaan abad pertengahan. Seiring perjalanan waktu, sistem ini telah berkembang secara mantap dan membawa perubahan pada masyarakat, ekonomi, dan teknologi tanpa kehilangan identitas sebagai suatu bentuk pelatihan yang paling sesuai dengan ekonomi dan pasar kerja.

Hampir separuh dari jumlah lulusan sekolah menjalani pendidikan kejuruan dalam salah satu di antara ke-350 pekerjaan didikan yang diakui negara dalam sistem ganda tersebut. Proses memasuki dunia kerja ini berbeda dengan pendidikan kejuruan yang hanya berlangsung di sekolah, seperti yang masih berlaku di banyak negara, di mana bagian praktek dipelajari selama tiga sampai empat hari seminggu di perusahaan disusul oleh pelajaran teori di sekolah kejuruan selama satu atau dua hari per minggu.

Pendidikan magang seperti itu berlangsung selama dua sampai tiga setengah tahun. Pendidikan intraperusahaan dilengkapi lagi dengan kursus *ekstern* dan kesempatan kualifikasi tambahan yang disediakan di luar.

Pendidikan kerja dibiayai oleh perusahaan yang membayar imbalan kepada magangnya, dan oleh negara yang membiayai sekolah kejuruan.

Pendidikan vokasi (*dual training*) di Jerman didesain untuk memberikan ilmu secara teori maupun praktik bagi siswanya. Ketika belajar di sekolah vokasi, 75% waktu siswa digunakan untuk bekerja di industri, sedangkan sisanya mereka belajar teori di sekolah. Nantinya setelah siswa mengikuti pendidikan vokasi di sekolah dan bekerja pada sebuah industri, mereka akan mendapatkan sertifikat dari asosiasi industri (*chamber*) yang dapat digunakan untuk melamar pekerjaan.

Kurikulum yang dirancang pada pendidikan vokasi di Jerman adalah berorientasi pada penggabungan antara *instruction* dan *construction*, sehingga pendekatan utama dalam membentuk tahapan pembelajaran yang mengacu pada fase pembelajaran di sekolah maupun praktik di industri dan berorientasi pada hasil proses pembelajaran yang diinginkan.

Dalam melaksanakan pengembangan pendidikan kejuruan mereka mempunyai lima kunci sukses,

“The success of German vocational education and training is based on five characteristics which also represent added value for development of VET system in others countries” yaitu: 1) *Cooperation of government and industry*, 2) *Learning within the work process*, 3) *Acceptance of national standards*, 4) *Qualified vocational education and training staff*, 5) *Institutionalized research and career guidance.*”

Memang, vokasi sistem ganda terbukti membuat pasar kerja Jerman efisien sekaligus menjadi salah satu penopang perekonomiannya. Tingkat pengangguran di Jerman pun terendah pada 2016, yakni 4,1 persen. Kompetensi tenaga kerja lah yang membuat Jerman masuk empat besar negara kaya dengan nilai produk domestik bruto (PDB) tahun 2016 sebesar 3,46 triliun dollar AS (Rp 46,74 kuadriliun). Keberhasilan investasi modal manusia pula yang membawa Jerman menduduki peringkat ke-6 dari 130 negara dalam Indeks Modal Manusia 2017 Forum Ekonomi Dunia (WEF).

2. Tujuan pendidikan Sistem Ganda

Tujuan utama pendidikan Sistem Ganda adalah untuk menjamin secara berkelanjutan keterserapan tenaga kerja pada pasar kerja tertentu sesuai perkembangan teknologi dan kebutuhan individu. Untuk memenuhi permintaan ini pendidikan dan pelatihan harus mengembangkan kualifikasi perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan hasil kinerja secara independen. Hal ini memerlukan pengembangan dan kombinasi fungsional, ekstra fungsional, dan kualifikasi sosial.

3. Struktur Sistem Ganda

Struktur Sistem Ganda di Jerman dibatasi pada empat aspek, yaitu pemilahan tanggung jawab untuk pendidikan/pengajaran teori dan pelatihan praktik, pembagian waktu pelaksanaan pendidikan dan pelatihan, pengorganisasi pendidikan dan pelatihan serta konsentrasi pada mata pelajaran utama dalam pembelajaran teori.

4. Pembelajaran Teori

Pembelajaran teori yang diperlukan suatu bidang pekerjaan dilaksanakan di sekolah. Sekolah bekerja dengan kurikulum/silabus yang hanya berlaku di suatu negara bagian tertentu. Silabi tersebut berdasar pada masing-masing bidang kejuruan yang dikembangkan di bawah tanggung jawab sebuah lembaga permanen yang beranggotakan Menteri Kebudayaan dari 16 negara bagian yang disebut *Kultus inisterium Konferenz* (KMK). Pembelajaran teori di sekolah mencakup juga pembelajaran praktik yang diperlukan untuk memahami suatu teori tertentu. Monitoring pelaksanaan pembelajaran teori dilakukan oleh masing-masing negara bagian.

5. Pelatihan Praktik

Seluruh kegiatan pelatihan praktik dilaksanakan di perusahaan sesuai dengan bidang kerja yang harus dipelajari. Pelatihan juga meliputi teori-teori yang dibutuhkan untuk memahami suatu kegiatan praktik dan untuk

bekerja secara profesional. Misalnya Matematika, Fisika, Kimia atau Biologi tidak diajarkan sebagai satu mata pelajaran khusus, tetapi *include* dalam pelatihan praktik kejuruan. Perusahaan bertanggung jawab untuk seluruh proses kegiatan pelatihan.

6. Pembagian Waktu

Pendidikan dan pelatihan kejuruan umumnya berlangsung antara 3 sampai 3,5 tahun. Sekolah dan perusahaan mempunyai tanggung jawab dan bekerjasama untuk melaksanakan pendidikan dan pelatihan kejuruan yang berkualitas. Mereka membagi waktu pendidikan dan pelatihan sedemikian rupa sehingga peserta diklat (*Auszubildender in/Lehrlinger in*) memperoleh 3 - 4 hari praktik di perusahaan dan 1 - 2 hari belajar di sekolah atau 3 - 4 minggu di perusahaan dan 1 - 2 minggu di sekolah. Pada pertengahan pelaksanaan diklat, biasanya pada akhir tahun kedua, peserta diklat harus menempuh ujian pertengahan (*Zwischenprüfung*). Ujian ini tidak menyebabkan pembatasan ataupun keuntungan. Ujian ini hanya dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada sekolah, perusahaan dan peserta diklat itu sendiri tentang level kemampuan yang telah dicapainya. Setelah menempuh ujian akhir (*Abschlußprüfung*) dan dinyatakan lulus, peserta diklat mendapat surat keterangan sebagai tenaga terampil pada bidang tertentu.

7. Pengorganisasian Diklat

Pada tahun pertama diklat 1) *Ausbildungsjahr* adalah pengorganisasian bentuk dari diklat dasar, 2) *Ausbildungsjahr* adalah tahap spesialisasi pertama, 3) *Ausbildungsjahr* dan 4) *Ausbildungsjahr*) difokuskan pada spesialisasi keterampilan khusus dari suatu bidang kerja dan yang secara khusus diperlukan oleh tempat kerja.

8. Konsentrasi pada Mata Pelajaran Utama Teori

Semua mata pelajaran dirancang untuk mendukung pembelajaran

kejuruan utama. Isi dan tujuan pembelajaran yang merupakan bagian dari bidang kejuruan yang sesuai harus dipilih untuk pengembangan/ perluasan semaksimal mungkin. Seluruh tujuan diklat berorientasi pada aktivitas dan kekhususan bidang kejuruan, baik dalam hal isi maupun pelaksanaannya.

9. Kelompok Sekolah Menengah Kejuruan di Jerman

Terdapat 2 (dua) kelompok sekolah menengah kejuruan di Jerman

- a. *Vollzeit*, berarti waktu penuh belajar di sekolah (tidak menerapkan *dual system*), artinya proses belajar siswa berlangsung di sekolah selama 6 hari dalam seminggu,
- b. *Teilzeit*, Sekolah kejuruan yang separuh waktu belajar di sekolah dan separuh waktu lagi bekerja di Industri. Sekolah kejuruan ini yang dinamakan “*Duale Ausbildung*”, di kalangan internasional disebut sebagai “*dual system*”. Pendidikan dan pelatihan kejuruan berlangsung antara 3 sampai 3,5 tahun.

10. Manajemen Pendidikan

Konstitusi Federal telah menetapkan wewenang *Länder* atas pendidikan, maka beberapa *Länder* membuat beberapa ketentuan dalam konstitusi mereka masing-masing mengenai pengaturan masalah-masalah pendidikan, dan seluruhnya melalui proses legislatif. Pengaturan itu mencakup penetapan tujuan pendidikan, struktur, isi pengajaran, dan prosedur dalam sistem daerah mereka masing-masing.

11. Pendanaan

Dengan pengecualian pendidikan tinggi, keuangan pendidikan sepenuhnya berada di tangan *Länder* dan masyarakat setempat. Secara umum, seluruh biaya personil ditanggung oleh pemerintah negara bagian, dan infrastruktur oleh masyarakat. Hampir semua program pendidikan (termasuk pembebasan uang kuliah pada pendidikan tinggi) bersifat gratis.

12. Personalia

Guru-guru *Gymnasien* dan sebagian guru-guru spesialis untuk bidang keuangan yang dididik di tingkat universitas, dengan tekanan utama di bidang keahlian di bandingkan dengan bidang keguruan.

13. Kurikulum

Para Menteri pendidikan negara bagian menentukan kurikulum mereka sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan mereka melakukan itu melalui tiga jenis instrumen yaitu, *pertama*, tabel yang menguraikan jumlah jam belajar per minggu, serta mata pelajaran sesuai dengan “*grade*” dan jenis sekolah, *kedua*, pedoman kurikulum, *ketiga*, pemberian wewenang penulisan dan pengadaan buku teks.

14. Ujian, Kenaikan Kelas, dan Sertifikasi

Tes formal pada prinsipnya tidak digunakan untuk menilai keberhasilan anak di sekolah. Pengecualian itu hanya untuk keperluan diagnostik yaitu mengidentifikasi jenis-jenis *dyslexia* (kesulitan belajar membaca dan menulis karena kondisi pada otak).

15. Evaluasi dan penelitian pendidikan

Tidak ada evaluasi nasional yang dilakukan secara teratur mengenai hasil pendidikan. Secara garis besar perbandingan pendidikan vokasi antara Indonesia dan Jerman dapat dilihat dalam tabel sebagaimana berikut.

Tabel 1. Analisis perbandingan pendidikan kejuruan di Jerman dan di Indonesia

No	Permasalahan pendidikan	Perbandingan	
		Jerman	Indonesia
1	Tujuan	Mengembangkan individualitas dan partisipasi dalam kehidupan masyarakat. Menyiapkan lulusan yang berkualitas.	PP No 73 tahun 1991, pasal 3 ayat 6 menyatakan bahwa: "Pendidikan kejuruan merupakan pendidikan yang mempersiapkan warga belajar untuk bekerja dalam bidang tertentu".
2	<i>Dual System</i>	Sistem Pendidikan Ganda berjalan sampai sekarang dan tidak dipengaruhi oleh kebijakan politik.	Sistem Pendidikan Ganda di Indonesia hanya berjalan beberapa tahun, karena sistem politik mempengaruhi kebijakan pendidikan.
4	Kurikulum	Para Menteri pendidikan negara bagian menentukan kurikulum mereka sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Berdasarkan standar nasional disesuaikan dengan perkembangan peserta didik dengan kebutuhan lingkungan pendidikan nasional.
6	Evaluasi	Tidak ada evaluasi nasional yang dilakukan	Evaluasi hasil belajar peserta didik dilakukan oleh pendidik untuk memantau proses, kemajuan, dan perbaikan hasil belajar peserta didik secara berkesinambungan.
7	Pembiayaan	Seluruh biaya personil ditanggung oleh pemerintah negara bagian, dan infrastruktur oleh masyarakat	Sumber pendanaan pendidikan di Indonesia berasal dari APBN, APBD ditanggung bersama antar pusat, daerah dan masyarakat

Sumber: hasil analisis tim studi SMK Pariwisata, 2019

Program Pemerintah Indonesia saat ini, menempatkan SDM sebagai salah satu fokus utama selain infrastruktur. Salah satunya dengan mendorong pendidikan vokasi untuk melatih angkatan kerja melalui Kementerian Perindustrian, dengan melibatkan profesional dari negara maju untuk mendidik tenaga pelatih Indonesia di bidang vokasi. Pendidikan melalui Kegiatan Pelatihan Senior dan *Master Trainer* sebagai wujud kolaborasi antara Kemenperin dengan *Deutsche Gesellschaft fur Internationale Zusammenarbeit* (GIZ), Perkumpulan Ekonomi Indonesia Jerman (Ekonid), *Industrie und Handelskammer* (IHK) Trier, Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin), Lembaga Diklat Edukadin Jawa Tengah, serta Badan Kerja Sama Pembangunan (BKSP) Jawa Timur.

Diharapkan setelah mengikuti pelatihan dapat mengimplementasikan pengetahuan dan keterampilan yang diperolehnya sekaligus melakukan multiplikasi kepada rekan-rekan kerja di perusahaan. Selain itu, dapat menyiapkan pelatihan yang menciptakan instruktur bagi siswa SMK yang melakukan praktik kerja maupun guru-guru SMK yang melakukan kegiatan magang industri. Dalam rangka mewujudkan pembangunan SDM industri yang kompeten, saat ini pihaknya telah menetapkan enam langkah strategis. (i) pengembangan pendidikan vokasi industri menuju *dual system* model Jerman. (ii), pembangunan politeknik dan akademi komunitas di kawasan industri atau kawasan pusat pertumbuhan industri dan wilayah pusat pertumbuhan industri. (iii) penyelenggaraan pendidikan vokasi yang *link and match* antara SMK dengan industri. Hingga saat ini, kami telah memfasilitasi kerjasama 2.612 SMK dengan 855 perusahaan industri yang membentuk 4.997 kerja sama,” ujarnya, (iv) pihaknya rutin menggelar Diklat 3 in 1 (pelatihan, sertifikasi, dan penempatan kerja), (v) pembangunan infrastruktur kompetensi dan sertifikasi kompetensi tenaga kerja industri, dan (vi) pengembangan SDM industri 4.0. Salah satunya melalui pembangunan Pusat Inovasi Digital Indonesia (PIDI) 4.0.

B A B I I I

KURIKULUM SMK PARIWISATA BERBASIS INDUSTRI

A. KURIKULUM SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN

Kurikulum sekolah menengah kejuruan (SMK) yang dikaji yaitu Kurikulum Tahun 2013 (K-13). Pengertian K-13 sebagaimana dikemukakan Mulyasa (2014) adalah kurikulum yang menekankan pada pendidikan karakter, terutama pada tingkat dasar yang akan menjadi fondasi pada tingkat berikutnya. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 1 butir 19, kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu (Undang-Undang No 29 Tahun 2003). Kurikulum 2013 merupakan sebuah kurikulum yang mengutamakan pemahaman, *skill*, dan pendidikan berkarakter, sehingga siswa dituntut untuk mampu memahami bahan ajar (materi) dan menerapkan dalam kehidupan sehari-hari melalui kegiatan proaktif dalam berdiskusi dan melakukan presentasi serta memiliki sopan santun (etika) dan disiplin tinggi. Kurikulum ini menggantikan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) yang diimplementasikan sejak 2006. Dalam Kurikulum 2013, mata pelajaran wajib diikuti oleh seluruh peserta didik pada semua jenis, satuan, dan jenjang pendidikan.

Khusus Struktur Kurikulum SMK dikelompokkan menjadi tiga kelompok mata pelajaran, yakni Kelompok A Nasionalisme, Kelompok B Wawasan Kebangsaan, dan Kelompok C Peminatan Kejuruan. Lebih lanjut, Kelompok C masih dikelompokkan menjadi C1 Dasar Bidang Keahlian, Kelompok C2 Dasar Program Keahlian dan Kelompok C 3 Kompetensi Keahlian

Keselarasan kurikulum SMK dengan kompetensi yang dibutuhkan dunia kerja dalam penelitian ini meliputi keluasan dan kedalaman kompetensi yang diajarkan SMK dengan kompetensi yang dibutuhkan dunia kerja. Isu keluasan mencakup perbedaan jenis-jenis kompetensi yang diperlukan oleh dunia kerja dan jenis kompetensi yang selama ini diajarkan oleh SMK. Isu kedalaman kompetensi mencakup tingkat kompetensi yang diperlukan oleh dunia kerja dan tingkat kedalaman kompetensi yang selama ini dikembangkan di SMK. Keselarasan pembelajaran dengan keluasan dan kedalaman kompetensi yang diharapkan, terdiri atas tiga komponen, yakni keselarasan pada tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, dan tahap penilaian hasil kegiatan belajar mengajar. Dengan kata lain, keselarasan K-13 SMK mengacu pada SKKNI Level II yang telah disepakati oleh Dirjen Dikdasmen dan Ketua BSNP serta Kemenakertrans.

Kurikulum 2013 memiliki karakteristik sebagai berikut (a) Isi atau konten kurikulum yaitu kompetensi yang dinyatakan dalam bentuk Kompetensi Inti (KI) satuan pendidikan dan kelas, dirinci lebih lanjut dalam Kompetensi Dasar (KD) mata pelajaran; (b) Kompetensi Inti (KI) merupakan gambaran secara kategorial mengenai kompetensi dalam aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan (kognitif dan psikomotor) yang harus dipelajari peserta didik untuk suatu jenjang sekolah, kelas dan mata pelajaran; (c) Kompetensi Dasar (KD) merupakan kompetensi yang dipelajari peserta didik SMK/MAK; (d) Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar di jenjang pendidikan menengah diutamakan pada ranah sikap sedangkan pada jenjang pendidikan menengah berimbang antara sikap dan kemampuan intelektual (kemampuan kognitif tinggi); (e) Kompetensi Inti

menjadi unsur organisatoris (*organizing elements*). Kompetensi Dasar yaitu semua KD dan proses pembelajaran dikembangkan untuk mencapai kompetensi dalam Kompetensi Inti; (f) Kompetensi Dasar yang dikembangkan didasarkan pada prinsip akumulatif saling memperkuat (*reinforced*) dan memperkaya (*enriched*) antar mata pelajaran dan jenjang pendidikan (organisasi horizontal dan vertikal) diikat oleh kompetensi inti; (g) Silabus dikembangkan sebagai rancangan belajar untuk satu tema (SD). Dalam silabus tercantum seluruh KD untuk tema atau mata pelajaran di kelas tersebut; dan (h) Rencana Pelaksanaan Pembelajaran dikembangkan dari setiap KD yang untuk mata pelajaran dan kelas tersebut.

Mengacu pada kurikulum SMK Tahun 2013 “kompetensi” dimaknai sebagai kemampuan yang merupakan perpaduan pengetahuan (*knowledge*), sikap (*attitude*), dan keterampilan (*skill*) untuk melakukan sesuatu yang bermakna dalam kehidupan”. Finch & Crunkilton dalam Mulyadi (2014) mengemukakan “kompetensi diartikan sebagai penguasaan terhadap suatu tugas, keterampilan, sikap, dan apresiasi yang diperlukan untuk menunjang keberhasilan”. Pendapat tersebut menunjukkan bahwa kompetensi mencakup tugas, keterampilan, sikap, dan apresiasi yang harus dimiliki oleh peserta didik untuk dapat melaksanakan tugas-tugas yang sesuai dengan jenis pekerjaan tertentu, dengan demikian terdapat hubungan antara tugas-tugas yang dipelajari peserta didik di sekolah dengan kemampuan yang diperlukan oleh dunia usaha atau dunia industri. Kompetensi yang harus dikuasai peserta didik dalam penelitian ini yaitu segala aktivitas yang dilakukan oleh peserta didik yang bertujuan untuk perubahan tingkah laku yang meliputi kemampuan pengetahuan, sikap dan keterampilan.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa kompetensi merupakan perpaduan pengetahuan, keterampilan, nilai, sikap, dan apresiasi sebagai perubahan perilaku yang dihasilkan dari proses belajar untuk dapat melaksanakan tugas-tugas pekerjaan tertentu dengan kemampuan yang diperlukan oleh dunia usaha.

Berdasarkan Perpres Nomor 8 Tahun 2012 tentang Standar Kompetensi

Kerja Nasional Indonesia (SKKNI), kompetensi lebih berorientasi pada kecakapan yang mendukung pada jabatan tertentu, sesuai dengan ketentuan definisi SKKNI yaitu “uraian kemampuan yang mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja minimal yang harus dimiliki seseorang untuk menduduki jabatan tertentu yang berlaku secara nasional”. Dengan demikian definisi kompetensi dari manapun sumbernya akan tetap menunjukkan pada kemampuan dalam melaksanakan tugas/pekerjaan. Kemampuan tersebut digunakan untuk mengatasi berbagai masalah dalam bidang pekerjaan. Kemampuan tersebut mencakup ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik yang diperoleh lulusan SMK.

Kompetensi menjadi hal penting dalam dunia kerja karena adanya anggapan “karakteristik dasar seseorang ada hubungan sebab akibat dengan prestasi kerja yang luar biasa atau dengan efektivitas kerja” (Spencer & Spencer, 1993). Marshal Sashkin dan Kisser (1993) mengemukakan

”Jika seorang lulusan memasuki dunia kerja maka kompetensi yang diharapkan adalah kompetensi yang mampu untuk meningkatkan kinerja perusahaan, dalam hal ini kinerja perusahaan dalam era globalisasi mengacu pada produktivitas untuk dapat memenangkan persaingan”.

Dunia kerja membutuhkan masukan (*input*) berupa orang-orang yang memiliki kemampuan profesional teknis agar mereka tetap dapat menjaga keberlangsungan roda produksinya di tengah persaingan bebas.

Memahami kompetensi yang diharapkan oleh pengguna didasarkan pada penelitian yang dilakukan Waugh, T, Kartasasmita (2004) yang menyebutkan harapan-harapan pengusaha pada lulusan untuk memasuki dunia kerja yaitu: (1) perlu bagi tenaga kerja yang fleksibel, terutama pada pekerja kontrak, paruh waktu, dan pekerja sementara; (2) memiliki spesifikasi keahlian terutama keahlian pada pasar dan spesifikasi pengetahuan; (3) pengalaman yang relevan; (4) keahlian informasi teknologi; (5) keahlian generik (misal visi bisnis, komunikasi, jaringan, negosiasi, kreativitas, dan lain-lain); (6) kemampuan yang memberikan nilai tambah

dan memiliki kinerja untuk mencapai tujuan; (7) memiliki akuntabilitas untuk bekerja dengan staf; (8) kemampuan membuat perkembangan dengan efisien dan efektif.

B. SMK PARIWISATA

Sektor pariwisata Indonesia memiliki potensi yang sangat besar untuk menciptakan lapangan kerja, baik di bidang industri jasa maupun industri manufaktur seperti perhotelan, restoran, perjalanan wisata, makanan dan minuman, pakaian dan perhiasan, kecantikan. Di samping itu, pariwisata juga menciptakan peluang kerja pada bidang yang tidak berhubungan langsung dengan aktivitas kepariwisataan seperti konstruksi bangunan gedung, jalan, sanitasi lingkungan, dan instalasi listrik. Tambahan lagi, hampir semua jenis industri dan usaha pada sektor pariwisata bersifat "padat karya" atau melibatkan banyak tenaga kerja. Namun demikian, untuk semua jenis kegiatan industri pariwisata tersebut mutlak dibutuhkan tenaga kerja yang terampil dan kompetitif. Hal itu dikarenakan industri pariwisata merupakan sektor industri yang bersifat sangat kompetitif antar satu negara dengan negara lainnya. Dengan mempertimbangkan potensi sekaligus *competitiveness* tersebut, Pemerintah dalam hal ini Direktorat Pembinaan SMK Kemendikbud telah mengantisipasi dengan melakukan pengembangan program dan kompetensi keahlian pada spektrum bidang keahlian untuk SMK.

Saat ini, sektor pariwisata menjadi fokus Pemerintah untuk dikembangkan pada berbagai daerah. Di wilayah Indonesia terdapat 10 destinasi wisata baru yang tengah dikembangkan oleh Pemerintah untuk dapat mencapai target 20 juta kunjungan wisatawan ke Indonesia pada tahun 2019. Melalui pendidikan dan pelatihan SMK, perlu dikaji secara sistemik dan komprehensif penyelenggaraan SMK dalam menghasilkan lulusannya sebagai calon tenaga kerja bidang Pariwisata yang berkualitas memiliki kompetensi dan berdaya saing terkait dengan kesiapan untuk memenuhi Kebutuhan tenaga kerja di bidang Pariwisata.

Namun demikian, pengembangan sektor pariwisata ini masih mengalami permasalahan yang cukup serius yaitu ketersediaan jumlah tenaga kerja yang berkualitas dan siap pakai. Untuk itu, Pemerintah berencana akan melakukan sinergi guna meningkatkan kualitas tenaga kerja pada sektor pariwisata. Pihak swasta akan dilibatkan dalam hal pelatihan ketenagakerjaan. Keterlibatan swasta diharapkan dapat meringankan beban Pemerintah dalam meningkatkan kompetensi tenaga kerja kepariwisataan di Indonesia.

Dalam upaya menghasilkan SDM pariwisata yang berkualitas, Kementerian Pariwisata menggelar Rakornas SMK Pariwisata se Indonesia (2016) sebagai salah satu bentuk komitmen Pemerintah dalam hal ini Kementerian Pariwisata, untuk menyiapkan SDM pariwisata berkualitas, dalam menghadapi persaingan Masyarakat Ekonomi ASEAN (Wahyu Setyo Widodo, 2016). Deputi Bidang Pengembangan Kelembagaan Kepariwisata (Deputi BPKK) Kementerian Pariwisata, Ahman Sya, mengatakan agenda rakornas membahas sejumlah agenda utama seputar komitmen para *stakeholder*, khususnya lembaga pendidikan dalam mencetak SDM pariwisata berkualitas agar mampu bersaing di pasar kerja era pemberlakuan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Pelatihan dasar pariwisata antara lain berupa pemberian pemahaman dan pelatihan penerapan Sapta Pesona (keamanan, ketertiban, kebersihan, kenyamanan, keindahan, keramah-tamahan, dan kenangan) bagi SDM pariwisata sebagai kunci utama dalam menciptakan pelayanan prima bagi wisatawan dalam rangka peningkatan daya saing.

Komitmen Kementerian Pariwisata dalam upaya meningkatkan kualitas dan daya saing SDM Pariwisata dengan telah diwujudkannya program kegiatan memfasilitasi kegiatan sertifikasi bagi 35.000 tenaga kerja sektor pariwisata. Angka ini mengalami kenaikan 100% dari target tahun 2015 sebanyak 17.500 tenaga kerja. Selain itu, Kementerian Pariwisata juga melakukan program fasilitasi pendirian Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) bidang pariwisata di 34 provinsi serta pelatihan dasar pariwisata untuk

17.600 orang di seluruh Indonesia. Upaya tersebut dilakukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan bagi wisatawan. Pada tahun 2015 daya saing SDM pariwisata Indonesia di tingkat ASEAN masih berada di ranking 5 di bawah Singapura, Thailand, Malaysia, dan Filipina, sedangkan di tingkat dunia berada di ranking 53 dari 141 negara atau jauh tertinggal dari Singapura di ranking 3 dan Filipina di ranking 42 dunia.

Fakta menunjukkan bahwa dalam upaya meningkatkan daya saing, sejumlah kelemahan SDM pariwisata Indonesia antara lain (a) penguasaan bahasa Inggris; (b) teknologi informasi (IT), dan (c) manajerial. Rakornas SMK Pariwisata dimaksudkan juga untuk mendukung program penciptaan SDM pariwisata berkualitas agar dapat memenangkan persaingan. Tenaga kerja pariwisata Indonesia diharapkan akan mudah mengisi peluang kerja di sektor pariwisata khususnya untuk 38 *job titles* yang telah disepakati bersama dalam *Mutual Recognition Arrangement* (MRA) Masyarakat Ekonomi ASEAN (Ahman Sya, 2016).

Pemerintah telah menetapkan sektor pariwisata sebagai *leading sector* karena industri jasa ini menghasilkan devisa dan menciptakan lapangan kerja yang banyak. Tahun 2016 target Kementerian Pariwisata Indonesia adalah mendatangkan 12 juta wisman dan 260 juta pergerakan wisatawan nusantara, yang akan menghasilkan devisa sebesar Rp 172,8 triliun dan menyerap 11,7 juta tenaga kerja (Ahman Sya, 2016).

1. Spektrum (Penjurusan) Bidang Keahlian Pariwisata

Mengacu pada pengembangan Spektrum Keahlian SMK Bidang Keahlian Pariwisata telah dikembangkan menjadi 4 (empat) Program Keahlian dan 9 (sembilan) Kompetensi Keahlian. Program keahlian tersebut terdiri atas 1) Perhotelan dan Jasa Pariwisata, dengan kompetensi keahlian (a) Usaha Perjalanan Wisata; (b) Perhotelan; (c) Wisata Bahari dan Ekowisata; dan (d) Hotel dan Restoran; 2) Kuliner dengan kompetensi keahlian Tata Boga; 3) Tata Kecantikan dengan kompetensi (a) Tata Kecantikan Kulit dan Rambut; (b) *Spa* dan *Beauty*; dan 4) Tata Busana dengan kompetensi keahlian

(a) Tata Busana dan (b) Desain Fesyen (Peraturan Ditjen. Dikdasmen No. 06/D.D5/KK/2018). Masing-masing kompetensi keahlian dituntut untuk mampu menghasilkan lulusan yang berorientasi pada kebutuhan DU/DI.

Secara terminologi, dalam spektrum keahlian pendidikan kejuruan menggunakan istilah bidang keahlian, program keahlian dan kompetensi keahlian. Bidang keahlian adalah kelompok atau rumpun keahlian di SMK, program keahlian adalah jurusan dalam suatu bidang keahlian, dan kompetensi keahlian adalah spesialisasi dalam suatu program keahlian. Secara lengkap rincian spektrum keahlian dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 2. Spektrum Bidang Keahlian Pariwisata

Program Keahlian	KK (Kompetensi Keahlian)	Tahun	
		3	4
Perhotelan dan Jasa Pariwisata	Usaha Perjalanan Wisata	√	
	Perhotelan	√	
	Wisata Bahari dan Ekowisata		√
	Hotel dan Restoran		√
Kuliner	Tata Boga	√	
Tata Kecantikan	Tata Kecantikan Kulit dan Rambut	√	
	<i>Spa dan Beauty Therapy</i>		√
Tata Busana	Tata Busana	√	
	Desain Feysen		√

Sumber: Kep.Dirjen.Dikdasmen No. 06/D.D5/KK/2018

2. Struktur Kurikulum Kompetensi Keahlian Tata Boga

Berikut ini merupakan Struktur Kurikulum kelompok Mapel C1, C2 dan C3, SMK Kompetensi Keahlian Tata Boga dengan masa studi 3 tahun (Tabel 3),

REVITALISASI KURIKULUM SMK PARIWISATA
KOMPETENSI KEAHLIAN TATA BOGA

Tabel 3. Struktur Kurikulum SMK KK Tata Boga

8. Bidang Keahlian: Pariwisata							
8.2. Program Keahlian: Kuliner							
8.2.1. Kompetensi Keahlian: Tata Boga							
	MATA PELAJARAN	K E L A S					
		X		XI		XII	
		1	2	1	2	1	2
C1. Dasar Bidang Keahlian							
1.	Simulasi dan Komunikasi Digital	3	3	-	-	-	-
2.	IPA Terapan	3	3	-	-	-	-
3.	Kepariwisataan	3	3	-	-	-	-
C2. Dasar Program Keahlian							
1	Komunikasi Pangan (Sanitasi, Higienis dan Keselamatan Kerja)	2	2	-	-	-	-
2	Pengetahuan Bahan Makanan	3	3	-	-	-	-
3	Boga Dasar	5	5	-	-	-	-
4.	Ilmu Gizi	3	3	-	-	-	-
C3. Kompetensi Keahlian							
1	Tata Hidang	-	-	7	7	-	-
2	Pengolahan dan Penyajian Makanan	-	-	7	7	9	9
3	Produk Cake dan Kue Indonesia	-	-	5	5	8	8
4	Produk Pastry dan Bakery	-	-	5	5	8	8
5	Produk Kreatif dan Kewirausahaan	-	-	7	7	8	8
	Jumlah C (C1, C2, dan C3)	22	22	31	31	33	33
	Total	46	46	48	48	48	48

Sumber: Per. Ditjen. Diksmen No. 06/D.D5/KK/2018

3. KKNI (Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia) dan SKKNI (Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia)

Dalam sistem ketenagakerjaan di Indonesia, KKNI merupakan kerangka penjenjangan kualifikasi SDM Indonesia dengan menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara sektor pendidikan dengan sektor pelatihan kerja dan pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja (sertifikasi) sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor. KKNI merupakan perwujudan mutu dan jati diri bangsa Indonesia terkait dengan sistem pendidikan nasional, sistem pelatihan kerja nasional, dan sistem penilaian kesetaraan capaian pembelajaran (*learning outcomes*) secara nasional untuk menghasilkan SDM nasional yang bermutu dan produktif tulis di DP (Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012).

Dengan demikian, peran dari KKNI khususnya terkait dengan pendidikan yang diselenggarakan oleh SMK yaitu untuk menentukan posisi jabatan lulusan SMK baik yang sudah memiliki pengalaman kerja maupun belum. KKNI menyatakan sembilan jenjang kualifikasi SDM Indonesia yaitu meliputi 1) Jenjang 1 sampai dengan jenjang 3 dikelompokkan dalam jabatan operator; 2) Jenjang 4 sampai dengan jenjang 6 dikelompokkan dalam jabatan teknisi atau analis; dan 3) Jenjang 7 sampai dengan jenjang 9 dikelompokkan dalam jabatan ahli. Berikut deskripsi jenjang KKNI (Tabel 4) sesuai Perpres. No 8/2012.

Tabel 4. Deskripsi Jenjang KKNI (Skala Level II SMK)

Jenjang Kualifikasi	Uraian
Deskripsi Umum	a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; b. Memiliki moral, etika dan kepribadian yang baik di dalam menyelesaikan tugasnya; c. Mampu bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial dan kepedulian yang tinggi terhadap masyarakat dan lingkungannya;

Deskripsi Umum	d. Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, kepercayaan, dan agama serta pendapat/temuan original orang lain; dan e. Menjunjung tinggi penegakan hukum serta memiliki semangat untuk mendahulukan kepentingan bangsa serta masyarakat luas.
1	Mampu melaksanakan tugas sederhana, terbatas, bersifat rutin, dengan menggunakan alat, aturan, dan proses yang telah ditetapkan, serta di bawah bimbingan, pengawasan, dan tanggung jawab atasannya.
	Memiliki pengetahuan faktual.
	Bertanggung jawab atas pekerjaan sendiri dan tidak bertanggung jawab atas pekerjaan orang lain.
2	Mampu melaksanakan satu tugas spesifik, dengan menggunakan alat, dan informasi, dan prosedur kerja yang lazim dilakukan, serta menunjukkan kinerja dengan mutu yang terukur, di bawah pengawasan langsung atasannya.
	Memiliki pengetahuan operasional dasar dan pengetahuan faktual bidang kerja yang spesifik, sehingga mampu memilih penyelesaian yang tersedia terhadap masalah yang lazim timbul.
	Bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggung jawab membimbing orang lain.

Sumber: Perpres. No 8/2012

KKNI dikembangkan melalui berbagai kesepakatan antara Kemendiknas dan Kemenakertrans. Dalam proses pengembangannya, KKNI diposisikan sebagai penyetara capaian pembelajaran yang diperoleh melalui pendidikan formal, informal, dan nonformal dengan kompetensi kerja yang dicapai melalui pelatihan diluar ranah Kemdiknas, pengalaman kerja atau jenjang karir di tempat kerja. KKNI dapat dijadikan panduan oleh asosiasi profesi di tingkat nasional untuk menetapkan kriteria penilaian

kemampuan atau keahlian yang dimiliki seorang calon anggota sebelumnya atau seorang anggota yang ingin meningkatkan jenjang predikat keanggotaannya. Sektor-sektor lain seperti dunia usaha, birokrasi pemerintahan, dan industri juga membutuhkan KKNi sebagai pedoman untuk merencanakan pengelolaan dan peningkatan mutu sumber daya manusianya secara lebih komprehensif dan akurat, baik yang berhubungan dengan sistem karier, remunerasi, maupun pola rekrutmen baru (Ditjen Dikti, 2012).

Adapun SKKNI menurut Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 5 tahun 2012 tentang Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia adalah tatanan keterkaitan komponen standardisasi kompetensi kerja nasional yang komprehensif dan sinergis dalam rangka mencapai tujuan standardisasi kompetensi kerja nasional di Indonesia. SKKNI merupakan rumusan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan/atau keahlian serta sikap kerja yang relevan dengan pelaksanaan tugas dan syarat jabatan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Mengacu pada skema KKNi lulusan SMK hanya diakui sampai level II. Untuk KK Tata Boga pada SMK Pariwisata, skema sertifikasi KKNi yang digunakan sebagai acuan adalah skema SKKNI Level II pada KK Tata Boga, yang dikembangkan bersama oleh Komite Skema BNSP dan Direktorat PSMK (Tabel 5).

Tabel 5. Skema SKKNI Level II pada KK Tata Boga tahun 2017

KOMPETENSI UMUM dan INTI		
No.	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI
1.	D1.HRS.CL1.02	Melaksanakan prosedur keselamatan makanan
2.	D1.HRS.CL1.03	Membersihkan lokasi/area dan peralatan
3.	D1.HRS.CL1.04	Berkomunikasi secara efektif melalui telepon

REVITALISASI KURIKULUM SMK PARIWISATA
KOMPETENSI KEAHLIAN TATA BOGA

4.	D1.HRS.CL1.05	Mengikuti prosedur kebersihan di tempat kerja
5.	D1.HRS.CL1.06	Mengembangkan dan memperbaharui pengetahuan lokal
6.	D1.HRS.CL1.07	Menerapkan prosedur kesehatan, keselamatan, dan keamanan kerja (K3)
7.	D1.HRS.CL1.08	Memelihara pengetahuan tentang industri perhotelan
8.	D1.HRS.CL1.11	Melakukan prosedur administrasi
9.	D1.HRS.CL1.12	Melakukan prosedur dasar pertolongan pertama
10.	D1.HRS.CL1.14	Membaca dan menerjemahkan instruksi dasar, arah dan atau diagram
11.	D1.HRS.CL1.17	Berkomunikasi secara lisan dalam Bahasa Inggris pada tingkat operasional dasar
12.	D1.HRS.CL1.18	Bekerjasama secara efektif dengan kolega dan pelanggan
13.	D1.HRS.CL1.19	Bekerjasama dalam lingkungan sosial yang berbeda
14.	D1.HCC.CL2.01	Menggunakan metode dasar memasak
15.	D1.HCC.CL2.11	Menyiapkan dan menyimpan makanan secara aman dan higienis

KOMPETENSI PILIHAN/FUNGSIONAL		
No.	KODE UNIT	JUDUL UNIT
16.	D1.HBS.CL5.01	Membersihkan dan merapikan area bar dan area layanan makanan dan minuman
17.	D1.HBS.CL5.02	Mengembangkan dan memperbaharui pengetahuan tentang makanan dan minuman
18.	D1.HBS.CL5.05	Mengoperasikan sistem cellar/seluler
19.	D1.HBS.CL5.07	Menyiapkan dan menghidangkan minuman non-alkohol
20.	D1.HBS.CL5.09	Menyediakan penghubung antara dapur dan area pelayanan

21.	D1.HBS.CL5.12	Menyediakan layanan makanan dan minuman
22.	D1.HBS.CL5.13	Menyediakan <i>room service</i>
23.	D1.LAN.CL10.01	Berkomunikasi dalam Bahasa Inggris pada tingkat operasional dasar
24.	D1.LAN.CL10.09	Membaca informasi umum atau media
25.	D1.HCC.CL2.03	Mengidentifikasi dan menyiapkan daging
26.	D1.HCC.CL2.08	Menyiapkan aneka <i>sandwich</i>
27.	D1.HCC.CL2.09	Menyiapkan dan memasak unggas dan binatang buruan
28.	D1.HCC.CL2.10	Menyiapkan dan memasak <i>seafood</i>
29.	D1.HCC.CL2.12	Menyiapkan <i>appetizer</i> dan salad
30.	D1.HCC.CL2.14	Menyiapkan hidangan penutup panas dan dingin
31.	D1.HCC.CL2.16	Menyiapkan sup
32.	D1.HCC.CL2.17	Menyiapkan kaldu dan saus
33.	D1.HCC.CL2.18	Menyiapkan sayuran, telur dan hidangan yang seperti tepung
34.	D1.HRS.CL1.01	Mencari dan mendapatkan data komputer
35.	D1.HPA.CL4.05	Menyiapkan dan menyajikan hidangan berbahan coklat
36.	D1.HPA.CL4.06	Menyiapkan dan menyajikan makanan penutup
37.	D1.HPA.CL4.07	Menyiapkan dan menyajikan <i>gateaux, torten</i> dan kue
38.	D1.HPA.CL4.08	Menyiapkan dan membuat kue dan <i>pastry</i>
39.	D1.HPA.CL4.09	Menyiapkan dan membuat makanan yang mengandung ragi
40.	D1.HPA.CL4.10	Menyiapkan produk roti untuk <i>patisserie</i>

41.	PMM.MI02.004.01	Menyiapkan dan membuat bumbu kare
42.	PMM.MI02.007.01	Menyiapkan dan membuat salad (gado-gado, pecel, urap, rujak dan sejenisnya)
43.	PMM.MI02.008.01	Menyiapkan dan membuat kaldu dan <i>soup</i> (soto)
44.	PMM.MI02.009.01	Menyiapkan dan membuat hidangan daging ayam, <i>seafood</i> dan kari sayuran
45.	PMM.MI02.010.01	Menyiapkan dan membuat hidangan nasi dan mie
46.	PMM.MI02.012.01	Menyiapkan dan membuat makanan pelengkap (kerupuk, emping, dan bawang goreng)
47.	PMM.MI02.013.01	Menyiapkan dan membuat aneka sambal masakan Indonesia

Sumber: Standar KKNI Level II (BNSP 2017)

C. PENYESUAIAN KURIKULUM SMK PARIWISATA BERBASIS *COMMON ASEAN TOURISM CURRICULUM* (CATC)

1. Pengadopsian SKKNI ke dalam kurikulum dan pelaksanaan kurikulum

Sebanyak 15 unit kompetensi Umum/Inti, dan 32 unit kompetensi pilihan yang terdapat dalam SKKNI level II untuk Kompetensi Keahlian Tata Boga tahun 2017 (Tabel. 4) telah diadopsi ke dalam struktur Kurikulum SMK Kompetensi Keahlian Tata Boga tahun 2017. Adopsi tersebar pada berbagai KI/KD dari setiap mata pelajaran kelompok C2 (Dasar Program Keahlian), dan mata pelajaran kelompok C3 (Kompetensi Keahlian). Pengadopsian tersebut menunjukkan bahwa kurikulum SMK tahun 2017 yang hingga saat ini masih digunakan telah mengacu kepada SKKNI, dalam hal ini SKKNI Level II untuk Kompetensi Keahlian Tata Boga tahun 2017 (yang diterbitkan BNSP pada tahun 2017).

Saat ini, SKKNI untuk bidang Pariwisata, termasuk untuk Kompetensi Keahlian Tata Boga, sedang direvisi terkait pengadopsian CATC (*Common Asean Tourism Curriculum*). Draf revisi SKKNI level II untuk Kompetensi

Keahlian Tata Boga sedang diuji coba (dirintis) pada 21 SMK penyelenggara KK Tata Boga, dengan target akan diberlakukan mulai tahun ajaran 2020/2021. Namun ditemukan fakta bahwa dari semua SMK rintisan tersebut di atas, baru 1 SMK yang telah merintis penerapan draf revisi SKKNI level II untuk Kompetensi Keahlian Tata Boga sejak tahun ajaran 2016/2017. SMK-SMK rintisan lainnya baru mulai menerapkan perintisannya pada tahun ajaran 2019/2020 ini. Tampaknya hal tersebut berkaitan dengan perkembangan lebih lanjut dalam proses pengesahan draf SKKNI Level II KK Tata Boga, di mana BNSP bersama dengan Kemendikbud dan Kemnaker pada bulan April 2019 menandatangani SKKNI Level II Tata Boga hasil revisi. Meskipun baru ditandatangani tahun 2019, namun secara nomenklatur penamaannya tetap dinyatakan sebagai SKKNI Level II Tata Boga tahun 2018 (Tabel 6).

Table 6. SKKNI Level II untuk KK Tata Boga tahun 2018 (hasil revisi)

KOMPETENSI UMUM dan INTI		
No.	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI
1.	D1.HRS.CL1.03	Membersihkan lokasi / area dan peralatan
2.	D1.HRS.CL1.04	Berkomunikasi secara efektif melalui telepon
3.	D1.HBS.CL5.02	Mengembangkan dan memperbaharui pengetahuan tentang makanan dan minuman
4.	D1.HRS.CL1.07	Menerapkan prosedur kesehatan, keselamatan dan keamanan kerja
5.	D1.HRS.CL1.11	Melakukan prosedur administrasi
6.	D1.HRS.CL1.09	Menangani dan menyelesaikan situasi konflik
7.	D1.HRS.CL1.12	Melakukan prosedur dasar pertolongan pertama
8.	D1.LAN.CL10.08	Membaca dan menerjemahkan instruksi dasar, arah dan atau diagram

REVITALISASI KURIKULUM SMK PARIWISATA
KOMPETENSI KEAHLIAN TATA BOGA

9.	D1.LAN.CL10.01	Berkomunikasi secara lisan dalam bahasa Inggris pada tingkat operasional dasar
10.	D1.HRS.CL1.18	Bekerjasama secara efektif dengan kolega dan pelanggan
11.	D1.HCC.CL2.01	Menggunakan metode dasar memasak
12.	D1.HRS.CL1.10	Mengorganisir dan menyiapkan makanan
13.	D1.HCC.CL2.19	Menyajikan dan mendisplay makanan

KOMPETENSI PILIHAN/FUNGSIONAL		
No.	KODE UNIT	JUDUL UNIT
14.	D1.HBS.CL5.07	Menyiapkan dan menghidangkan minuman non-alkohol
15.	D1.HBS.CL5.09	Menyediakan penghubung antara dapur dan area pelayanan
16.	D1.HBS.CL5.12	Menyediakan layanan makanan dan minuman
17.	D1.HBS.CL5.13	Menyediakan <i>room service</i>
18.	D1.HCC.CL2.17	Menyiapkan kaldu dan saus
19.	D1.HCC.CL2.12	Menyiapkan <i>appetizer</i> dan salad
20.	D1.HCC.CL2.16	Menyiapkan <i>soup</i>
21.	D1.HCC.CL2.08	Menyiapkan aneka <i>sandwich</i>
22.	D1.HCC.CL2.09	Menyiapkan dan memasak unggas dan binatang buruan
23.	D1.HCC.CL2.18	Menyiapkan sayuran, telur dan hidangan <i>farinaceous</i>
24.	D1.HCC.CL2.10	Menyiapkan dan memasak <i>seafood</i>
25.	D1.HRS.CL1.01	Mencari dan mendapatkan data <i>computer</i>

26.	D 1.HPA.CL4.05	Menyiapkan dan menyajikan hidangan berbahan coklat
27.	D 1.HPA.CL4.06	Menyiapkan dan menyajikan makanan penutup
28.	D 1.HPA.CL4.07	Menyiapkan dan menyajikan <i>gateaux, torten</i> dan kue
29.	D 1.HPA.CL4.08	Menyiapkan dan membuat kue dan <i>pastry</i>
30.	D 1.HPA.CL4.09	Menyiapkan dan membuat makanan yang mengandung ragi
31.	D1.HPA.CL4.10	Menyiapkan produk bakery untuk <i>patisserie</i>
32.	PMM.MI02.010.01	Menyiapkan dan membuat hidangan nasi dan mie
33.	PMM.MI02.004.01	Menyiapkan dan membuat bumbu kare
34.	PMM.MI02.007.01	Menyiapkan dan membuat salad (gado-gado, pecel, urap, rujak dan sejenisnya)
35.	PMM.MI02.013.01	Menyiapkan dan membuat aneka sambal masakan Indonesia
36.	PMM.MI02.012.01	Menyiapkan dan membuat makanan pelengkap (kerupuk, emping, dan bawang goreng).
37.	PMM.MI02.008.01	Menyiapkan dan membuat kaldu & sup (soto)
38.	PMM.MI02.009.01	Menyiapkan dan membuat hidangan daging ayam, <i>seafood</i> & kari sayuran

Sumber: Standar KKNI Level II (BNSP 2017)

Perubahan dari SKKNI level II Tata Boga sebelumnya (tahun 2017) menjadi SKKNI level II Tata Boga tahun 2018 diantaranya ditunjukkan dengan adanya penggantian (penyesuaian) beberapa acuan normatif berikut:

- PP No. 23/2004 tentang BNSP **diganti** dengan PP No. 10/2018 tentang BNSP.

- SK Dirjen Dikdasmen No. 130/D/KEP/KR/2017 **diganti** dengan Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah No.06/D.D5/KK/2018 tentang Spektrum Keahlian Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)/Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK).
- Mencantumkan ASEAN *Common Competency Standards for Tourism Professionals* dan *Common ASEAN Tourism Curriculum*, pada Skema Sertifikasi Kompetensi Profesi KKNi Sektor Pariwisata Bidang Tata Boga (*Food Production*) dan Skema Sertifikasi Kompetensi Profesi KKNi Sektor Pariwisata Bidang Tata Hidang (*Food and Beverage*) Tahun 2014 sebagai acuan.
- Sudah mencantumkan kemungkinan jabatan yang dapat diemban oleh pemegang sertifikat, yaitu *Kitchen Hand, Butcher, Baker, Commis Pastry, Busboy, Trainee Waiter, Trainee Server, dan Restaurant and Bar Service Agent*.

Perubahan selanjutnya adalah pengurangan jumlah dan jenis unit kompetensi, sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 7, 8, dan 9 berikut di bawah ini.

Tabel 7. Perbedaan kelengkapan legalitas antara SKKNI Level II
KK Tata Boga Th 2017 dengan Th 2018

SKKNI	Diverifikasi Oleh	Diperiksa Ulang Oleh
2017	5 Orang anggota BNSP	---
2018 CATC	2 Orang anggota BNSP	• BNSP • Kemendikbud • Kemnaker

Tabel 8. Pencapaian kompetensi untuk mendapatkan kualifikasi (sertifikat)

Kompetensi	SKKNI 2017	SKKNI 2018	Perubahan Unit Kompetensi
Umum dan Inti	15	13	• Dihapus 8 unit: D1.HRS.CL.1.02, D1.HRS.CL.1.05, D1.HRS.CL.1.06, D1.HRS.CL.1.08, D1.HRS.CL.1.14, D1.HRS.CL.1.17, D1.HRS.CL.1.19, D1.HCC.CL.2.11 • Ditambah 6 unit: D1.HRS.CL.1.09, D1.HRS.CL.1.10, D1.HCC.CL.2.19, D1.HBS.CL.5.02, D1.LAN.CL.10.01, D1.LAN.CL.10.08
Pilihan/Fungsional	32	25	• Dihapus 7 unit: D1.HBS.CL.5.01, D1.HBS.CL.5.02, D1.HBS.CL.5.05, D1.LAN.CL.10.01, D1.LAN.CL.10.09, D1.HCC.CL.2.03, D1.HCC.CL.2.14

Table 9. Klasterisasi, jumlah dan rincian unit kompetensi

SKKNI	Jumlah Klaster	Rincian dan Jumlah Unit/Klaster
2017	6	• Pelayanan Makan dan Minum (13) • Pembuatan Minuman Non Alkohol (7) • Pembuatan Makanan Indonesia (12) • Pembuatan Makanan Kontinental (12) • Pembuatan Produk <i>Pastry</i> (8) • Pembuatan Produk <i>Pastry</i> (7) (59)
2018	5	• Pembuatan Makanan Kontinental (18) • Pembuatan Makanan Indonesia (17) • Pembuatan Produk <i>Pastry</i> (13) • Pembuatan Produk <i>Bakery</i> (12) • Pelayanan Makan dan Minum (15) (75)

Semua unit kompetensi (13 unit kompetensi Umum/Inti, dan 25 unit kompetensi pilihan) yang terdapat dalam SKKNI level II Kompetensi Keahlian Tata Boga tahun 2018 telah diadopsi ke dalam struktur Kurikulum SMK Kompetensi Keahlian Tata Boga tahun 2018, yang telah digunakan di

semua SMK rintisan mulai tahun ajaran 2019/2020 ini, dan secara nasional akan resmi digunakan untuk seluruh SMK yang menyelenggarakan KK Tata Boga.

Meski sudah mengalami revisi, kalangan sekolah, DU/DI, dan asosiasi profesi *Chef* menilai beberapa butir KI/KD dalam struktur kurikulum terlalu berat/dalam untuk dipelajari pada tingkat SMK. Hal tersebut karena dalam penilaian mereka teknologi peralatan yang ada di sekolah-sekolah masih belum memadai, demikian juga dengan kompetensi gurunya, dan tingkat kedalaman yang dipelajari kurang relevan dengan keprofesiannya. KI/KD yang dimaksud tersebut adalah:

- Mengevaluasi *fusion food* (KD 3.24), menerapkan *food gastronomy molecular* (KD 3.25), membuat hidangan *fusion food* (KD 4.24), dan membuat makanan dengan prinsip *food gastronomy molecular* (KD 4.25), keempatnya terdapat dalam mata pelajaran Pengolahan dan Penyajian Makanan, dan
- Menganalisis zat gizi sumber energi yang diperlukan tubuh (KD 3.1), menganalisis zat gizi sumber zat pembangun yang diperlukan tubuh (KD 3.2), menganalisis zat gizi sumber zat pengatur yang diperlukan tubuh (KD 3.3), memecahkan masalah kekurangan zat gizi sumber energi yang diperlukan tubuh (KD 4.1), memecahkan masalah kekurangan zat gizi sumber zat pembangun yang diperlukan tubuh (KD 4.2), dan memecahkan masalah kekurangan zat gizi sumber zat pengatur yang diperlukan tubuh (KD 4.3), kesemuanya dalam mata pelajaran Ilmu Gizi.

Secara umum pengertian *fusion food* adalah pembuatan jenis makanan dengan teknik memadukan 2 (dua) unsur kuliner tradisional berbeda, yang tidak dikategorikan berdasarkan salah satu jenis masakan tertentu. *Fusion food* telah populer disajikan di restoran-restoran kontemporer sejak era 1970an, dan kreativitas dalam pembuatannya terus berkembang hingga saat ini (Indogastronomi, 2015).

Food gastronomy molecular merupakan ilmu yang mempelajari transformasi fisio kimiawi dari bahan makanan selama proses memasak, serta fenomena sensor saat mereka dikonsumsi. Sedangkan, kata ‘molekuler’ dalam gastronomi molekuler mengacu pada ilmu biologi molekuler, yang mempelajari bahan-bahan pangan hingga ke tahap molekul. Secara sederhana, gastronomi molekuler merupakan teknik untuk membuat makanan atau minuman dengan menggabungkan ilmu fisika dan kimia (Ellora, 2017).

Menilik pengertian di atas, mudah dipahami bahwa dalam teknik pembuatan dan penyajian *fusion food*, apalagi *food gastronomy molecular* dituntut keterampilan/keahlian (*skills*) tingkat lanjutan dari apa yang dipelajari pada tingkat SMK. Sebagaimana dinyatakan oleh pihak DU/DI dan asosiasi profesi bahwa teknik-teknik pembuatan dan penyajian jenis-jenis makanan olahan seperti itu baru diperkenalkan di tingkat akademi/perguruan tinggi di bidang pariwisata/Tata Boga. Oleh karena itu kalangan-kalangan tersebut mengusulkan agar kompetensi terkait dengan pembuatan dan penyajian *fusion food* dan *food gastronomy molecular* dikeluarkan dari kurikulum SMK KK Tata Boga, karena terlalu berat untuk dipelajari oleh siswa tingkat SMK. Hal tersebut diperberat lagi dengan kondisi belum dimilikinya peralatan yang memadai dan guru yang benar-benar menguasai teknik-teknik pembuatan dan penyajian makanan yang sangat rumit tersebut. Namun demikian tetap dibuka kemungkinan untuk memfasilitasi penyelenggaraannya jika terdapat siswa-siswa yang sangat berminat untuk mempelajarinya. Untuk mewadahi hal tersebut dapat berupa kegiatan ekstrakurikuler atau semacam *study group* yang dibimbing oleh pihak DU/DI mitra sekolah yang benar-benar kompeten di bidang tersebut.

Mengenai kompetensi menganalisis dan memecahkan masalah-masalah kekurangan gizi, kalangan DU/DI dan asosiasi profesi berpendapat untuk lulusan SMK KK Tata Boga tidak perlu sampai sedalam itu. Kompetensi dalam hal terkait dengan masalah gizi, lulusan SMK KK Tata Boga cukup sampai dengan kompeten atau terampil mengolah dan menyajikan makanan

dengan kandungan gizi sesuai dengan DKBM (Daftar Komposisi Bahan Makanan), baik nasional maupun internasional, yang sudah menjadi rujukan resmi dalam hal kecukupan gizi pada pengolahan bahan-bahan makanan dan minuman. Kompetensi menganalisis dan memecahkan masalah kekurangan gizi dikarenakan tubuh kekurangan asupan zat gizi sumber energi, atau zat gizi sumber zat pembangun, atau zat gizi sumber zat pengatur merupakan bagian dari suatu KK yang dipelajari tersendiri pada Bidang Keahlian Kesehatan.

Berkenaan dengan materi pembelajaran, dari struktur kurikulum tampak jelas bahwa jenis-jenis makanan/masakan olahan yang dipelajari masih didominasi oleh jenis-jenis makanan kontinental dan oriental. Di sisi lain, menurut kalangan DU/DI (terutama Restoran dan Hotel) permintaan akan sajian jenis-jenis makanan lokal (nasional) kecenderungannya terus meningkat. Apalagi jika dikaitkan dengan salah satu jenis aktivitas kepariwisataan yang juga sedang populer di dunia dalam dua dekade terakhir ini, yaitu wisata kuliner, dunia pariwisata Indonesia berpeluang meraup keuntungan besar yang akan berimbas pada pertumbuhan dan perkembangan dunia usaha dan dunia kerja, mengingat potensi keragaman jenis kuliner nasional yang begitu besar.

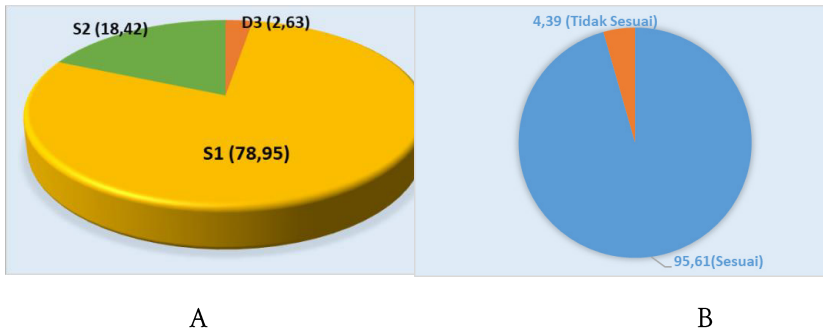
Mengingat hal tersebut di atas, maka sudah waktunya untuk segera meningkatkan komposisi materi pembelajaran tentang jenis-jenis makanan lokal dalam struktur kurikulum SMK KK Tata Boga. Menurut telaah kalangan DU/DI dan asosiasi profesi saat ini komposisi materi tentang jenis makanan yang dipelajari dalam struktur kurikulum SMK KK Tata Boga adalah makanan/masakan kontinental 50 persen, makanan oriental 30 persen, dan makanan lokal hanya 20 persen. Dengan latar belakang perkembangan tren permintaan pasar tadi, maka komposisi materi pembelajaran tersebut sekarang harus dibalik menjadi makanan oriental 20 persen, makanan kontinental 30 persen, dan makanan lokalnya menjadi 50 persen. Kenapa untuk jenis makanan kontinental masih dialokasikan 30 persen? hal itu dikarenakan pada dasarnya konsep masak memasak hingga

ke Bahasa dan peristilahannya memang berasal dari Eropa.

Terkait dengan substansi pembelajaran untuk KK Tata Boga, beberapa modul yang saat ini digunakan masih ada yang dibuat 10 - 20 tahun lalu, sehingga banyak materinya yang harus di *update* (diperbaharui/disesuaikan) lagi dengan perkembangan dunia kuliner pada saat ini. Dalam konteks pembelajaran ke depan, dan juga untuk makin mempopulerkan makanan-makanan nasional Indonesia di ajang wisata kuliner dunia, pembaruan materi tersebut menjadi suatu keniscayaan. Tahapan ini memang terasa berat, mengingat pembaruan materi tersebut juga harus mencakup hingga penyusunan manual resep-resep berbagai jenis olahan makanan bahkan jenis-jenis bumbu, yang akan dijadikan standar khusus untuk jenis-jenis makanan Indonesia yang akan dijadikan "*icon*" untuk dipersaingkan dengan jenis-jenis makanan dari negara lain.

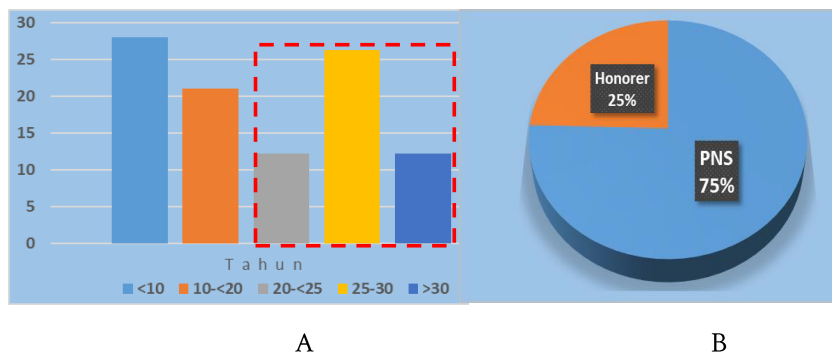
2. Performa guru, pelaksanaan pembelajaran, dan sarana prasarana

Performa guru dalam konteks ini dilihat dari kualifikasi dan kesesuaian, keikutsertaan dalam pelatihan di bidangnya, dan pengalaman magang di industri (DU/DI) dari guru-guru kelompok mata pelajaran C2 dan C3. Performa guru ditinjau dari kualifikasi dan kesesuaian pendidikannya sudah baik. Melihat kualifikasi pendidikannya, sudah 97,37 persen guru berpendidikan minimal S1 (Gambar 4A) menunjukkan bahwa 95,61 persen latar belakang pendidikannya sesuai dengan mata pelajaran yang diampunya (Gambar 4B). Hal tersebut berarti hanya tinggal 2,63 persen saja yang masih berpendidikan di bawah S1, dan hanya tinggal 4,39 persen yang *mismatch* atau latar belakang pendidikannya tidak sesuai dengan mata pelajaran yang diampunya. Namun demikian, kasus *mismatch* tersebut umumnya masih berlatar belakang pendidikan dari program studi di bidang Pariwisata yaitu perhotelan (*hospitality*) dan perjalanan wisata (*travel*), dan sebagian kecil lainnya dari jurusan/program studi Ekonomi dan Akuntansi.



Gambar 1. Kualifikasi dan kesesuaian guru kelompok Mapel C2 dan C3

Didapatkan pula fakta bahwa sebagian besar guru kelompok mata pelajaran C2 (program keahlian) dan C3 (kompetensi keahlian) sudah ber masa kerja minimal 20 tahun, bahkan cukup banyak yang lebih dari 30 tahun (Gambar 1A), dan sebagian lainnya masih berstatus honorer (Gambar 1B). Fakta-fakta tersebut menunjukkan bahwa dalam kurun waktu 5 tahun kedepan akan cukup banyak guru-guru dari kelompok mata pelajaran C2 dan C3 yang akan memasuki masa pensiun. Kondisi tersebut harus segera diantisipasi dengan secara bertahap mulai mengadakan rekrutmen guru kelompok mata pelajaran C2 dan C3, mengingat program/kebijakan pengadaan guru setiap tahun terbatas jumlahnya atau tidak pernah memenuhi kuota kebutuhan yang sesungguhnya, karena kemampuan penganggaran pemerintah yang juga terbatas. Di samping itu, rekrutmen guru untuk pendidikan kejuruan, khususnya untuk masing-masing kelompok keahlian kejuruannya, cukup sulit atau tidak semudah merekrut guru-guru mata pelajaran di sekolah umum. Hal tersebut dikarenakan tidak semua LPTK menyelenggarakan program-program studi yang lulusannya dibutuhkan oleh SMK, atau tidak semua program studi yang lulusannya dibutuhkan SMK diselenggarakan oleh setiap LPTK.

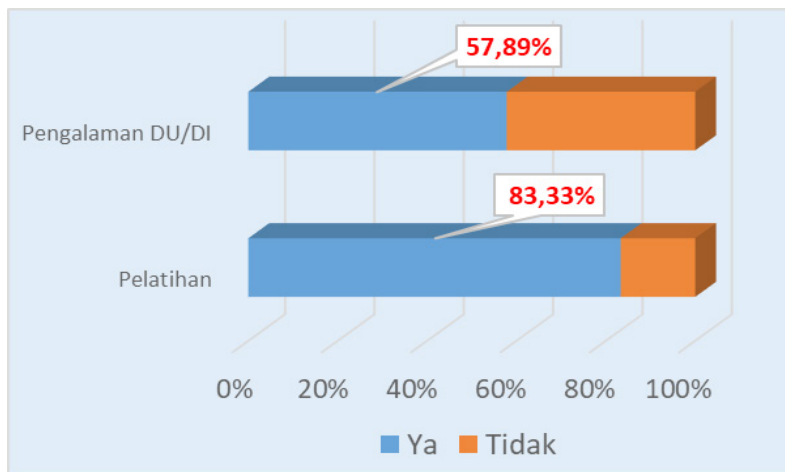


Gambar 2. Masa kerja dan status guru kelompok Mapel C2 dan C3

Selanjutnya terungkap pula bahwa belum semua guru-guru kelompok mata pelajaran C2 dan C3 berkesempatan mengikuti pelatihan-pelatihan di bidang keahliannya atau mata pelajaran yang diampunya. Namun yang lebih memprihatinkan ternyata hampir separuh guru-guru kelompok mata pelajaran C2 dan C3 belum mempunyai pengalaman magang di industri (Gambar 2). Karena belum pernah memiliki pengalaman magang atau keterlibatan secara langsung di DU/DI, maka hampir separuh dari guru-guru tersebut tidak mengerti proses yang berlangsung di DU/DI. Kondisi itu tentunya berdampak negatif terhadap proses pembelajaran yang dilakukan oleh guru-guru tersebut, karena sebagai guru-guru program keahlian dan kompetensi keahlian tentunya tidak hanya dituntut memiliki penguasaan pengetahuan (teori) saja, tetapi juga harus memiliki kemampuan praktikal yang dapat diperoleh melalui pemagangan di DU/DI.

Dengan kondisi performa guru sebagaimana diuraikan di atas, perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran di sekolah secara umum masih dapat berjalan dengan baik. Kemampuan guru dalam menyusun RPP umumnya sudah baik, setidaknya diindikasikan dalam hal penjabaran KI/KD. Penjabaran KI/KD dalam indikator sudah mencakup hampir semua dimensi pengetahuan sebagaimana yang diuraikan dalam KI-3, yaitu dimensi pengetahuan yang akan dicapai mencakup pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif. Hanya kadang ditemukan dalam RPP ada

dimensi yang belum muncul dalam indikator, yang pada umumnya adalah dimensi faktual. Dengan demikian, para guru masih perlu ditingkatkan kemampuan/ kecermatannya dalam menurunkan indikator dari KI/KD sehingga tujuan pembelajaran yang tercantum di indikator dapat tercapai.



Gambar 3. Keikutsertaan guru dalam pelatihan dan magang di DU/DI

Dalam pelaksanaan pembelajaran secara umum guru sudah menguasai materi dan menggunakan metode yang sesuai, namun penerapan pendekatan dan model pembelajaran masih kurang tepat. Selain itu, untuk dimensi keterampilan (KI-4) kadang juga masih didapati kurangnya guru menggunakan kata kerja operasional (KKO) yang spesifik sebagaimana diuraikan dalam KI-4, terutama dalam hal penggunaan alat. Artinya KI-4 yang kompetensi dasarnya merupakan aspek psikomotorik, belum menggunakan KKO yang menunjukkan performa peserta didik dalam melaksanakan tugas spesifik dengan menggunakan alat.

Terkait dengan metode dan kemampuan guru dalam melaksanakan pembelajaran, guru-guru (sekolah) menginginkan diperbolehkan melakukan pembelajaran dengan metode *team teaching*. Dalam pengalaman praktis para guru, penggunaan metode *team teaching* sangat dibutuhkan

terutama dalam pembelajaran praktik, baik di kelas apalagi di dapur-dapur latih untuk produksi dan penyajian makanan. Namun sayangnya penggunaan metode *team teaching* hanya diakui (diizinkan) di beberapa atau sebagian daerah (provinsi) saja, tidak berlaku secara nasional. Pengertian diakui dalam hal ini adalah dapat dihitung sebagai pemenuhan jam minimal mengajar tatap muka yang menjadi kewajiban bagi setiap guru. Sebagai contoh pada kasus pembelajaran praktik di SMK di wilayah Jawa Barat dan Sumatera Selatan, digunakan metode *team teaching* dengan dua orang guru dalam satu kelas yang sedang melaksanakan pembelajaran praktik di dapur latih produksi dan ruang latih penyajian. Namun, pada kasus pembelajaran yang sama di SMK di wilayah kabupaten Sidoarjo dan kota Malang (Jawa Timur), tidak digunakan metode *team teaching*, karena memang tidak diizinkan oleh otoritas (dinas) pendidikan di wilayah (provinsi) setempat. Jadi, mengajar dengan metode *team teaching* tampaknya hanya diizinkan dan diakui pada sebagian daerah (provinsi) saja.

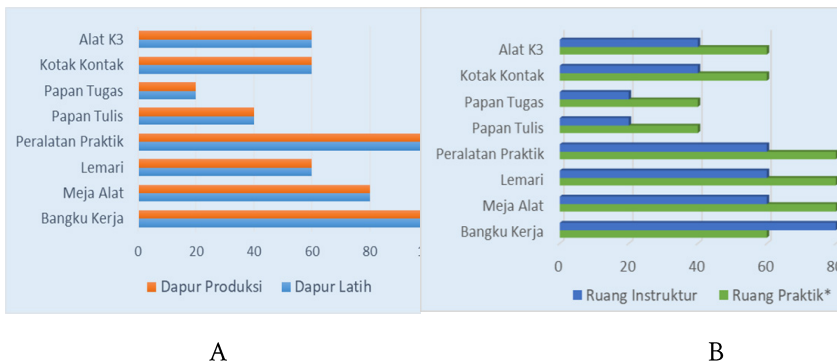
Konfirmasi dari Direktorat PSMK (Subdit Kurikulum) kebijakan penerapan metode *team teaching* dalam pembelajaran di SMK memang sudah dihapus/ditiadakan. Hal itu karena dari pemantauan Direktorat PSMK banyak sekali terjadi pelanggaran dalam praktik penerapan metode *team teaching* ini. Pelanggaran tersebut adalah dalam dokumen rencana pembelajaran dicantumkan penggunaan metode pembelajaran *team teaching* yang melibatkan dua orang guru, tetapi pada praktiknya yang melakukan hanya satu orang guru saja. Nilai penting yang sebenarnya harus dijadikan pertimbangan dari penggunaan metode *team teaching* ini adalah kebutuhan untuk efektivitas pembelajaran, terutama optimalisasi pemahaman materi pembelajaran oleh peserta didik. Dengan demikian seharusnya dicari pemecahan masalah untuk mengantisipasi potensi terjadinya penyalahgunaan *team teaching* oleh oknum guru, bukan upaya meniadakannya dengan cara tidak mengakuinya dalam mekanisme penghitungan jumlah jam minimal mengajar tatap muka seorang guru. Sebab faktanya dalam pembelajaran praktik, satu orang guru sangat terbatas

sekali kemampuannya untuk dapat mengendalikan jalannya pembelajaran dengan optimal. Apalagi jika mengacu pada ketentuan jumlah maksimal siswa dalam satu rombongan belajar adalah 32 orang.

Kondisi keterbatasan kemampuan guru tersebut di atas salah satunya juga dapat menyebabkan rendahnya *Soft Skill* siswa dalam hal disiplin, etos kerja (karakter), dan kemampuan berbahasa asing (bahasa Inggris). Padahal *soft skill* bagi lulusan SMK yang seperti itu merupakan persyaratan mendasar yang “dituntut” oleh DU/DI ketika siswa akan menjalani prakerin, dan ketika lulus akan memasuki dunia kerja. Kalangan DU/DI, ketika akan menerima siswa yang akan melaksanakan tahap prakerin, sangat menekankan kepada pihak sekolah untuk mampu menyiapkan siswanya agar mempunyai disiplin yang tinggi, rajin atau mau selalu belajar, jujur, bermental tangguh, mampu berbahasa Inggris minimal dalam peristilahan yang sudah baku digunakan dalam lingkungan pekerjaan Tata Boga. Dengan demikian, pihak DU/DI akan mempunyai kesempatan yang maksimal untuk mengajarkan keterampilan kepada siswa, karena tidak lagi berurusan untuk membentuk *soft skill* siswa, kecuali dalam aspek-aspek yang berkaitan dengan budaya kerja/perusahaan.

Terkait dengan prakerin, salah satu keuntungan bagi siswa dan sekolah adalah kesempatan untuk menggunakan peralatan kerja yang sesuai dengan kenyataan yang digunakan sehari-hari pada DU/DI. Karena masih cukup banyak peralatan dan sarana pelatihan/praktik yang belum dimiliki sekolah, rusak, dan/atau teknologinya tertinggal dari yang digunakan oleh DU/DI. Keberadaan sarana prasarana yang dimiliki oleh sekolah ditunjukkan pada Gambar 4. Grafik dalam Gambar 4 menunjukkan bahwa semua sekolah lengkap memiliki sarana berupa Dapur Produksi, Dapur Latih, Ruang Praktik, dan Ruang Instruktur sebagaimana yang dimaksudkan pada Permendikbud No. 34 tahun 2018 tentang Standar Nasional Pendidikan SMK/MAK. Gambar 4A menunjukkan keberadaan perlengkapan praktik dengan kondisi baik yang terdapat dalam Dapur Produksi dan Dapur Latih, diantaranya tampak bahwa untuk peralatan praktik dan bangku kerja

kondisinya 100 persen dalam keadaan baik. Untuk meja alat masih 80 persen dalam kondisi baik, sementara untuk lemari, kotak kontak dan peralatan K3 masing-masing hanya 60 persen yang kondisinya baik. Termasuk ke dalam peralatan praktik adalah (i) peralatan kecil (*utensils*) untuk mengolah makanan/masakan seperti alat potong dan panci-panci untuk merebus/menggoreng, dan (ii) peralatan besar (*equipment*) yang membuat ruangan berfungsi sebagai dapur untuk mengolah makanan/masakan seperti kompor, oven, dan freezer.



Gambar 4. Keberadaan sarana dan perlengkapan praktik dengan kondisi baik

Gambar 4B menunjukkan keberadaan perlengkapan praktik dengan kondisi baik yang terdapat dalam Ruang Instruktur dan Ruang Praktik. Pengertian ruang praktik adalah sarana berupa ruangan yang didesain sebagai restoran atau *café*. Dalam ruang praktik, diantaranya tampak bahwa untuk peralatan praktik, lemari dan meja alat masing-masing kondisinya masih 80 persen dalam keadaan baik. Sedangkan untuk bangku kerja, kotak kontak dan peralatan K3 masing-masing kondisinya 60 persen dalam keadaan baik. Dalam ruang instruktur, di antaranya tampak bahwa untuk bangku kerja kondisinya masih 80 persen dalam keadaan baik. Sedangkan untuk peralatan praktik, lemari dan meja alat masing-masing kondisinya 60 persen dalam keadaan baik. Agak berbeda di ruang instruktur, hanya bangku kerja yang masih 80 persen dalam keadaan baik, dan peralatan

praktik, lemari serta meja alat yang masing-masing 60 persen dalam keadaan baik. Secara umum dapat disimpulkan kondisi peralatan praktik (baik peralatan kecil maupun besar), meja alat, lemari, bangku kerja, kotak kontak, dan peralatan K3 sebagian besar (minimal 60 persen) dalam keadaan baik untuk digunakan dalam pembelajaran praktik di dapur produksi, dapur latih, dan ruang praktik. Sementara sebagian besar perlengkapan seperti papan tugas dan papan tulis dalam kondisi rusak, dan khusus untuk ruang instruktur kotak kontak dan peralatan K3 juga sebagian besar dalam kondisi rusak.

Selanjutnya terkait dengan pengadaan (*drooping*) perlengkapan praktik, masih banyak terjadi ketidaksesuaian perlengkapan praktik yang dikirim ke sekolah-sekolah, dari yang diajukan semula yang sudah sesuai dengan *need assessment* yang dilakukan sekolah. Hal seperti ini cukup menyulitkan sekolah, karena peralatan yang telah terkirim tidak bisa dikembalikan, padahal nyaris tidak digunakan dalam pembelajaran. Sebagai akibatnya pada sebagian sekolah, dalam penatalaksanaan penempatan dan penyimpanannya cukup banyak mengurangi ketersediaan ruang-ruang pembelajaran dan area aktivitas warga sekolah, karena perlengkapan tersebut terpaksa ditempatkan di dapur-dapur, ruang instruktur, kantin, dan bahkan halaman sekolah, karena gudang atau area penyimpanan lain sudah tidak dapat menampung lagi. Untuk menjamin aktivitas pembelajaran dan aktivitas lain warga sekolah yang lebih nyaman, sangat diharapkan segera dilakukan sistem pengelolaan inventaris yang lebih baik oleh Pemerintah Daerah, sehingga perlengkapan-perengkapan yang sudah tidak digunakan lagi oleh sekolah itu dapat segera dikeluarkan dari sekolah.

D. DUNIA KERJA

Penyelenggaraan pendidikan kejuruan (SMK) mutlak memerlukan kerja sama dengan dunia usaha/dunia industri (DU/DI) di berbagai aspek terutama dalam hal praktik kerja (magang) bagi siswa, *teaching factory*, dan pengalaman industri (magang) bagi guru. Kerja sama atau kemitraan

(*partnership*) dapat dimaknai sebagai suatu bentuk persekutuan antara dua pihak atau lebih yang membentuk satu ikatan kerjasama di suatu bidang usaha tertentu atau tujuan tertentu sehingga dapat memperoleh hasil yang lebih baik. Pendapat senada disampaikan Andrew (2009) bahwa kemitraan bisnis merupakan kerjasama terpadu antara dua belah pihak atau lebih, secara serasi, sinergis, terpadu, sistematis dan memiliki tujuan untuk menyatukan potensi bisnis dalam menghasilkan keuntungan yang optimal.

Dunia kerja merupakan sasaran akhir dari para lulusan SMK untuk bekerja sesuai dengan kompetensi keahliannya di bidang tertentu. Sebagai calon tenaga kerja, lulusan SMK tentunya telah mengenal dunia kerja semenjak siswa melakukan kegiatan praktik kerja industri (prakerin). Prakerin merupakan implementasi dari konsep pendidikan sistem ganda (*dual system*) yang telah diterapkan di SMK sejak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dijabat oleh Wardiman Djojonegoro (1998). Prakerin dimaknai sebagai rangkaian konsep pendidikan kejuruan yang memadukan program belajar mengajar di sekolah dan program penguasaan keahlian yang diperoleh melalui kerja langsung di DU/DI. Oleh karena itu, prakerin dilakukan secara sistematis dan terarah untuk mencapai tingkat keahlian profesional. Sementara itu, Oemar Hamalik (2007) mendefinisikan prakerin sebagai modal pelatihan yang diselenggarakan di lapangan kerja, bertujuan untuk memberikan kecakapan yang diperlukan dalam keahlian tertentu, sesuai tuntutan kemampuan bagi pekerjaan.

Prakerin diasumsikan dapat meningkatkan pengembangan diri (*personality development*). Hal ini sebagaimana dikatakan Rainer (1992) dalam Ade Mulyadi (2014) bahwa *“Learning in a practical-working environment promotes personal development – in a particular, the ability to work independently, self-confidence, good social behavior, a good general attitude towards work and motivation”*.

Pernyataan di atas, dapat dikatakan bahwa prakerin dapat meningkatkan kemandirian dalam bekerja, percaya diri, sikap yang baik, dan meningkatkan motivasi dalam bekerja. Praktik kerja industri

menjadi salah satu program pendukung dalam upaya menciptakan tenaga kerja yang profesional, yaitu tenaga kerja yang memiliki tingkat pengetahuan, keterampilan dan etos kerja yang dibutuhkan industri. Pemerintah ingin mewujudkan keterkaitan dan kesepadanan (*link and match*) antara institusi pendidikan dengan dunia industri.

Dari beberapa pengertian di atas, disimpulkan bahwa prakerin merupakan proses memadukan pendidikan yang diperoleh melalui kegiatan belajar mengajar di sekolah dan pengalaman praktik di industri untuk mendapatkan kompetensi keahlian sesuai dengan paket keahlian yang dipelajari dan meningkatkan kemandirian bekerja, percaya diri, motivasi kerja, dan bersosialisasi dalam DU/DI sehingga terjadi keterkaitan dan kesepadanan (*link and match*) antara apa yang dibutuhkan industri dengan apa yang seharusnya dipraktikkan di sekolah.

Dalam kurikulum SMK, praktik kerja industri (prakerin) atau praktek kerja lapangan (PKL) mempunyai penyebutan atau istilah yang berbeda sesuai dengan zamannya, namun esensinya tetap sama. Wardiman Djojonegoro (1998) berpendapat bahwa pelaksanaan prakerin bagi siswa bertujuan untuk 1) menghasilkan tenaga kerja yang profesional yaitu tenaga kerja yang memiliki tingkat pengetahuan, keterampilan dan etos kerja yang sesuai dengan tuntutan dunia kerja; 2) meningkatkan keterkaitan dan kesepadanan (*link and match*) antara lembaga pendidikan dan dunia industri; 3) meningkatkan efisiensi penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan kerja yang berkualitas dengan memanfaatkan sumber daya pelatihan di dunia industri; dan 4) memberikan pengakuan dan penghargaan terhadap pengalaman kerja sebagai bagian dari proses pendidikan

Sebagai bagian integral dari program pelatihan, prakerin perlu dilaksanakan oleh siswa SMK karena mengandung beberapa manfaat, baik untuk siswa, pihak sekolah, industri maupun pemerintah. Menurut Oemar Hamalik (2007), manfaat Prakerin sebagai berikut. *Pertama*, memberikan kesempatan siswa untuk melatih keterampilan dan

meningkatkan kompetensi keahlian dalam situasi yang aktual, sehingga siswa dapat menerapkan teori dan konsep yang telah dipelajari sebelumnya dalam kegiatan belajar mengajar di sekolah. *Kedua*, memberikan pengalaman praktis kepada siswa sehingga memperkaya pengetahuan yang dimiliki; *Ketiga*, memberikan kesempatan untuk memecahkan berbagai masalah di lapangan dengan mendayagunakan kemampuan yang dimilikinya. *Keempat*, mendekatkan dan menjembatani penyiapan siswa untuk menghadapi kondisi dunia kerja sesuai dengan kompetensi paket keahliannya.

Salah satu upaya Pemerintah dalam meningkatkan kualitas lulusan SMK yaitu mengoptimalkan pembelajaran teori dan praktik dasar di sekolah dan pembelajaran praktik kejuruan di DU/DI (*dual system*) atau pendidikan sistem ganda (*link and match*). Berdasarkan Keputusan Direktur Pembinaan SMK, bagi siswa SMK wajib mengikuti praktik kerja lapangan (PKL) atau praktik kerja industri (prakerin). Pada hakikatnya prakerin merupakan suatu program praktik/latihan yang diselenggarakan di lapangan (DU/DI) dalam rangkaian kegiatan pembelajaran sebagai bagian integral program pendidikan. Dengan demikian, prakerin diyakini memiliki korelasi positif terhadap kesiapan kerja lulusan SMK. Filosofi *link and match* inilah yang oleh Presiden Joko Widodo sebagai dasar revitalisasi pendidikan kejuruan atau pendidikan vokasi di Indonesia (Inpres No.9/2016).

Oemar Hamalik (2007) mendefinisikan prakerin sebagai model pelatihan yang diselenggarakan di lapangan kerja, bertujuan untuk memberikan kecakapan yang diperlukan dalam keahlian tertentu, sesuai tuntutan yang dipersyaratkan dalam pekerjaan tertentu. Sementara itu, menurut Teck Heang Lee (2012) bahwa pentingnya pengalaman kerja industri dalam membentuk siswa untuk siap bekerja tercermin dari partisipasi siswa dalam program magang. Oleh karena itu, kompetensi keahlian yang diperoleh di sekolah dapat ditingkatkan sebagai bekal kesiapan kerja sekaligus memiliki a) sikap percaya diri untuk bekerja; b)

motivasi kerja, dan c) kemampuan untuk bersosialisasi di lingkungan kerjanya. Dengan kata lain, prakerin merupakan kegiatan kurikuler yang memberi kesempatan kepada siswa SMK untuk beradaptasi dengan dunia kerja yang sesungguhnya, sehingga mereka memiliki kesiapan kerja lebih memadai setelah mereka lulus. Hal tersebut senada dengan pendapat Ade Mulyadi (2014) bahwa pelaksanaan prakerin dapat meningkatkan pengembangan diri (*personality development*).

Sehubungan dengan itu, Direktorat Pembinaan SMK Ditjen Dikdasmen menetapkan prakerin/praktek kerja lapangan menjadi salah satu program pendukung penyelenggaraan SMK dalam upaya menghasilkan calon tenaga kerja yang berkualitas (Dit. PSMK, 2016b). Dari waktu ke waktu, Dit. PSMK terus menyempurnakan program pelaksanaan praktik kerja lapangan/prakerin agar keterkaitan dan kesepadanan pendidikan antara SMK dan DU/DI dapat terwujud sesuai tujuan yang ditetapkan.

Menurut Nurcahyono (2015) praktik kerja industri merupakan suatu bentuk penyelenggaraan pendidikan keahlian profesional, yang memadukan secara sistematis dan sinkron pendidikan di sekolah dan program penguasaan keahlian yang diperoleh melalui kegiatan bekerja secara langsung di dunia kerja, terarah untuk mencapai suatu tingkat profesional tertentu. Lebih lanjut, Teck Heang Lee (2012) berpendapat bahwa pentingnya pengalaman kerja dalam membentuk siswa untuk siap bekerja tercermin dari partisipasi siswa dalam program prakerin.

Pendapat lainnya Aminuddin dan M. Najib (2013) mengemukakan bahwa kemampuan siswa dalam memenuhi persyaratan pekerjaan dalam hal ini kesiapan kerja tergantung pada beberapa faktor seperti pelatihan industri. Pengalaman dimaksud penting untuk mengembangkan siswa dalam keseimbangan berdasarkan kebutuhan pekerjaan untuk mencegah hambatan dalam melakukan pekerjaan. Pengalaman yang diperoleh pada saat melakukan praktik kerja lapangan akan menjadikan siswa lebih matang dalam mempersiapkan diri untuk bekerja karena pengalaman praktik kerja industri memberikan bekal pengalaman nyata pekerjaan yang dibutuhkan di dunia kerja.

Kemampuan siswa dalam memenuhi persyaratan pekerjaan dalam hal ini kesiapan kerja tergantung pada beberapa faktor seperti pelatihan industri, hal tersebut penting untuk mengembangkan siswa dalam keseimbangan berdasarkan kebutuhan pekerjaan untuk mencegah hambatan. Pengalaman yang diperoleh pada saat melakukan praktik kerja lapangan akan menjadikan siswa lebih matang dalam mempersiapkan diri untuk bekerja karena pengalaman praktik kerja lapangan memberikan bekal pekerjaan yang dibutuhkan di dunia kerja.

Ditinjau dari aspek manfaat, Yuli (2012) berpendapat bahwa penyelenggaraan prakerin, memiliki manfaat bagi berbagai pihak, yaitu siswa, sekolah, dan DU/DI. Bagi siswa manfaat prakerin yaitu 1) hasil belajar peserta prakerin akan lebih bermakna, karena setelah tamat akan betul-betul memiliki keahlian yang mengarah profesional sebagai bekal pengembangan diri secara berkelanjutan; 2) keahlian yang profesional yang diperoleh dapat meningkatkan harga diri dan rasa percaya diri, sehingga akan mendorong profesionalisme dalam bekerja. Bagi sekolah (SMK) prakerin bermanfaat untuk 1) tujuan pendidikan untuk menciptakan keahlian profesional bagi peserta didik dapat tercapai; dan 2) memberikan kepuasan bagi penyelenggara pendidikan sekolah, karena tamatannya terjamin memperoleh manfaat baik di dunia kerja, maupun di masyarakat. Bagi DU/DI manfaat prakerin yaitu 1) perusahaan dapat mengenal kualitas peserta prakerin yang belajar di industrinya; 2) peserta prakerin merupakan calon tenaga kerja yang memberikan keuntungan bagi industri; 3) perusahaan dapat memberi tugas kepada peserta prakerin untuk kepentingan perusahaan sesuai kompetensi yang dimiliki; 4) peserta prakerin lebih mudah diatur dalam hal disiplin berupa kepatuhan terhadap aturan perusahaan; dan 5) memberikan kepuasan kepada industri karena rekognisi turut serta menentukan masa depan siswa melalui prakerin.

Pendapat Yuli tersebut sejalan dengan ketetapan Direktorat PSMK

(2016b) yang merumuskan beberapa manfaat prakerin/PKL bagi berbagai pihak sebagai berikut. Prakerin bagi siswa, bermanfaat untuk 1) mengaplikasikan dan meningkatkan ilmu yang telah diperoleh di sekolah; 2) menambah wawasan dunia kerja, iklim kerja positif yang berorientasi pada peduli mutu proses dan hasil kerja; 3) menambah dan meningkatkan kompetensi serta dapat menanamkan etos kerja yang tinggi; 4) memiliki kemampuan produktif sesuai dengan kompetensi keahlian yang dipelajari di tempat PKL/prakerin; dan 5) mengembangkan kemampuannya sesuai dengan bimbingan/arahan pembimbing industri.

Idealnya, dalam penyelenggaraannya prakerin harus direncanakan bersama oleh SMK dan dunia industri, khususnya dalam program pendidikan dan pelatihan kejuruan yang memfokuskan pada 1) standar kompetensi yang mengacu pada SKKNI; 2) standar penilaian dan sertifikasi; 3) kelembagaan; dan 4) nilai tambah dan insentif. Dengan demikian, industri dapat berperan sejak dari proses perencanaan pelaksanaan termasuk kompetensi siswa yang dibutuhkan, program dan kapasitasnya serta pembimbingan yang akan diberikan hingga pada tahap evaluasi dan sertifikasi hasil prakerin.

Beberapa hasil penelitian tentang pelaksanaan prakerin menunjukkan bahwa (1) pelaksanaan program prakerin di SMK kompetensi keahlian penyuluhan pertanian sangat relevan dengan kebutuhan siswa, sekolah, dan dunia kerja. Namun pada konteks ini pengetahuan siswa tentang dunia kerja masih kurang; (2) menurut siswa, pembimbing internal, dan pembimbing eksternal persiapan pelaksanaan prakerin termasuk baik. Dalam hal ini, kekurangan pada input yaitu tingginya biaya prakerin, media penyuluhan yang masih sederhana, dan materi yang belum disampaikan di sekolah; (3) kinerja siswa, pembimbing internal, dan pembimbing eksternal dalam proses pelaksanaan prakerin termasuk sangat baik; (4) manfaat prakerin bagi siswa, bagi sekolah dan dunia kerja termasuk sangat baik. Hasil evaluasi tersebut secara keseluruhan dilihat

dari aspek *Context*, *Input*, *Process* dan *Product* termasuk dalam kategori sangat baik (Yuli, 2012). Selanjutnya, hasil penelitiannya Mardiyah (2013) menyatakan bahwa aspek 1) konteks berdasarkan responden guru, siswa dan instruktur termasuk dalam kategori relevan; 2) input berdasarkan responden guru dan siswa termasuk dalam kategori kurang baik, sedangkan berdasarkan responden, instruktur masuk dalam kategori baik; 3) proses berdasarkan responden guru dan instruktur masuk dalam kategori sangat baik, dan berdasarkan responden siswa masuk dalam kategori baik; 4) produk berdasarkan responden guru, siswa dan instruktur masuk dalam kategori sangat baik; dan 5) secara umum kelemahan prakerin yaitu kurangnya keterlibatan siswa dan instruktur dalam perencanaan program, kurangnya kontrol sekolah dalam monitoring guru pembimbing ke lapangan, dan kurangnya kesempatan bagi siswa untuk menguasai kompetensi yang diperoleh dari industri.

E. PRAKTIK KERJA INDUSTRI

Praktek kerja industri (prakerin) mempunyai penyebutan atau istilah yang berbeda pada kurikulum sesuai dengan zamannya, namun esensinya memiliki pengertian yang sama. Misalnya, kurikulum 2013 kegiatan magang di industri disebut praktek kerja industri atau Praktek Kerja Lapangan (PKL), sedangkan kurikulum 2006 dikenal dengan Pendidikan Sistem Ganda (PSG).

Prakerin, sejatinya merupakan program pembelajaran siswa yang dilaksanakan secara khusus dengan mengambil waktu tertentu dan bekerjasama dengan pihak industri/pemerintah di luar sistem sekolah dalam rangka meningkatkan kompetensi siswa. Tempat pelaksanaan prakerin bisa jadi di Industri atau perusahaan (DU/DI) baik di perusahaan swasta atau instansi pemerintahan (pusat/daerah). PKL pada kurikulum 2013 disusun bersama antara sekolah dan pihak terkait (institusi pasangan/mitra kerja) dalam rangka memenuhi kebutuhan kompetensi peserta didik yang

kompeten dan handal, sekaligus merupakan wahana berkontribusi bagi dunia kerja (DU/DI) terhadap upaya pengembangan SDM melalui pendidikan SMK.

Prakerin juga merupakan kegiatan kurikuler yang harus dilakukan oleh siswa SMK sebagai bentuk pendidikan dan pelatihan untuk menerapkan teori yang diperoleh dalam pembelajaran di sekolah, sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan agar memperoleh pengalaman dan keterampilan lapangan di industri/perusahaan. Adanya Prakerin merupakan hal yang ideal, karena siswa akan lebih mengenal masalah praktis berkenaan dengan kompetensi keahliannya. Oleh karena itu, pemilihan tempat prakerin harus sesuai dengan kompetensi keahlian yang dipelajari siswa.

Pemberlakuan prakerin pada SMK merupakan upaya Departemen Pendidikan Nasional dalam upaya meningkatkan relevansi pendidikan dengan dunia kerja. Prakerin diberlakukan mulai tahun 2006/2007, sebagai penerapan kebijakan Depdiknas mengenai penerapan program keterkaitan dan kesepadanan atau lebih dikenal dengan *link and match* (Puspitasari, D.I, 2010). Sebelum ada sistem prakerin diberlakukan di SMK, sebenarnya sudah ada praktik kerja nyata (PKN) yang kemudian diubah dengan istilah praktik kerja lapangan (PKL) yang kemudian diubah lagi dengan istilah pendidikan sistem ganda (PSG) yang kemudian diubah lagi dengan istilah praktik industri (PI), Dengan demikian, sistem praktik kerja industri (Prakerin) diharapkan dapat mencapai hasil praktik yang optimal.

Maksud pelaksanaan prakerin sesuai dengan konsep prakerin SMK di Indonesia, yaitu suatu bentuk penyelenggaraan pendidikan keahlian profesional yang memadukan secara sistematis dan sinkron program pendidikan dari sekolah dengan program penguasaan keahlian yang langsung diperoleh dari bekerja di dunia industri, dimaksudkan untuk mencapai tingkat keahlian profesional.

Manfaat lainnya yaitu untuk membekali siswa dengan pengalaman

kerja yang nyata sesuai dengan program keahlian yang dipilihnya. Dalam pelaksanaan pendidikan yang berlaku di Indonesia harus mempertimbangkan nilai kemanfaatan bagi lingkungan pendidikan khususnya bagi peserta didik. Untuk menunjang tujuan dari pendidikan itu sendiri maka harus ada landasan hukum yang menjadi acuan atau patokan dalam pelaksanaan pendidikan.

Tujuan prakerin untuk menambah pengetahuan baru tentang seluk beluk kegiatan industri sebagai wahana untuk meningkatkan keterampilan siswa berdasarkan ilmu pengetahuan yang telah diperoleh sebelumnya di sekolah serta membentuk kesiapan mental dalam menghadapi pasar kerja. Tujuan prakerin juga untuk: memperkokoh *link and match* antara sekolah dengan dunia industri/ dunia usaha; menghasilkan tenaga kerja yang memiliki keahlian profesional (dengan tingkat pengetahuan, keterampilan dan etos kerja yang sesuai dengan tuntutan lapangan pekerjaan); meningkatkan efisiensi proses pendidikan dan pelatihan tenaga kerja yang berkualitas; memberikan pengakuan dan penghargaan terhadap pengalaman kerja sebagai sebagian dari proses pendidikan (Puspitasari, 2010).

Prakerin SMK yang dilaksanakan di berbagai industri dan instansi pemerintah telah direncanakan sesuai dengan kebutuhan kompetensi siswa. Dasar pelaksanaan prakerin ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 323/U/1997 tentang penyelenggaraan Prakerin SMK, Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah dan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 080/U/1993 tentang Kurikulum SMK.

Pelaksanaan prakerin di SMK merupakan perwujudan dari kebijakan "*link and match*", yaitu proses pembelajaran yang dilaksanakan di dua tempat, yakni di sekolah dan di dunia usaha/industri. Upaya ini dilaksanakan dalam rangka peningkatan mutu tamatan SMK untuk mencapai tujuan relevansi pendidikan sebagai tuntutan kebutuhan tenaga kerja.

Harapan utama dari kegiatan penyelenggaraan prakerin ini disamping keahlian profesional siswa meningkat sesuai dengan tuntutan kebutuhan dunia usaha/industri, juga siswa akan memiliki etos kerja hasil pekerjaan yang berkualitas, disiplin waktu dan kerajinan dalam bekerja serta memiliki wawasan di dunia industri yang luas.

Tujuan Praktik Kerja Lapangan (PKL) antara lain sebagai berikut memberikan pengalaman kerja langsung (*real*) kepada peserta didik dalam rangka menanamkan (*internalize*) iklim kerja positif yang berorientasi pada peduli mutu proses dan hasil kerja. Memberikan bekal etos kerja yang tinggi bagi peserta didik untuk memasuki dunia kerja dalam menghadapi tuntutan pasar kerja global.

Model pelaksanaan prakerin umumnya bervariasi sesuai dengan aturan sekolah masing-masing. Sebelum pelaksanaan prakerin, sekolah menyusun panduan prakerin yang diberikan kepada para siswa sebagai pedoman pelaksanaan prakerin. Penyusunan pedoman pelaksanaan prakerin ini mengacu pada Permendikbud Nomor 60 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa PKL dapat dilaksanakan; (i) menggunakan **sistem blok**, selama **setengah semester** (sekitar **3 bulan**); (ii) menggunakan sistem **semi blok** dengan cara masuk **3 hari dalam seminggu, setiap hari 8 jam selama 1 semester**. Pelaksanaan pembelajaran mata pelajaran kelompok A dan B dapat dilakukan di satuan pendidikan dan/atau industri (terintegrasi dengan Praktik Kerja Lapangan) dengan Portofolio sebagai instrumen utama penilaian.

PKL dengan sistem semi blok, peserta didik melaksanakan PKL selama 3 hari per minggu di Institusi Pasangan/Industri dan melaksanakan pembelajaran di sekolah selama 3 hari. Untuk memenuhi pemerataan jumlah jam di Institusi Pasangan/Industri yang memiliki jam kerja kurang dari 6 hari per minggu maka sekolah perlu mengatur sirkulasi/perputaran kelompok peserta PKL. Jika pembelajaran mata pelajaran kelompok A dan B tidak terintegrasi dalam kegiatan PKL maka pembelajaran mata pelajaran

kelompok A dan B tersebut dilakukan di satuan pendidikan (setelah peserta didik kembali dari kegiatan PKL di Institusi pasangan/industri) dengan jumlah jam setara dengan jumlah jam satu semester.

Berdasarkan Permendikbud Nomor 60 Tahun 2014, waktu pelaksanaan pembelajaran di Institusi Pasangan/Industri dapat dilakukan pada kelas XI atau kelas XII. Untuk menjamin keterlaksanaan program PKL maka dapat dilakukan alternatif pengaturan sebagai berikut:

Jika program PKL akan dilaksanakan pada semester 4 kelas XI, sekolah harus menata ulang topik-topik pembelajaran pada semester 4 dan semester 5, agar pelaksanaan PKL tidak mengurangi waktu untuk pembelajaran materi pada semester 4 sehingga sebagian materi pada semester 4 tersebut dapat ditarik ke semester 5.

Demikian juga sebagaimana pada butir 1) di atas, jika program PKL akan dilaksanakan pada semester 5 kelas XII, sekolah harus melakukan pengaturan yang sama untuk materi pembelajaran pada kedua semester tersebut.

Kebijakan UN yang tidak lagi menjadi salah satu faktor penentu kelulusan, maka program PKL dapat dilaksanakan sebelum UN pada semester 7 secara blok penuh selama 3 bulan (12 minggu) bagi SMK Program 4 Tahun.

F. UJI KOMPETENSI/SERTIFIKASI

Mengacu pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 61 ayat (3) dinyatakan bahwa ‘sertifikasi kompetensi’ diberikan oleh penyelenggara pendidikan dan lembaga pelatihan kepada peserta didik dan warga masyarakat sebagai pengakuan terhadap kompetensi untuk melakukan pekerjaan tertentu setelah lulus uji kompetensi yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi atau lembaga sertifikasi. Menghadapi Era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) Tahun 2016, beberapa SMK telah dipersiapkan untuk mendapatkan sertifikasi taraf ASEAN seperti di wilayah Dinas

Pendidikan Provinsi Jawa Timur sejak tahun 2005 telah mensosialisasikan rencana sertifikasi siswa SMK sesuai dengan bidang keahliannya. Bahkan untuk bidang keahlian “seni” direncanakan peserta didik SMA pun kemungkinan akan dilakukan sertifikasi. Sebagai contoh, kesiapan tenaga kerja (SDM) di Jawa Timur dalam cetak biru AEC telah disepakati jaminan kebebasan mobilitas bagi tenaga kerja terampil di kawasan ASEAN melalui serangkaian tahapan yang disepakati dalam *ASEAN Framework Agreement*.

BAB IV

BEBERAPA KONDISI EKSISTING PENYELENGGARAAN SMK PARIWISATA KOMPETENSI KEAHLIAN TATA BOGA

A. KESESUAIAN KURIKULUM

1. **P**engadopsian SKKNI dalam Perencanaan dan Pelaksanaan Pembelajaran
SKKNI untuk bidang Pariwisata, khususnya Kompetensi Keahlian Tata Boga, sedang direvisi/diperbaharui. Revisi dilakukan karena menyesuaikan dengan hasil revisi CATC (*Common Asean Tourism Curriculum*) tahun 2018, yang dijadikan salah satu acuan dalam penyusunan SKKNI Level II dibidang Pariwisata. Saat ini revisi sudah pada tahap finalisasi dan rencananya akan diberlakukan tahun ajaran 2020. Hingga saat ini SKKNI yang digunakan masih SKKNI Level II untuk Kompetensi Keahlian Tata Boga, yang disahkan bersama oleh BNSP dan Ditjen Dikdasmen Kemendikbud pada tahun 2017.
2. 15 unit kompetensi Umum/Inti, dan 32 unit kompetensi pilihan yang terdapat dalam SKKNI level II untuk Kompetensi Keahlian Tata Boga telah diadopsi ke dalam Kurikulum yang digunakan pada penyelenggaraan pendidikan.
3. Kompetensi keahlian Tata Boga.yang mengadopsi SKKNI hasil revisi 2019 (mengadopsi CATC) diasumsikan dan diharapkan akan tercapai

manakala di sekolah diberikan praktik dasar kejuruan ditunjang oleh sarana prasarana dan guru produktif yang berkompeten dan dilanjutkan dengan prakerin di DUDI yang tepat sasaran. Artinya, terjadi *link and match* antara praktik dasar di sekolah dan praktik kerja industri di DU/DI.

4. Pengadopsian 47 unit kompetensi umum/inti dan pilihan tersebut tersebar pada berbagai KI/KD dari setiap mata pelajaran kelompok C2 (Dasar Program Keahlian), dan mata pelajaran kelompok C3 (Kompetensi Keahlian).

Ketercapaian kompetensi yang diadopsi dari SKKNI Level II tahun 2018 terkait kompetensi yang ada pada kurikulum seharusnya perlu dilakukan pemisahan, untuk kompetensi dasar sebaiknya diajarkan pada kelas X dan kompetensi yang terspesialisasi dilakukan pada kelas XI dan XII.

5. Pengadopsian SKKNI Level II Tata Boga hasil revisi (2018), yang sudah mengadopsi CATC:
 - a. Sudah mencantumkan jabatan-jabatan yang dapat diemban oleh pemegang sertifikat, yaitu *Kitchen Hand, Butcher, Baker, Commis Pastry, Busboy, Trainee Waiter, Trainee Server, dan Restaurant and Bar Service Agent*.
 - b. Pengurangan unit kompetensi untuk pencapaian kualifikasi (sertifikasi) level II dari 47 menjadi 38.
 - c. Klasterisasi berkurang dari 6 menjadi 5, namun jumlah unit kompetensi untuk keseluruhan klaster meningkat dari 59 menjadi 75.
 - d. 38 unit kompetensi (Umum/Inti dan Pilihan yang terdapat dalam SKKNI level II Tata Boga Tahun 2018 (CATC) telah diadopsi ke dalam struktur Kurikulum SMK Kompetensi Keahlian Tata Boga tahun 2018.

Beberapa butir KI/KD dalam struktur Kurikulum terlalu berat/dalam untuk tingkat SMK Tata Boga, karena teknologi peralatan yang ada

- di sekolah masih belum memadai, demikian juga dengan kompetensi gurunya. Contoh menganalisis dan memecahkan masalah-masalah kekurangan zat gizi, membuat hidangan *fusion food*, dan *food gastronomy molecular*.
6. Jenis-jenis makanan/masakan olahan yang dipelajari masih didominasi oleh jenis-jenis makanan kontinental dan oriental.
 7. Sekolah menginginkan diperbolehkan melakukan pembelajaran dengan metode *team teaching*. Namun di sebagian daerah (provinsi Jatim) mengajar dengan metode *team teaching* tidak dapat diakui (dimasukan) dalam penghitungan jam mengajar minimal.
 8. Pemahaman pengawas masih ada yang tidak sesuai dengan upayaantisipasi/penyesuaian yang dilakukan sekolah/guru dalam upaya penyelarasan pembelajaran.
 9. Masih banyak terjadi ketidaksesuaian dalam pengadaan (*drooping*) peralatan praktik ke sekolah-sekolah, dari yang diajukan semula yang sudah sesuai dengan *need assessment* yang dilakukan sekolah
 10. Sejak diberlakukan PPDB berbasis *online* SMK lebih banyak dirugikan, karena sekolah tidak dapat lagi melakukan seleksi calon siswanya berdasarkan persyaratan khusus yang sebenarnya sangat diperlukan seperti postur tubuh, *attitude*, dan penelusuran minat dan bakat.
 11. Sekolah cenderung menginginkan pengelolaan dengan konsep BLUD, agar memiliki keleluasaan dalam mengelola dan mengembangkan unit-unit usahanya (*Teaching Factory*).
 12. Tidak perlu dilakukan penambahan KI-KD, apalagi Mata Pelajaran baru, dalam struktur Kurikulum Kompetensi Keahlian Tata Boga, karena kompetensi-kompetensi yang dibutuhkan DU/DI sebagaimana tertuang dalam SKKNI level II (untuk Kompetensi Keahlian Tata Boga) sudah diadopsi ke dalam Kurikulum.
 13. Sebaliknya, diperlukan pengurangan beberapa unit kompetensi dalam SKKNI, dan beberapa butir KI/KD dalam struktur Kurikulum. Unit **kompetensi mengoperasikan cellar (D1.HBS.CL5,05)**,

menyiapkan dan menyajikan *gateaux* dan *torten* (D1.HPA. CL4.07) pada SKKNI sebaiknya dihilangkan/dicabut, karena untuk level II (SMK) dinilai masih terlalu tinggi, ditinjau dari usia siswa SMK yang dinilai belum matang (dewasa) khawatir pengetahuan tentang minuman beralkohol (*anggur/wine*) akan disalah gunakan, dan hanya hotel-hotel tertentu (kelas tertentu) saja yang menyediakan layanan minuman beralkohol.

14. Pada **Mata Pelajaran Pengolahan dan Penyajian Makanan (C3)**, kompetensi mengevaluasi dan membuat hidangan *fusion food* (KD 24), dan kompetensi menerapkan dan membuat *food gastronomy molecular* (KD 25) dihilangkan saja karena tidak bisa diaplikasikan di sekolah, disebabkan prosesnya sudah merupakan tingkatan produksi besar dengan menggunakan teknologi rumit, peralatan yang ada (di sekolah) umumnya tidak memadai sehingga guru-gurunya juga tidak memahami.
15. Kompetensi-kompetensi yang diajarkan pada **Mata Pelajaran Ilmu Gizi (C2)** tidak usah terlalu mendalam, seperti menganalisis dan memecahkan masalah kekurangan zat gizi sumber energi (KD 1), zat gizi sumber zat pembangun (KD 2), dan zat gizi sumber zat pengatur (KD 3). Siswa SMK tidak perlu terlalu dalam mempelajarinya seperti itu, tetapi cukup pada tingkatan membuat dan menyajikan makanan/minuman sesuai dengan kebutuhan gizi ideal berdasarkan daftar komposisi bahan makanan (DKBM) dan daftar bahan makanan penukar (DBMP).
16. Jenis-jenis makanan/masakan olahan yang dipelajari sebaiknya mulai diperbanyak dengan jenis makanan/masakan lokal atau khas Indonesia. Hal itu dikarenakan tren permintaan terhadap makanan/masakan khas lokal dari tamu-tamu hotel maupun *banquet* pada pesta-pesta meningkat. Sementara umumnya lulusan SMK Tata Boga hanya menguasai pengolahan makanan/masakan *western* dan *oriental*, karena memang jenis-jenis makanan/masakan itu yang mereka pelajari selama ini.

17. Kepemilikan sarana prasarana praktik masih terdapat ketidakcukupan dan berbagai ketidaksesuaian. Ketidakcukupan atau kekurangan sarana prasarana praktik masih dihadapi oleh sebagian besar SMK Tata Boga. Bahkan pada SMK Tata Boga yang sudah memadai sarana prasarana praktiknya masih banyak ditemukan ketidaksesuaian dengan kebutuhan proses pembelajaran untuk menghasilkan lulusan dengan kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan DU/DI. Misalnya dalam hal ukuran, teknologi, dan disain peralatan dan dapur-dapur (*kitchens*) praktik. Sekalipun terdapat pendapat wajar jika sarpras SMK mendekati sarpras yang ada di DU/DI, namun permasalahannya alat dimaksud berkapasitas besar, misalnya mixer pengocok telur kurang tepat jika dimiliki oleh SMK karena kapasitas praktik siswa tidak sepadan dengan produk yang dihasilkan seperti pelayanan di hotel/restoran yang rata-rata melayani konsumen dalam partai besar.
18. Terkait dengan kompetensi K3 (kesehatan, keselamatan, dan keamanan), untuk Tata Boga perlu lebih ditekankan pada:
 - a. penguasaan kompetensi dalam hal keamanan pangan, dalam hal ini tentang HACCP (*Hazard Analysis Critical Control Point*), dan ISO 22000 beserta turunannya perlu ditambah lebih mendalam. Kalangan DU/DI menyatakan bahwa tuntutan konsumen (pasar) saat ini sudah “melampaui” kemampuan industri, di mana mereka menginginkan adanya kepraktisan namun tetap mengedepankan keamanan dalam menggunakan/ mengkonsumsi produk.
 - b. Kompetensi melakukan *first aid* (pertolongan pertama dalam kecelakaan kerja) oleh yang telah bersertifikat. Hal ini eksplisit tercantum dalam CATC yang dijadikan salah satu acuan dalam penyusunan SKKNI Level II untuk Kompetensi Keahlian Tata Boga. Di tingkat sekolah seharusnya terdapat setidaknya satu orang guru yang bersertifikat dalam melakukan *first aid*. Dalam beberapa kasus di SMK Tata Boga masih ditemukan

beberapa siswa yang kurang disiplin dalam mentaati peraturan K3 seperti sikap dan perilaku ber K3 yang kurang taat asas seperti menggunakan alat pelindung diri (APD): sarung tangan mengenakan masker penutup kepala dan mulut maupun apron/ celemek kain pelindung badan. Di samping itu, sekalipun di setiap ruangan praktik tersedia APAR (alat pemadam api ringan) namun siswa tidak pernah tau bagaimana cara menggunakannya jika terjadi kebakaran kecil-kecilan. Jangankan siswa, guru pun tidak tahu bagaimana cara menggunakan alat tersebut karena menurutnya ada petugas khusus (dari pemda/perusahaan) yang secara rutin memeriksanya. Menurut petugas, sebenarnya cara merawat APAR sangat mudah yaitu diawali dengan menimbang APAR kemudian dikocok-kocok untuk mengetahui apakah masih cukup berisi gas atau sudah kosong/kering. Jika isi gas sudah berkurang maka cukup melaporkan kepada petugas untuk dilakukan pengisian gas secara berulang. Selain itu sikap dan perilaku K3 siswa juga kurang terhadap sanitasi pembuangan limbah bengkel kerja/dapur tempat mengolah makanan serta kebersihan lantai tempat praktik.

19. Siswa juga perlu diperkuat *softskills*-nya dalam hal disiplin dan etos kerja. Hal ini penting untuk menghadapi perkembangan DU/DI yang semakin cepat mengaplikasikan kemajuan iptek, dan semakin kompetitif dalam rangka memenuhi tuntutan standar ISO tertentu.

B. PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBELAJARAN

Walaupun tidak semua sekolah sampel memperoleh kesempatan yang sama (teori dan praktik) pada salah satu kelompok mata pelajaran produktif (C3) diperoleh simpulan bahwa:

1. Dalam KBM siswa masih dibebani untuk membeli bahan dasar praktik dengan pertimbangan bahwa bantuan dana operasional praktik di sekolah tidak mencukupi.

2. Sekolah merasa masih memiliki keterbatasan sarana praktik terutama alat bantu/pelengkap praktik yang memadai sesuai dengan jumlah siswa.
3. KBM di SMKN 6 Palembang, guru:
 - a. mampu melakukan KBM sesuai dengan RPP yang disiapkan sekalipun demikian masih ditemukan evaluasi tertulis yang kurang lengkap (dari indikator yang dicantumkan dalam RPP) dan belum sempat dievaluasi secara klasikal;
 - b. mampu melakukan improvisasi pembelajaran dengan berbagai pendekatan yang berbeda-beda namun memberikan motivasi belajar siswa;
 - c. mengajar menggunakan media pembelajaran secara optimal (LCD, laptop, *screen*, *power point*, dan alat bantu mengajar lainnya seperti LKS;
 - d. mampu mencapai sebagian kompetensi yang ada di dalam RPP walaupun terkadang masih perlu pengayaan bagi beberapa siswa yang tertinggal untuk menyelesaikan tugas individu;
 - e. mengajar dengan dwi Bahasa (Indonesia dan Inggris) walaupun dibantu dengan *power point* dalam menerangkan sebuah konsep/teori.
4. KBM di SMK 3 Denpasar, guru:
 - a. Kurang memberikan improvisasi variasi metode mengajar selama pertemuan pertama (9 x 45 menit) sehingga siswa merasakan kebosanan dengan materi teori selama 9 jam. Hal ini terindikasi dengan: (a) seringnya guru menegur siswa karena suasana agak gaduh; (b) beberapa siswa ijin keluar masuk kelas (ke toilet dan keperluan lain)' (c) pemberian kesempatan kepada siswa untuk mengakses HP mencari data dan informasi dari berbagai sumber belajar, namun disalahgunakan siswa untuk kegiatan lainnya (akses medsos dll);
 - b. Pada saat pembelajaran siswa dibagi menjadi beberapa kelompok

kemudian masing-masing kelompok mendiskusikan tentang pokok-pokok bahasan dalam materi Sup dan Soto Indonesia. Pembelajaran menggunakan pendekatan saintifik, pada sintaks "menanya" disebutkan: "Siswa membuat pertanyaan tentang berbagai hal yang belum diketahui dan apa yang ingin diketahui lebih lanjut terkait alat dan bahan apa saja yang digunakan. Bagaimana langkah pengolahannya dan bagaimana kriteria hasilnya". Namun pada faktanya siswa menjelaskan hasil dari diskusi kelompok, dan hanya sebagian kecil yang membuat pertanyaan;

- c. Selama diskusi siswa diperkenankan menggunakan berbagai sumber belajar termasuk diantaranya menggunakan internet sebagai salah satu sumber materi. Hal ini merupakan penerapan metode diskusi (sesuai RPP); Selanjutnya masing-masing kelompok memaparkan hasil diskusi melalui paparan di depan kelas (presentasi) dengan menggunakan media berupa *powerpoint* (sesuai RPP). Setelah selesai paparan siswa dari kelompok lain diberikan kesempatan untuk bertanya dan kelompok yang paparan akan menjawab pertanyaan. Jika jawaban yang disampaikan belum menjawab pertanyaan dengan benar atau lengkap maka guru akan membantu memberikan penjelasan atau mengklarifikasi jika terdapat jawaban yang belum sesuai;
- d. Menggunakan model pembelajaran *Project Based Learning*, namun tidak nampak sintaks dari model tersebut diterapkan dalam pembelajaran saat observasi;
- e. Menjabarkan KI dan KD dalam indikator belum mencakup semua dimensi pengetahuan sebagaimana yang dituliskan dalam KI 3 bahwa dimensi pengetahuan yang akan dicapai adalah pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif. Dimensi pengetahuan faktual belum muncul dalam indikator.

- f. Penjabaran Indikator 4.14.1 dan 4.14.2 belum menggunakan Kata Kerja Operasional (KKO) yang spesifik seperti yang dituliskan pada KI 4 (**menggunakan alat**). KI 4 dan kompetensi dasarnya merupakan aspek psikomotorik/keterampilan namun KKO yang digunakan belum menunjukkan performa peserta didik dalam "Melaksanakan tugas spesifik dengan menggunakan alat, informasi, dan prosedur kerja" (KI 4);
- g. Secara umum sudah: (1) menguasai materi dan menggunakan metode yang sesuai namun penerapan pendekatan dan model pembelajaran masih kurang tepat; dan (2) menjabarkan KI dan KD ke dalam indikator yang ada, namun belum semua indikator yang dituliskan mewakili dimensi pengetahuan. Perlu kecermatan dalam menurunkan indikator dari KI dan KD sehingga tujuan pembelajaran yang tercantum di indikator dapat tercapai.

Dari hasil observasi KBM di dua SMK dapat disimpulkan bahwa pada umumnya guru mampu melaksanakan RPP hasil adopsi SKKNI Level II (2017) namun masih ditemukan guru mengajar kurang tuntas dalam membicarakan diskusi kelompok dan menyimpulkan hasil pembelajaran. Hal ini didukung oleh fakta bahwa rata-rata guru pengampu telah memiliki pengalaman mengajar minimal 20 tahun. Namun demikian adakalanya guru kurang memperoleh *updating* dan *upgrading* kompetensi keahlian dari aspek materi maupun metodologi serta keterbatasan sarana dan prasarana praktik di sekolah.

C. KUALIFIKASI PENDIDIK

1. Kualifikasi Guru (C2 dan C3) sudah baik, hanya tinggal 2,63 persen yang masih berpendidikan di bawah S1 (D3), dan 95,61 persen latar belakang (prodi) pendidikannya sesuai dengan mapel yang diampunya.
2. Guru kelompok Mapel C2 dan C3 sebagian besar sudah bermasa kerja minimal 20 tahun, dan sebagian lainnya masih berstatus honorer.

3. Masih ditemukan guru kelompok Mapel C2 dan C3 yang tidak mengerti proses di DU/DI.

D. KONDISI SARANA-PRASARANA PEDIDIKAN

1. Masih cukup banyak peralatan dan sarana pelatihan/praktik yang belum dimiliki sekolah atau rusak, dan teknologinya tertinggal dari yang digunakan oleh DU/DI.
2. Masih ditemukan *drooping* peralatan praktik yang tidak sesuai dengan usulan sekolah (seperti peralatan pengocok telur dalam kapasitas seperti industri/hotel).

E. PELAKSANAAN PRAKTEK KERJA INDUSTRI (PRAKERIN)

1. Pada dasarnya DU/DI sangat terbuka menerima siswa untuk melakukan prakerin, karena siswa yang melaksanakan prakerin tidak saja dapat membantu pekerjaan di perusahaan, tetapi juga dapat dijadikan calon-calon “prioritas” SDM perusahaan.
2. Sebelum pelaksanaan prakerin, siswa perlu diberikan pembekalan terhadap *job description* dalam DU/DI dan pembekalan tersebut perlu dilakukan selama 2 minggu sebelum prakerin.
3. Rentang waktu pelaksanaan prakerin umumnya selama 3 bulan, di mana setiap 2 minggu atau paling tidak setiap bulan (tergantung dengan kebijakan dan kesepakatan antara DU/DI dengan sekolah) dilakukan monitoring dan evaluasi (monev) bersama oleh DU/DI dan sekolah untuk mengukur/mengetahui kemajuan peningkatan kompetensi yang dicapai siswa. Untuk SMK 4 tahun, prakerin bervariasi dengan maksimal waktu pelaksanaan adalah 8 bulan.
4. Prakerin yang ideal dilaksanakan pada kelas XII semester akhir, namun untuk kompetensi kluster 1 dan 2 tetap dilaksanakan sesuai dengan jadwal
5. Pada akhir masa prakerin, siswa diwajibkan memaparkan laporan kegiatan prakerin di depan pimpinan unit tempat pelaksanaan

- prakerin bersama dengan perwakilan dari pimpinan sekolah, untuk kemudian diberikan hasil penilaian akhir. Hasil prakerin wajib dipresentasikan juga di sekolah dengan dihadiri oleh siswa yang lain, dengan tujuan untuk didiseminasikan juga agar siswa yang lain mendapatkan pengetahuan yang diperoleh oleh siswa yang melaksanakan prakerin.
6. Umumnya terjadi perubahan sikap dan perilaku siswa yang telah melakukan prakerin, mereka cenderung lebih disiplin, mungkin sekali hal ini dipengaruhi kultur/situasi di perusahaan tempat prakerin.
 7. Bagi sekolah atau Kompetensi Keahlian yang belum lama diselenggarakan (beroperasi), mitra DU/DI masih sedikit sehingga sekolah masih mengalami kesulitan untuk menentukan tempat prakerin siswa. Selain itu, pada saat prakerin biasanya belum semua tahapan proses produksi dapat dipraktikkan, sehingga siswa kebanyakan tidak sempat mempraktikkan apa yang dipelajarinya dalam kelompok mata pelajaran keahliannya (C3). Mengantisipasi kondisi tersebut, siswa dibimbing melakukan kegiatan produksi makanan (roti dan kue) dalam kelompok-kelompok kegiatan usaha siswa di sekolah, dalam upaya mendorong untuk mencoba peluang berwirausaha setelah lulus.

E. UJI KOMPETENSI/SERTIFIKASI

1. Terkait dengan mekanisme sertifikasi (skema sertifikasi), masih terdapat permasalahan skema KKNi untuk level 2 di mana untuk sektor (DU/DI) belum menyusun, seharusnya sesuai dengan Perpres 8 Tahun 2012 Kemendikbud dan sektor harus menyusun skema. Berdasarkan Inpres 9 Tahun 2016, penyusunan sertifikasi kompetensi harus mengikuti alur pengembangan SMK dengan mengacu SK Direktorat Jenderal SMK tentang *spectrum* dan untuk acuan standar Kementerian Pariwisata menggunakan aturan 2014 untuk MRA dan KKNi.

2. Dalam hal menguji 47 kompetensi tidak dapat dilakukan secara langsung, namun harus dilakukan secara bertahap yakni dalam 3 tahun selama proses pembelajaran. Terdapat 6 kluster yang harus dipelajari siswa di sekolah dan kompetensi tersebut harus seluruhnya tersertifikasi pada akhir pembelajaran.
3. Sertifikasi seharusnya dilakukan setiap tahun jangan ditumpuk pada akhir tahun belajar dengan menggunakan pendekatan *cluster*, hal ini seharusnya dapat dikoordinasikan dengan BNSP mengenai masa berlaku sertifikat, sebagai contoh bagi sertifikat yang diperoleh pada kelas X dapat diberikan masa berlaku sampai dengan 5 tahun sehingga setelah mereka lulus, sertifikat masih bisa berlaku dan dapat digunakan untuk melamar pekerjaan.
4. Idealnya, setiap siswa memperoleh 3 sertifikasi yang sesuai dengan kompetensi dan sesuai dengan skema.

B A B V

SIMPULAN DAN REKOMENDASI

A. SIMPULAN

Mengacu pada hasil dan pembahasan penelitian ini disimpulkan sebagai berikut. Kesesuaian Kurikulum SMK Pariwisata Kompetensi Keahlian (KK) Tata Boga dengan Kompetensi Dunia kerja ASEAN

1. SKKNI level II KK Tata Boga direncanakan akan diuji coba di 21 SMK Pariwisata KK Tata Boga mulai tahun ajaran 2020/2021. Penelitian ini menemukan bahwa 1 (satu) SMK telah merintis penetapan SKKNI level II sejak tahun ajaran 2016/2017.
2. Terdapat beberapa Kompetensi Dasar (KD)) yang dinilai terlalu tinggi untuk tingkat SMK diantaranya mengevaluasi *fusion food* (KD.3.24), menerapkan *food gastronomy molecular* (KD. 3.25), membuat hidangan *fusion food* (KD.4.24), membuat makanan dengan prinsip *food gastronomy molecular* (KD. 4.25), menganalisis zat gizi sumber energi yang diperlukan tubuh (KD. 4.1), menganalisis zat gizi sumber zat pembangun yang diperlukan tubuh (KD. 3.2), memecahkan masalah kekurangan zat gizi sumber zat pembangunan yang diperlukan tubuh (KD. 4.2), menganalisis zat gizi sumber pengatur yang diperlukan

tubuh (KD. 3.3) dan memecahkan masalah kekurangan zat gizi sumber zat pengatur yang diperlukan tubuh (KD 4,3).

3. Pelaksanaan Pembelajaran dan Kondisi Guru

- a. Guru kelompok mata pelajaran C2 dan C3 sebagian besar telah bermasa kerja minimal 20 tahun, sebagian lainnya masih honorer. (Gambar 1). Sebagian besar guru tetap SMK Pariwisata KK Tata Boga dalam dua sampai tiga tahun akan mengalami purna tugas. Terjadi kesenjangan status antara guru tetap dan guru honorer dikarenakan adanya moratorium pengangkatan guru.
- b. Guru kelompok mata pelajaran C2 dan C3 sebagian besar belum mempunyai pengalaman magang di industri sehingga mereka tidak menguasai proses pekerjaan yang berlangsung di DU/DI (Gambar 2)

4. Kondisi Sarana Prasarana Pembelajaran

Masih terjadi ketidaksesuaian dalam pengadaan (*droping*) peralatan praktik ke sekolah-sekolah dari yang diajukan semula sesuai dengan analisa kebutuhan (*need assessment*) sekolah. Hal seperti ini cukup menyulitkan sekolah karena peralatan yang telah terkirim tidak bisa dikembalikan

5. Pelaksanaan Praktik Kerja Industri (Prakerin) siswa

- a. Pelaksanaan prakerin umumnya antara 4 - 6 bulan, di mana setiap 2 minggu atau paling tidak setiap bulan, tergantung pada kebijakan dan kesepakatan antara DU/DI dengan sekolah,
- b. Selama prakerin dilakukan monitoring dan evaluasi (monev) bersama oleh DU/DI dan sekolah. Hal itu dimaksudkan untuk memantau kemajuan peningkatan kompetensi yang dicapai siswa.
- c. Pelaksanaan, prakerin yang dimulai kelas XI semester genap dinilai DU/DI kurang tepat, karena pada kelas XI belum semua materi kejuruan diajarkan kepada siswa di sekolah, sedangkan sekolah tidak mau mengirimkan siswanya ke DU/DI di kelas XII karena untuk persiapan dan pelaksanaan Ujian Nasional (UN).

- d. Secara operasional, jenis-jenis kompetensi hingga elemen yang dipelajari/dipraktikkan dalam prakerin sesuai dengan Kurikulum SMK yang mengacu pada SKKNI Level II KK Tata Boga.
- 6. Pelaksanaan Uji Kompetensi/Sertifikasi
 - a. Uji kompetensi sudah menggunakan system klaster/paket, namun proses sertifikasi masih dilakukan sekaligus di kelas akhir. Hal ini memberatkan siswa yang pada tahun/tingkat terakhir juga sedang menghadapi ujian akhir sekolah, ujian nasional, dan kegiatan lainnya yang terkait kelulusan.
 - b. Menghadapi diberlakukannya SKKNI level II tahun 2018 yang telah mengadopsi *Common ASEAN Tourism Curriculum* (CATC) Lembaga Sertifikasi Profesi Pihak Pertama (LSPP1) di SMK belum diverifikasi LSP oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP), kecuali LSPP1 di SMK yang sudah merintis Kurikulum SMK 2018 yang telah mengadopsi CATC (SMK Negei 3 Malang).

B. REKOMENDASI

Beberapa rekomendasi yang dirumuskan sebagai berikut:

1. Penyelarasan dan pelaksanaan Kurikulum (Pembelajaran), dan Kondisi Guru

Kepada Direktorat Pembinaan SMK dan Pusat Kurikulum direkomendasikan untuk melakukan pengurangan dalam bentuk:

- a. Penghapusan beberapa butir KI/KD tentang penyiapan dan pembuatan hidangan *fusion food*, dan *food gastronomy molecular*. Namun bagisiswadan sekolah yang berminat dapat diselenggarakan sebagai kegiatan ekstra kurikuler, dengan bantuan DU/DI mitra di bidangnya sebagai tenaga pengajar.
- b. Kedalaman kompetensi yang diajarkan pada Mata Pelajaran Ilmu Gizi tidak perlu sampai menganalisis dan memecahkan masalah kekurangan zat gizi, cukup sampai dengan membuat dan menyajikan makanan/minuman sesuai dengan kebutuhan gizi

ideal, dengan mengacu pada Daftar Komposisi Bahan Makanan (DKBM) baik nasional maupun internasional.

- c. Pengurangan jenis-jenis makanan kontinental dan oriental yang dipelajari, dan memperbanyak jenis-jenis makanan/ lokal atau khas Indonesia. Komposisi yang ideal adalah 50 persen untuk lokal/nasional, 30 persen untuk kontinental, dan 20 persen oriental.
- d. Peran/fungsi, keberadaan dan kompetensi guru dalam pelaksanaan kurikulum (pembelajaran), kepada Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah (khususnya Direktorat PSMK), Direktorat Jenderal GTK (khususnya Direktorat Pembinaan Guru Pendidikan Menengah), dan Pemerintah Provinsi (khususnya Dinas Pendidikan Provinsi) direkomendasikan hal-hal berikut:
 - 1) Kebijakan pembelajaran dengan model *team teaching* perlu dipertimbangkan untuk diberlakukan lagi secara nasional, terutama untuk pembelajaran praktik. Untuk mengantisipasi terjadinya penyalahgunaan seperti mangkir mengajar atau praktik-praktik yang menyalahi aturan dapat dilakukan alternatif-alternatif berikut:
 - a) Menerapkan sanksi yang cukup keras terhadap guru yang menyalahgunakan pelaksanaan *team teaching* seperti pengurangan tunjangan kinerja, memperhitungkan penyalahgunaan kedalam penilaian SKP, hingga penundaan kenaikan pangkat.
 - b) Melibatkan siswa “senior” untuk mendampingi/membantu guru pada pembelajaran praktik. Kategori siswa senior dapat menggunakan ukuran siswa yang baru selesai melaksanakan prakerin, atau siswa kelas akhir (3) yang memiliki nilai rapor untuk mata pelajaran terkait dengan prestasi sangat baik. Siswa-siswa yang bersedia dan mampu menjadi pendamping guru mengajar, diberikan penghargaan seperti sertifikat dan

dicalonkan mewakili sekolah pada ajang Lomba Keterampilan Siswa (LKS) dan/atau *skill competititon* tingkat nasional maupun internasional.

- c) Bekerjasama dengan perguruan tinggi di bidang keahlian Tata Boga (pariwisata) untuk memanfaatkan mahasiswa tingkat akhir yang menempuh jalur non skripsi, untuk melakukan (praktik mengajar) sebagai pendamping guru.
- 2). Melakukan upaya penyesuaian/penyamaan pemahaman antara guru dengan pengawas, dalam pengembangan pelaksanaan pembelajaran yang berorientasi DU/DI dalam konteks mekanisme penyelarasan kurikulum, unsur pengawas juga harus dilibatkan.
- 3) Mengantisipasi ketersediaan guru-guru kelompok mata pelajaran C2 dan C3
 - a) Sebagian guru-guru akan memasuki pensiun, diantisipasi dengan melakukan
 - Secara bertahap mulai melakukan rekrutmen guru kelompok mata pelajaran C2, dan C3 untuk mulai menggantikan guru-guru yang memasuki masa pensiun
 - Menyusun peraturan untuk merekrut guru dari kalangan DU/DI, baik sebagai guru tamu maupun guru tetap dengan status kontrak. Rekrutmen guru dalam konteks ini juga dengan menerapkan beberapa persyaratan khusus seperti tidak mutlak harus berkualifikasi pendidikan minimal S1, karena yang diutamakan adalah kompeten pada bidang keahlian yang dibutuhkan.
 - b) Memberi kesempatan “magang industri” bagi guru kelompok mapel C2 dan C3 yang belum berpengalaman industri, dengan melakukan kerjasama dengan sektor-sektor (kementerian) sebagaimana tercantum dalam Inpres No. 9 tahun 2016, ditambah sektor lain seperti Pertanian dan Pariwisata, untuk:

- Meningkatkan kapasitas (intensifikasi) penyelenggaraan program magang guru kelompok mata pelajaran C2 dan C3 ke DU/DI, agar para guru memiliki pengalaman industri yang relatif selalu sesuai dengan perkembangan teknologi yang terjadi di DU/DI.
- Mendorong dan meningkatkan pelaksanaan Tefa (*teaching factory*) atau *Technopark* yang “ideal” sebagai perwujudan DU/DI di sekolah. Penekanan istilah ideal dalam hal ini adalah mutlaknyanya keberadaan dan peran optimal DU/DI mitra sekolah sebagai pembina Tefa dan *Technopark*.

2. Praktik kerja industri (Prakerin)

Kepada Direktorat PSMK, Pemerintah Provinsi (Dinas Pendidikan Provinsi, dan SMK) direkomendasikan hal-hal berikut:

- a. Mendukung Prakerin dilaksanakan pada kelas XII. Untuk mengantisipasi adanya kesulitan karena persiapan menghadapi UN, dapat dipertimbangkan kewajiban mengikuti UN hanya bagi siswa-siswa SMK yang berniat melanjutkan pendidikannya ke perguruan tinggi, tidak bagi yang ingin bekerja setelah lulus.
- b. Mendorong sekolah menyiapkan *softskills* siswa dalam hal *attitude* (disiplin, rajin, jujur, dan mau terus belajar) dan karakter yang baik dan tangguh sebelum siswa melakukan prakerin. Hal ini didukung sepenuhnya oleh mitra kerja SMK Pariwisata Dengan demikian DU/DI akan mudah untuk bertanggungjawab menanamkan budaya kerja yang baik dan keterampilan yang handal.

3. Kompetensi/Sertifikasi

Kepada Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah (khususnya Direktorat PSMK) dan BNSP direkomendasikan hal-hal berikut:

- a. Mendukung LSP-P1 di sekolah-sekolah segera diverifikasi oleh BNSP agar dapat menggunakan skema-skema sertifikasi pada SKKNI Level II tahun 2018 yang telah mengacu kepada CATC.
- b. Mendukung pelaksanaan koordinasi dengan kementerian/lembaga terkait harus diperkuat, agar upaya keras menyusun SKKNI Level II untuk seluruh Kompetensi Keahlian sebagai acuan untuk pembelajaran dan sertifikasi (sesuai Inpres No. 9/2016), mendapatkan respon yang benar-benar baik dari kalangan DU/DI.

BAB V

DAFTAR PUSTAKA

- Agung, P. W., 2018. Pendidikan Vokasi Ciri Negara Maju, Suara Merdeka, Kamis, 18 Oktober 2018 | 13:29 WIB.
- Aminuddin & M. Najib. 2013. *Relationship of job involvements on vocational school students job satisfactions in industrial training. International Journal of Vocational and Technical Education*. Malaysia: Academic Journals Vol.5 (1). hal 1-7.
- Andrew, H, 2009. *Kekuatan Networking*, dalam <http://pembelajar.com> diakses tanggal 27 Januari 2016.
- Anonym, (Statistik Ketenagakerjaan BPS, Agustus 2015).
- Badan Nasional Sertifikasi Profesi. 2017 dan 2018. Skema Sertifikasi KKNI Level II pada Kompetensi Keahlian Tata Boga. BNSP. Jakarta.
- Badan Pusat Statistik. 2017. Penduduk Usia >15 Tahun Bekerja Menurut Tingkat Pendidikan.
- Badan Pusat Statistik. 2018 *Tingkat Pengangguran Terbuka Februari 2018*, (<https://www.bps.go.id/pressrelease/2018/05/07/1484/februari-2018--tingkat-pengangguran-terbuka>) diakses tanggal 31 Juli 2018.
- Badan Standar Nasional Pendidikan. 2009. Pembentukan Badan Standar Nasional Pendidikan, Jakarta: Depdiknas.

- Departemen Pendidikan Nasional. 2003. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Djojonegoro, W. 1998. *Pengembangan Sumber Daya Manusia Melalui Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)*. Jakarta: PT Jayakarta Agung Offset.
- Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 2012. *Booklet Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia*, Jakarta.
- Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan. 2016.a Paparan Kepala Sub. Direktorat P2SMK: *Keselarasan Kurikulum 2013 dengan kebutuhan Dunia Kerja* Jakarta: Dikmenjur.
- Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan, 2016b. *Pedoman Pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan Sekolah Menengah Kejuruan*, Jakarta: Dikmenjur.
- Ellora, D. 2017. <https://journal.sociolla.com/lifestyle/molecular-gastronomy> *Mengenal Molecular Gastronomy, Pengalaman Makan Ajaib Dengan Ilmu Fisika yang Tidak Akan Anda Lupakan Seumur Hidup!*
- Gatot H. P, 2002. "Jerman menjadi negara industri yang tangguh karena didukung tenaga terampil lulusan sekolah kejuruan". dalam *Harian Kompas*, 20 April 2002.
- Hamalik, O. 2007. *Manajemen Pelatihan Ketenagakerjaan Pendekatan Terpadu*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Indogastronomi (2015). Artikel tentang Gastronomi, Kuliner, DLL. indogastronomi.wordpress.com, 2015.
- Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2016, tentang Revitalisasi Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dalam rangka Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia (SDM) Indonesia.
- Jalal, F. 2015. Bonus Demografi: Berkah atau Bencana, Makalah disampaikan pada Dialog Bonus Demografi, DDI, Jakarta 2 September 2015.
- Jandhyala, B.G.T. 2002. *Vocational Education and Training in Asia*.

- Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Standar Kualifikasi Kerja Indonesia.
- Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, 205. Statistik Ketenagakerjaan BPS, Jakarta.
- Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI No. 239/MEN/X/2004 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Sektor Pariwisata Sub Sektor Hotel dan Restoran.
- Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI No.318/MEN/IX/2004 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Sektor Pariwisata Sub Sektor Tata Boga.
- Kementerian Pariwisata, 2016, Rapat Koordinasi Nasional SMK Pariwisata se Indonesia.
- Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 323/U/1997 tentang penyelenggaraan Prakerin SMK.
- Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 080/U/1993 tentang Kurikulum SMK.
- Mulyadi. A. 2014. *Efektivitas praktik kerja industri sesuai dengan tuntutan dunia kerja*, Skripsi, (tidak dipublikasikan) Program Studi Pendidikan Teknik Mekatronika Fakultas Teknik, UNY.
- Mulyasa. (2014). Pengembangan dan Implementasi Kurikulum 2013. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Nurchayomo. E., 2015. Praktik Kerja Industri (Prakerin) dan Kontribusinya Terhadap Kesiapan Kerja Siswa Kelas XII SMK Negeri I Pati dalam e-Economic Education Analysis Journal ISSN -2251-6544.
- Nugroho, 2018. Taukah Anda, Lebih dari 50 persen Siswa Negara Maju Memilih Pendidikan Vokasi, dalam berita sumut.com. Portal Berita Sumatera Utara tanggal 19 Februari 2018.
- Perbandingan Pendidikan Vocational Indonesia Dengan Jerman, Mei 7, 2013 dalam <https://muhammadramli13.wordpress.com/2013/05/07/perbandingan-pendidikan-vocational-indonesia-dengan-jerman/> diunduh tgl 9 Desember 2019.

- Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, Jakarta: Kementerian Pendidikan Nasional.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019), tentang Orta Kemendikbud.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 07/D. D5/KK/2018 tentang Struktur kurikulum Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)/Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK).
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor. 34 Tahun 2018 tentang Standar Nasional Pendidikan SMK/MAK.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang KKNI dalam www.kemenertrans.go.id, dikutip 04 Juli 2018.
- Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2012 tentang Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10/ Tahun 2018 tentang Badan Nasional Standar Profesi.
- Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah.
- Pusat Penelitian Pendidikan dan Kebudayaan, Studi Penjurusan 1995 s.d. 1998, Jakarta: Balitbangdikbud.
- Pusat Penelitian Kebijakan Pendidikan dan Kebudayaan, 2014-2015. Studi Efektifitas BOS Dikmen, Jakarta.
- Pusat Penelitian Kebijakan Pendidikan dan Kebudayaan, 2015. Kajian Isu Aktual, Jakarta.

- Puspitasari, I. D. 2010. Studi Eksplorasi Tentang Pola Kerjasama Praktik Kerja Industri SMK Negeri 1 Tengaran Kabupaten Semarang, Skripsi (tidak dipublikasikan), Jurusan Rekayasa Perangkat Lunak, Fakultas Teknik Universitas Negeri Semarang.
- Ramli (2013). Proposal Kegiatan Training Guru Produktif SMK Sekota Makassar Program SMK Keahlian Teknik Kendaraan Ringan. <https://muhammadramli13.wordpress.com/2013>.
- Sashkin, M dan Kisser. 1993. *Putting Total Quality Management to Work*, (San Francisco: Berret – Kohler Publisher, 1993), hal. 75.
- SKKNI Nomor KEP 239/MEN/X/2004 tentang Penetapan Standar Kualifikasi Kerja Nasional Indonesia Sektor Pariwisata Sub Sektor Hoel dan Restoran serta ASEAN *Common Competency Standards for Tourism Profesional dan CATS (Common ASEAN Tourism Curriculum) dan ASEAN MRA (Mutual Recognition Arrangement) on Tourism Professionals* pada Tahun 2012.
- Slamet, P.H. 2016. Kontribusi Kebijakan Peningkatan Jumlah Siswa SMK teradap Pembangunan Ekonomi Indonesia” dalam Cakrawala Pendidikan, UNY: *Jurnal Ilmiah Pendidikan*, hlm301-331.
- Spencer, L. M and Spencer, S. M. 1993. *Competence at Work*. John Wiley & Son. Canada.
- Sudira, P. 2006. Buku Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan. Departemen Pendidikan Nasional.
- Supriyadi, D., 2011. Sejarah Pendidikan Teknik dan Kejuruan di Indonesia, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan menengah, Direktorat Pendidikan Menengah Kejuruan.
- Suryadi, A. 2010. Permasalahan dan Alternatif Kebijakan Peningkatan Relevansi Pendidikan.
- Suyanto dan Hisyam, D., 2000. Refleksi dan Reformasi Pendidikan Indonesia memasuki Millenium III, Yogyakarta: Adi Cita.
- Sya, A. 2016. Siapkan SDM Berkualitas, Kemenpar Gelar Rakornas SMK Pariwisata se-Indonesia, dalam [travel detik.com/siapkan](http://travel.detik.com/siapkan) DM

- berkualitas kemenpar gelar rakor, diakses tanggal 2 Oktober 2016.
- Teck Heang Lee. 2012 “Perceived Job Readiness of Business Students at the Institutes of Higher Learning in Malaysia”. *International Journal of Advances in Management and Economics. Malaysia: Issue 6 Vol.1.* p.151.
- The 2009 Unesco Framework for Cultural Statistics (FCS), *Corporate author: UNESCO institute for statistics*, 1589.
- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- Waugh, T and Kartasasmita. 2004. *Higher Education in Indonesia*.
- Widodo, W.S.2016. Siapkan SDM Berkualitas, Kemenpar Gelar Rakornas SMK Pariwisata se-Indonesia, dalam travel detik.com/siapkan SDM berkualitas kemenpar gelar rakor, diakses tanggal 2 Oktober 2016.
- Yuli. 2012. *Evaluasi Pelaksanaan Praktik Kerja Industri Siswa SMK Kompetensi Keahlian Penyuluhan Pertanian di Kalimantan Selatan*. Skripsi (tidak dipublikasikan) Yogyakarta: UNY.

Beberapa upaya sudah dilakukan pemerintah dalam menyelaraskan kompetensi lulusan SMK dengan kebutuhan dunia kerja dan dunia industri (DUDI), dari sistem *link and match* hingga instruksi presiden tentang Revitalisasi Pendidikan Vokasi, namun upaya-upaya tersebut dihadapkan pada permasalahan belum terciptanya ‘*mutual understanding, needs, and benefits*’ antara SMK dan DUDI, konsistensi kebijakan, dan ketersediaan instruktur pembimbing, serta tantangan yang bersifat internal, eksternal, nasional bahkan regional. Buku ini menyajikan hasil studi kasus pada lima sekolah sampel terkait penyelarasan lulusan SMK Pariwisata Kompetensi Keahlian Tata Boga dengan kebutuhan DUDI. Terungkap bahwa ada beberapa KD yang dinilai terlalu tinggi untuk tingkat SMK, guru kelompok C2 dan C3 sebagian besar belum memiliki pengalaman magang di industri, ketidaksesuaian peralatan praktik yang ada dengan kebutuhan, waktu pelaksanaan praktik kerja industri (Prakerin) dan uji kompetensi yang kurang tepat. Terkait hal tersebut, buku ini juga menyajikan beberapa rekomendasi yang diusulkan untuk perbaikan kebijakan dan pelaksanaan pembelajaran dan praktik di SMK Kompetensi Keahlian Tata Boga.



Pusat Penelitian Kebijakan
Badan Penelitian dan Pengembangan dan Perbukuan
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
2020

ISBN 978-602-0792-73-6

